



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA
KOMISI IV DPR RI**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : Menteri Pertanian Republik Indonesia
Hari, Tanggal : Rabu, 25 Agustus 2021
Waktu : Pukul 10.30 s.d. 16.13 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara (KK-IV) Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta
- Ketua Rapat : SUDIN, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Acara : 1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021;
2. Evaluasi Anggaran Tahun 2021;
3. RKA K/L Tahun 2022 (hasil pembahasan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi);
4. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi; dan
5. Isu-isu lainnya.
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Tommy
Hadir : A. Anggota DPR RI:
27 dari 54 orang Anggota Komisi IV dengan rincian:
1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP)
7 dari 11 orang Anggota
 1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI
 2. Riezky Aprilia, S.H., M.H.
 3. Ir. Mindo Sianipar
 4. Ono Surono, S.T.
 5. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
 6. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.B.A.
 7. Maria Lestari, S.Pd.
 2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)
5 dari 8 orang Anggota
 1. H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil Ketua
 2. Ir. Hanan A. Rozak, M.Si.

3. Ir. Ichsan Firdaus
4. Ir. Panggah Susanto, M.M.
5. Alien Mus
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-GERINDRA)
2 dari 7 orang Anggota
 1. Renny Astuti, S.H., S.PN.
 2. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, Dess., M.Sc.
4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)
2 dari 6 orang Anggota
 1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si./Wakil Ketua
 2. Yessy Melania, S.E.
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)
3 dari 6 orang Anggota
 1. Anggia Erma Rini, M.K.M./Wakil Ketua
 2. Luluk Nur Hamidah, M.Si, M.P.A.
 3. Edward Tanur, S.H.
6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)
2 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. Suhardi Duka, M.M.
 2. Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)
3 dari 5 orang Anggota
 1. drh. H. Slamet
 2. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
 3. H. Johan Rosihan, S.T.
8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)
2 dari 4 orang Anggota
 1. Haerudin, S.Ag., M.H.
 2. Slamet Ariyadi, S.Psi.
9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)
1 dari 2 orang Anggota
 1. Ema Umiyyatul Chusnah.

B. Pemerintah:

1. Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H. (Menteri Pertanian);
2. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc. (Sekretaris Jenderal sekaligus Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian);
3. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian);

4. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian);
5. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sekaligus Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian);
6. Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian);
7. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si. (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian);
8. Prof. (R). Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian);
9. Ir. Bambang, M.M. (Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian);
10. Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M. (Plt. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian);
11. Achmad Bakir Pasaman, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia *Holding Company*;
12. Nugroho Christijanto, Wakil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia *Holding Company*;
13. Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero);
14. Karyawan Gunarso, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero) hadir secara virtual;
15. Maryono, Direktur Utama PT Pertani (Persero) hadir secara virtual; dan
16. Harry Warganegara, Direktur Utama PT Berdikari (Persero) hadir secara virtual.

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV,
Yang terhormat Menteri Pertanian beserta jajaran,
Yang terhormat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Holding Company,
Yang terhormat Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia,
Yang terhormat Direktur Utama PT Sang Hyang Seri. (Hadir tidak Sang Hyang Seri? Secara virtual ya. Karena pembatasan ya.
Hadirin kami hormati,

Mengawali rapat pagi ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Kerja ini dalam keadaan sehat

wal'afiat. Sebelum saya memulai acara ini kami segenap Anggota Komisi IV mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya adik ipar dari Bapak Menteri Syahrul Yasin Lipo, beberapa minggu yang lalu.

Sesuai dengan jadwal acara rapat Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Bamus pada tanggal 13 Juli 2021, dan Keputusan Rapat Internal Komisi IV tanggal 18 Agustus, pada hari ini Rabu tanggal 25 Agustus 2021, Komisi IV menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian dalam rangka membahas:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2020.
2. Evaluasi Anggaran Tahun 2021.
3. RKA K/L Tahun 2022.
4. Usulan program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, dan
5. Isu-isu aktual lainnya.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1), Peraturan Tatib Rapat Kerja hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB)

Rapat Kerja hari ini kita mulai pada pukul 10.30, dan akan diakhiri pada pukul 14.30, mengingat pandemi COVID-19 seharusnya rapat dalam ruang hanya dibolehkan 2 jam. Tapi ini karena isunya cukup banyak dan yang dibahas ini untuk Tahun 2022 maka dimaklumi apabila ada waktu yang masih diperlukan. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan. Sesuai dengan Pasal 254 Ayat (2) Peraturan Tatib atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat,
2. Penjelasan Menteri Pertanian terhadap isu-isu hari ini,
3. Tanggapan Komisi IV,
4. Jawaban Menteri Pertanian,
5. Kesimpulan Rapat,
6. Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Sebagaimana kita ketahui tata cara pelaksanaan tugas Komisi dalam bidang anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Ayat (2) Peraturan Tatib antara lain: mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN. Selanjutnya dalam Pasal 173 Ayat (5) disebutkan bahwa Badan Anggaran melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN, salah satunya dengan mempertimbangkan keputusan Rapat Kerja. Saya tegaskan lagi "dengan mempertimbangkan Rapat Kerja" Komisi dengan Pemerintah terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN beserta nota keuangannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 170 Ayat (1) Komisi melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah untuk membahas alokasi anggaran untuk program kegiatan Kementerian dan Lembaga, dan pembahasan disampaikan kepada Badan Anggaran secara tertulis. Perlu diketahui tanggal 6 adalah waktu terakhir penyerahan hasil rapat ke Badan Anggaran, sesuai dengan siklusnya.

Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan Rapat Kerja hari ini adalah berdasarkan Surat Badan Anggaran Nomor: AG/90356/DPR-RI/VII2021, tanggal 13 Juli mengenai penyampaian rancangan jawaban pembahasan Rencana Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2020, dan Rancangan Jadwal Pembahasan Rencana Undang-Undang APBN 2022, serta Badan Anggaran Nomor: AG/09710/DPR-RI/VII 2021, tanggal 28 Juli mengenai penyampaian perubahan rancangan jadwal pembahasan rencana Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2022.

Bapak, dan Ibu yang saya hormati,

Selain sebagai penyedia pangan sektor pertanian juga merupakan penopang pertumbuhan ekonomi penghasil devisa negara hingga penyedia lapangan kerja. Pada triwulan I Tahun 2021 Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian tumbuh 2,95%. Kita patut bersyukur bisa ada pertumbuhan 2,95%. Tetapi hal yang paling penting adalah apakah NTP-nya meningkat, nilai tukar petaninya meningkat ditengah terjadinya kontraksi ekonomi nasional sebesar 0,74%. Secara kumulatif nilai ekspor hasil pertanian Januari-Mei 2021 mencapai 234 Triliun, mengalami kenaikan 39,9%. Dibandingkan periode Januari sampai Mei 2020 hal tersebut memperlihatkan sector pertanian masih tetap menempati salah satu penyelamat terpuruknya resesi ekonomi nasional terutama ditengah pandemi 19.

Jadi teman-teman Komisi IV yang saya hormati,

Tadi yang saya katakan itu 237 itu sebagian besar masalah ekspor CPO, supaya jelas ini. Sehubungan dengan hal tersebut kita semua patut bersyukur atas pelaksanaan ekspor yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2021 yang lalu. Berdasarkan informasi yang diperoleh nilai ekspor tersebut mencapai 7,6 Triliun. Untuk itu Komisi IV ingin mendapatkan penjelasan Saudara Menteri Pertanian presentasi dari nilai ekspor tersebut untuk masing-masing sub sector pertanian. Apabila presentasi tersebut dari nilai ekspor tersebut berasal dari ekspor sub sector perkebunan maka perlu kita evaluasi kembali pertanian, atau merupakan kegiatan reguler perusahaan ekspor saja. Pada saatnya mohon Saudara Menteri memberikan penjelasan serta menyiapkan data apa saja yang diekspor dengan nilai 7,6 Triliun. Karena teman-teman Komisi IV semua bertanya kepada saya, mungkinkah 7,6 Triliun? Ya mungkin saja tapi nanti setelah kita menerima data, sandingkan data bea cukai dan data dari Kementerian Perdagangan. Jadi kan kita compare supaya semuanya fare.

Komisi IV menyadari, memasuki periode Tahun 2020-2021 tantangan sector pertanian semakin deras selain dihadapkan oleh tantangan factor alam seperti kekeringan, banjir, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).

Sektor pertanian dihadapkan pada kondisi pandemi COVID-19 yang secara langsung dan tidak langsung menghantam sector pertanian. Akibatnya produksi pertanian terganggu dan mengancam ketersediaan pangan dimasyarakat. Komisi IV mempertanyakan capaian produksi berbagai jenis komoditi terutama telah dilakukan refocusing pada Tahun 2021 alokasi APBN Kementerian Pertanian Tahun 2021 sebesar Rp21 Triliun dalam perkembangannya mengalami refocusing 1-4 menjadi sebesar 16,247 Triliun. Selanjutnya dalam RAPBN 2022 anggaran Kementerian Pertanian direncanakan sebesar 14,51.

Jadi dengan turunnya setelah refocusing 16 sekian jadi 14,1, apakah sasaran capaian akan tetap atau berkurang. Karena kalau kita simak, kita lihat, kita tarik kebelakang, dengan nilai ekspor 7,6 Triliun harusnya kan anggarannya jangan berkurang dari yang difocusing. Komisi IV meminta Kementerian Pertanian agar dalam menyusun rencana kerja dengan kegiatan focus dalam penyediaan pangan bagi masyarakat. Mencermati rencana anggaran Tahun 2020 Kementerian Pertanian agar memperhatikan capaian dan fungsi strategis dari masing-masing Eselon I lingkup Kementan. Untuk kesekian kalinya Komisi IV menegaskan bahwa anggaran masing-masing Eselon I harus berdasarkan kinerja dan fungsi, bukan pemerataan anggaran.

Selanjutnya kami garisbawahi bahwa komponen kegiatan yang berkaitan dengan rapat-rapat, perjalanan dinas, serta dukungan manajemen yang tidak mendukung peningkatan produksi agar dikurangi seefisien mungkin. Bila perlu kegiatan yang menimbulkan permasalahan, serta terindikasi hanya untuk kepentingan sesaat supaya ditinggalkan. Untuk itu Komisi IV akan terus mengawal perencanaan anggaran Tahun 2022 dengan cermat.

Pada rapat hari ini Komisi IV mempertanyakan capaian produksi jagung, yang diperlukan dalam negeri untuk kebutuhan bahan baku pakan ternak. Karena hari ini semua peternak baik ayam, itik atau lain-lain nangis dengan harga jagung yang tinggi selangit. Kenapa harganya tinggi, karena capaian produksinya rendah sekali. Hal ini sangat mendasar mengingat laporan dari beberapa daerah penyaluran benih yang masih terkendala sampai saat ini.

Saya dapat info. Hari minggu saya masih di lapangan kemarin. Wilayah Lampung belum dapat alokasi benih jagung untuk tahap yang ke-2. Saya tanyakan kenapa belum dapat, belum diklik. Kenapa belum di klik, konon katanya belum clear dengan orang Kementeriannya. Clearnya bagaimana, ya saya enggak tahu. Yang tahu nanti Suwandi. Saya sudah jawab dengan baik dan benar. Hal ini sudah saya pertanyakan 3 kali dalam Rapat Kerja, dan mengenai benih jagung maka terkendala sampai saat ini. Selain itu dari berbagai sumber informasi diperoleh bahwa Kementerian Pertanian sangat antusias untuk melakukan ekspor beras. Tentunya hal ini sangat menggembirakan kami komisi IV semua, berarti Indonesia sudah surplus dibawah Menteri (Bapak Syahrul Yasin Limpo). Namun Komisi IV ingin mendapat gambaran yang utuh, berapa capaian rill produksi gabah dan beras, apakah kondisi ini sejalan dengan melakukan ekspor tersebut.

Apalagi terdengar juga sebenarnya bahwa terdapat impor beras. Impor beras pada tahun berjalan. Mohon nanti dijelaskan, kalau perlu nanti berita yang kami dapatkan tolong ditayangkan. Kalau memang berita itu salah, minta media mengkoreksi tapi kalau benar ya berarti kita jangan ekspor dulu. Berbicara masalah capaian produksi, persediaan benih bibit berkualitas merupakan salah satu unsur strategis dalam memegang peranan penting. Pada pertemuan terdahulu telah disepakati untuk memperkuat fungsi BPTP dalam penyediaan bibit benih hingga kita mengurangi bibit benih beli apalagi dari perusahaan asing. Kalau putra bangsa kita bisa kenapa kita harus beli. Namun hingga saat ini belum terlihat secara signifikan hubungan antara instansi terkait di lingkup Kementerian Pertanian. Untuk itu Komisi IV mempertanyakan komitmen Kementerian Pertanian untuk melaksanakan hasil keputusan tersebut.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah terkait dengan Badan Ketahanan Pangan Nasional, dan Badan Karantina Nasional, serta terkait pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Komisi IV meminta penjelasan Menteri, sejauhmana kesiapan langkah yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Saya bahkan bertanya kepada BPTP Lampung sudahkah anda dapat kerjasama dengan Eselon I? Ada Pak Ketua, tapi nilainya Cuma Ratusan Juta. Kita masih ingat waktu rapat yang lalu kita sudah putuskan. Sudah, fungsikan anak bangsa ini kan pintar-pintar, enggak ada yang bodoh. BPTP itu minimal S-2, bahkan ada yang S-3. Ngapain kita beli bibit sama asing, memperkaya orang asing di Indonesia. Bangsa kita kalau mampu ya kita sendiri dong.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Demikian pengantar yang kami sampaikan.

Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Menteri Pertanian untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut diatas.

Kami persilakan. Tolong jangan panjang-panjang karena waktunya mepet.

Terima kasih.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. H. SYAHRUL TASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.):

Bismilahirrahmanirrahim,

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Selamat pagi, dan salam untuk kita semua.

Salam sehat.

Yang sangat kami hormati Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI, para Pejabat Kementan dan dari BUMN yang sempat hari, Hadirin sekalian yang sama kami hormati.

Alhamdulillah Wa Syukurillah La Haula Wala Kuwata Illa Billah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat hadir pada Rapat Kerja dalam keadaan sehat wal'afiat. Saya

dan jajaran Kementerian Pertanian juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI atas undangan Rapat Kerja pagi ini 25 Agustus 2021, dengan agenda yang akan kita bahas:

1. Laporan keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun 2020.
2. Evaluasi anggaran 2021.
3. RKAKL Tahun 2022.
4. Usulan program-program didanai DAK.
5. Isu actual lainnya.

Pimpinan, dan segenap Anggota Dewan yang kami hormati,

Sebagai agenda pertama, ijin kami menyampaikan penjelasan terkait laporan keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2020 dalam laporan realisasi anggaran, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) mencapai 999,52 Miliar atau ini naik 226,35% dari estimasi pendapatan yang hanya sekitar 441,58 Miliar Rupiah, dan realisasi belanja negara 2020 15,19 Triliun itu 95, kami capai 95,61% dari alokasi anggaran yang 15,89 Triliun.

Dalam laporan perubahan ekuitas, kami sampaikan bahwa ekuitas awal 1 Januari 2020 sebesar 88,73 triliun yang mempertimbangkan defisit, laporan operasional dan koreksi-koreksi yang menambah ekuitas dan transaksi antara entitas sehingga ekuitas akhir per 31 Desember 2020 sebesar 82,11 Triliun. Laporan keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2020 secara rinci seperti pada bahan yang telah kami sampaikan kepada Pimpinan, dan Anggota Komisi IV DPR RI. Berdasarkan hasil laporan pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2020 tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tanggal 10 Agustus 2021 telah memberikan open new Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Menteri Pertanian, prediksi WTP pada Tahun 2020 tersebut melengkapi pencapaian WTP Kementerian Pertanian yang sudah 5 kali secara berturut-turut.

Terkait dengan perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI, kami laporkan bahwa dari rekomendasi LHP sebanyak 1646 rekomendasi, sampai dengan bulan Agustus 2021 tindak lanjut tersebut mencapai 79,34% selama 2021. Kementerian Pertanian mendapatkan tambahan LHP meliputi LHP Tahun 2020 atas pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau peremajaan sawit sebanyak 4 temuan, 11 rekomendasi. Optimalisasi lawan rawa dan Covid sebanyak 5 temuan, 14 rekomendasi. Penambahan LHP Tahun 2021 terdiri dari Laporan Keuangan YES sebanyak 3 temuan, 10 rekomendasi dan laporan keuangan (reaksi) sebanyak 4 temuan dengan 10 rekomendasi. Laporan keuangan Kementan Tahun 2020 sebanyak 12 temuan, 39 rekomendasi dan laporan keuangan subsidi pupuk Tahun 2020 sebanyak 3 temuan, dengan 10 rekomendasi.

Pimpinan, dan Anggota yang kami hormati,

Sampai dengan 21 Agustus 2021 realisasi serapan anggaran Kementerian Pertanian 7,85 Triliun (48,35%) dari pagu 16,25 Triliun. Terdapat outstanding kontrak 2,28 triliun, sehingga diharapkan pada waktu dekat realisasi serapan anggaran dapat mencapai 10,13 triliun (62,36%). Untuk itu

kami terus melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian administrasinya. Pada sisi capaian fisik pelaksanaan program dan kegiatan dapat kami laporkan bahwa dengan sampai dengan 21 Agustus 2021, kegiatan utama Kementerian Pertanian sebagian telah berjalan dengan baik, beberapa kegiatan pendukung kecukupan kebutuhan pangan utamanya seperti pengembangan padi telah terealisasi 1,48 juta hektar (kurang lebih 52,95%), pengembangan jagung 907,83 ribu hektar (82,16%), kawasan bawang merah 2,69 ribu hektar (84,33%), dan lainnya. Kegiatan umum pertanian mencapai 77,81%, jaringan irigasi tertier 73,40%, jalan usaha tani 92,40%, dan irigasi pompaan 63,37%, serta kegiatan pekarangan pangan lestari (P2L) untuk mendorong pergerakan ekonomi di pedesaan kurang lebih 80,50%.

Pimpinan, dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Sebagai agenda ketiga kami akan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian Tahun 2022, sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, tema yang diusung adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Dalam rangka mendukung Program Prioritas (PP), Prioritas Nasional (PN) yang ditetapkan Pemerintah, Kementerian Pertanian akan focus pada 5 program, yaitu:

1. Program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas;
2. Program nilai tambah dan daya saing industri;
3. Program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Program pendidikan dan pelatihan vokasi; serta
5. Program dukungan manajemen dan Rincian Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian Tahun 2022 dapat diurai sebagai berikut:

- 1) Program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas. Kegiatan akan tersebar di Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Hortikultura, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Ketahanan Pangan dan Badan Karantina Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar 6,49 Triliun Rupiah.
- 2) Program nilai tambah dan daya saing industri, kegiatan tersebar di Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Horti, Dirjen Perkebunan, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai 1,74 triliun Rupiah.
- 3) Program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi akan dilakukan oleh Badan Litbang Pertanian sebesar 0,36 triliun Rupiah.
- 4) Program pendidikan dan pelatihan vokasi akan dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) senilai 0,77 triliun Rupiah.
- 5) Program dukungan manajemen berada pada Eselon I, dan anggaran yang dibutuhkan adalah 5,09 triliun Rupiah.

Target produksi komoditas utama Tahun Anggaran 2022, seperti padi sebesar 55,20 juta ton, jagung 20,10 juta ton, kedelai 0,20 juta ton, bawang merah 1,64 juta ton, cabai 2,87 juta ton, gula tebu 2,30 juta ton, daging sapi kerbau 0,44 juta ton.

Pagu anggaran Tahun 2022 baik pagu program beserta penyesuaiannya, maupun pagu menurut sumber dana selengkapnya disajikan pada bahan yang telah kami sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI. Dari pagu anggaran 14,45 triliun Rupiah telah dialokasikan ke 11 Eselon I dengan rincian sebagai berikut:

- Sekretariat Jenderal sebesar 1,66 triliun Rupiah,
- Inspektorat Jenderal 97,68 miliar Rupiah,
- Dirjen Tanaman Pangan 1,77 triliun Rupiah,
- Dirjen Hortikultura 1,04 triliun Rupiah,
- Dirjen Perkebunan 1,31 triliun Rupiah,
- Dirjen PHK 1,85 triliun Rupiah,
- Dirjen PSP 2,61 triliun Rupiah,
- Badan Litbang Pertanian 1,33 triliun Rupiah,
- BPPSDMP 1,09 triliun Rupiah,
- BKP 577,39 miliar Rupiah, dan
- Barantan 1,10 triliun Rupiah.

Pimpinan, dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Selain merancang program dan kegiatan pembangunan 2022 yang didanai melalui APBN, Kementerian Pertanian ini juga merancang pendanaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2,4 triliun Rupiah, terdiri DAK fisik 2,22 triliun Rupiah, dan DAK non fisik 200 miliar Rupiah.

Kegiatan DAK dibidang pertanian terdiri atas DAK fisik penugasan Badan Pertanian meliputi:

1. Pembangunan dan rehabilitasi irigasi pertanian atau rehabilitasi jaringan irigasi kuarter, irigasi air tanah dangkal, dan dalam.
2. Pembangunan jalan pertanian adalah jalan usaha tani dan jalan produksi.
3. Pembangunan lumbung pangan masyarakat.
4. Pembangunan industri olahan pangan local.
5. Pembangunan renovasi RPH dan sarana pendukung.
6. Pembangunan dan renovasi BPP, dan sarana pendukungnya.
7. Pembangunan renovasi Puskesmas dengan penyediaan sarana pendukungnya,
8. Pembangunan green house untuk pengembangan hortikultura di luar musim atau off season.
9. Pembangunan rumah olahan pakan ternak untuk DAK non fisik bidang ketahanan pangan dan pertanian meliputi:
 - 1) Pengembangan pekarangan pangan lestari,
 - 2) Biaya operasional Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dalam pengolahan data dan pelatihan pertanian, serta
 - 3) Biaya operasional Puskesmas.

Kriteria penilaian atas usul DAK fisik mengacu pada 3 hal yaitu:

1. Kriteria umum,
2. Kriteria teknis,
3. Laporan kinerja fisik DAK Tahun 2020.

Penilaian kriteria teknis terdiri atas 6, yaitu: Data luas lahan sawah 2020 Perda LP2B, jumlah produksi tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan ternak 2020. Namun demikian kriteria teknis yang telah disusun tersebut masih dimungkinkan untuk melakukan penyesuaian dan masukan dari Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI untuk rancangan DAK non fisik biar pertanian lebih diprioritaskan untuk daerah dengan kriteria rentan rawan pangan, stunting, dan pertanian perkotaan, dan pengembangan kawasan ternak yang ada.

Pimpinan, dan segenap Anggota Dewan yang kami hormati,

Sebagai agenda terakhir yaitu terkait dengan isu actual. Perlu kami laporkan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI bahwa sampai saat ini Kementerian Pertanian masih berkomitmen untuk menjaga ketersediaan pangan dimasa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari kesisi ketersediaan pangan sampai dengan minggu ke-3 Agustus 2021 stok beras ada 7,60 juta ton yang tersedia di penggilingan kurang lebih 1,52 juta ton, di pedagang 708 ribu ton, di BULOG 1,16 juta ton, dan lain-lainnya.

Begitu pula untuk beberapa stok komoditi pangan penting sampai saat ini dalam kondisi tersedia dan cukup aman. Selain dari perkembangan harga beras ditingkat produsen maupun konsumen juga terpantau cukup stabil. Pergerakan harga gabah pada bulan Agustus 2021 masih berada dikisaran HPP baik untuk gabah kering giling, maupun gabah kering panen. Begitu pula harga beras premium maupun medium ditingkat konsumsi cukup stabil.

Isu lainnya adalah merdeka ekspor. Kementerian Pertanian berupaya mendorong ekspor produksi pertanian ke berbagai negara. Merdeka ekspor dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 bertujuan:

1. Mempercepat ekspor produksi pertanian,
2. Menggerakkan Provinsi, memutasi seluruh Kabupaten dan Kota untuk mengakselerasi ekspor didaerah masing-masing,
3. Mendorong pencapaian program gerakan 3 kali lipat ekspor pertanian. Pada acara tersebut dilepas ekspor sebanyak 627.399 ton dan senilai 7,29 triliun Rupiah yang meliputi beberapa komoditas:
 - 1) Komoditas perkebunan 564,550 ton,
 - 2) Tanaman pangan 4.277 ton,
 - 3) Hortikultura 7.230 ton,
 - 4) Peternakan 4.013 ton,
 - 5) Beberapa komoditas lainnya.

Pada kesempatan yang baik ini mohon ijin untuk menyampaikan terkait pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dimana lembaga peneliti pada masing-masing K/L harus pindah ke BRIN, mengingat penting dan peran, dan keberadaan Balitbantan di Kementerian Pertanian kami mengharapkan dukungan Komisi IV DPR RI agar Balitbantan tetap di Kementerian Pertanian. Kami sungguh berharap ini masih tetap kita butuhkan, perbanyak benih, pemulihan benih, dan lain-lain. Barangkali kalau toh memang harus pindah hanya yang berbasis penelitian dasar atau F-Nolnya saja. Tapi untuk pengembangan dan lain-lain masih kita butuhkan berada tetap di Litbang kita. Semua daerah di kawal oleh Litbang Bapak.

Oleh karena itu kalau ini beralih ke BRIN sebenarnya dasar kita itu juga akan bersoal karena tentu saja varietas-varietas bibit yang sudah kita sebar kemudian tidak diikuti untuk pemulihan setiap 3 tahun atau 5 tahun untuk menjadi F2, F1 kembali maka ini akan bersoal. Orang tidak banyak melihat hal ini tetapi sebenarnya ini juga memiliki peranan yang sangat besar. Pak Ketua tadi, Pimpinan dalam arahan awal pertemuan ini juga sudah menyampaikan. Sebenarnya BPPT sangat-sangat kita butuhkan untuk hadir sekaligus melakukan, sebenarnya kita cukup defend dengan kemandirian bibit yang harus dibahas. Saya akan jadikan catatan khusus dari pengarahannya ini agar BPPT memang seperti itu, harus berfungsi melakukan penyediaan varietas bibit yang paling unggul di lapangan. Tentu saja kalau BRIN mau masuk di Fnol. Fnol itu temuan-temuan varietas baru, tetapi untuk implementasi Litbang butuh, kami punya 7,4 juta hektar yang harus terus dilakukan observasi.

Ijin Ketua, Pimpinan, dan segenap Anggota Komisi IV.

Kami mohon penguatan sedikit dari Komisi IV hal ini, karena kalau ini sepenuhnya berpindah sebenarnya ada kesulitan-kesulitan sementara pangan tidak boleh kita berspekulasi, tidak boleh. Dan setiap daerah memiliki kontur dan *agro-climated* yang berbeda, tidak bisa kita samakan Aceh dan Papua, Jawa dan Kalimantan, tidak bisa Bapak. Dia harus memerlukan pendekatan-pendekatan sains dan pendekatan-pendekatan dan teknologi yang berbeda, dan itulah yang dikawal oleh Litbang. Memang kadang-kadang Litbang tidak kelihatan peranannya secara langsung, karena yang akan didepan itu adalah Dirjen-Dirjen Teknis tetapi semua apa yang akan dilakukan dalam bentuk pertanian, intervensi awal harus dikawal oleh Litbang yang bersangkutan di daerah itu.

Saya sungguh berharap dan mau keluar dari perintah aturan tetapi barangkali perlu menjadi pertimbangan yang pertama. Yang kedua, ada BPN juga seperti yang dilansir, ini adalah perintah Undang-Undang, tapi dalam posisi tentu kami berharap apa yang ada sekarang untuk melakukan evaluasi Badan Ketahanan Pangan masih kami butuhkan. Saya kira tidak harus buru-buru dalam kondisi Covid seperti ini, akselerasi kita dan 1 tahun lebih ini saya kira diakui atau tidak ketahanan pangan kita cukup, dan ini membangun optimisme kita. Saya kira itu saja Bapak, dan tentu saja dengan segala kehati-hatian masalah ekspor dan lain-lain akan kita lakukan.

Dan sebenarnya kita sudah 2 tahun tidak impor Bapak. Kalau kita bisa lewati 3 tahun sesuai informasi dari FAO kita mendapatkan label ini, sebenarnya masuk pada kondisi negara dengan ketahanan pangan yang kuat atau masuk pada posisi swasembada. 3 kali tidak impor 3 tahun, itu akan ada evaluasi dari FAO, dan itu pernah dicapai zaman orde baru. Saya yakin dengan kawalan Komisi IV yang sangat-sangat ketat ini Bapak Pimpinan, saya tidak merasa saya sendiri, setiap wilayah saya dikawal oleh Komisi IV dengan ketat dan komitmen yang kritis pada Kementan ini menjadi sesuatu hal yang mahal sekali bagi saya, tentu tidak sempurna kami melakukan operasional tetapi saya selalu ketemu dengan Komisi IV dilapangan, selalu berdampingan dengan program yang ada, dan saya kira ini juga yang menjadi hasil kita bersama,

lepas dari segala kekurangannya tentu saya berjanji untuk menyempurnakannya dimasa yang akan datang.

Saya kira para Eselon I mohon ikut menjawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Ijin Pimpinan kalau kami tidak bisa menjawab dalam forum ini, kami berharap diberikan ruang untuk Rapat Konsultasi atau melakukan konsultasi agar penyempurnaan rencana-rencana dan evaluasi bisa kita lakukan lebih sempurna.

Demikian beberapa hal yang kami sampaikan, mohon pengarahan Komisi IV. Atas segala perhatian Pimpinan, kemarin, hari ini, dan besok dari Anggota Komisi IV kami siap, kami siap untuk selalu bersama-sama. Semoga menjadi ibadah.

Sekian. Kurang lebih mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas penjelasan yang disampaikan oleh Menteri Pertanian.

Sebelum kami persilakan Anggota bertanya, ini ada surat dari Pupuk Indonesia Holding Company. Dirutnya hadir hari ini tetapi pada jam 13.00 agenda kegiatan rapat karena harus ada kewajiban yang harus dihadiri tidak dapat diwakilkan. Disini juga ada surat kuasa yang ditandatangani bermaterai. Itu saja.

Kemudian masalah BRIN, itu domainnya. Kalau orang dagang kantong kiri, kantong kanan, Bapak Pemerintah dengan Pemerintah. Kalau memang sudah diputuskan oleh Presiden Litbang harus pindah ya silakan, tapi saran saya kalau bisa kalau Litbang, BPTP-nya jangan pindah. BPTP-nya dialihkan saja ke SDM untuk yang tadi itu, karena sampai hari ini pun Litbang pun yang katanya tadi sampai 3 kali itu kan enggak ada. Setelah rilis wassalam. Akibatnya bibit yang dihasilkan oleh Litbang itu tidak ada pengawasan. Saya tegaskan lagi, tidak ada pengawasan setelah dirilis maka terciptalah benih jagung HU3. Mungkin HU3, HU10 itu. Karena kalau sudah Presiden memutuskan Litbang pindah ke BRIN ya silakan. Tetapi kalau bisa BPTP-nya tetap dipertahankan, dijadikan satu dengan BPT (Balai Penyuluhan Pertanian).

Yang kedua masalah merdeka ekspor tadi, saya minta data secara rinci untuk kami tahu bahwa ini loh yang nilainya, ekspornya rendah. Dan saya juga minta kepada Eselon I jangan hanya menjalankan kewajiban, habisin anggaran, jangan. Orang Kementerian Pertanian kok programnya ecek-ecek janganlah, yang benar-benar nonjol. Saya miris, Indonesia impor sapi per tahun kurang lebih 1 Triliun, belum termasuk impor daging kerbau. Indonesia akan impor sapi dari Brazil. Brazil masih PMK. Sekarang Brazil sudah berpikir, ngapain gua impor ke Indonesia. Gua impor ke Vietnam. China tidak nerima impor dari Brazil tetapi masuk dagingnya dari Vietnam. Ini loh salah satu yang perlu kita perhatikan.

Kemudian masalah Badan Karantina Nasional, itu sudah seharusnya dijadikan 1 Badan Karantina Nasional. Karena diseluruh dunia. Pak Ono mana tadi. Pak Ono pernah ke Washington DC, kunjungan melihat karantina nasional disana. Enggak ada namanya, oh ini karantina perikanan, ini karantina kehutanan, ini karantina pertanian, enggak ada. Negara China yang begitu besar Cuma ada 1 karantina nasional, semua tertangani dan ditangani dengan baik. Kalau dulu kan ego sektoral. Menterinya bilang, ini bidang saya, enggak bisa diambil. Tiba-tiba Menteri yang lalu bilang, ya sudah silakan eh tahu-tahu Menteri Kelautan bilang, jangan ini kalau kelautan itu spesifik. Kok seolah-olah mengangkangi Undang-Undang. Biarkan saja sudah diputuskan, PP-nya sudah selesai jalankan termasuk juga tadi Badan Pangan Nasional.

Mungkin Pemerintah berpikir, dengan adanya Badan Pangan Nasional akan jauh lebih baik lagi. Nanti Suwandi jawab pertanyaan saya tadi masalah benih pupuk. Tolong jangan nipu lagi, yang jujur jawab saya. Karena saya anytime bisa cek di lapangan apa yang terjadi, apa masalahnya.

Kemudian juga bantu saya nanti, masukan kesimpulan rapat, kurang bayar pupuk Pemerintah terhadap holding. Dan nanti juga dijelaskan PSP perihal hari ini yang saya dengar sudah bulan Agustus mau akhir penyerapan pupuk baru 42% kurang lebih. Sementara di beberapa daerah mengalami kesulitan untuk nebus pupuk. Jadi nanti masalah pupuk, saya sarankan kepada semua teman-teman tidak perlu dibahas disini, hari Jumat kita ninjau pupuk dengan pesertanya Panja Pupuk ke Kujang, Jumat. Disana kami akan minta penjelasan biaya produksi, mekanisme, dan lain-lain. Setelah itu baru kita minta keterangan dari Kementerian Pertanian.

Kita bukan mau bilang siapa benar-siapa salah. Kalau ini ada kekurangan, ini ada kelebihan, ayo kita sama-sama rembuk untuk jalan yang baik, kasihan petani. Karena mekanismenya petani saya tanya, kamu kalau nebus pupuk dimana? Kartunya susah Pak Ketua, karena memang kartunya tidak bisa dipakai, mungkin uangnya tidak ada atau kadang-kadang PIN-nya lupa, kadang-kadang alat EDC-nya rusak. Mau tebus manual harus bawa fotocopy KTP. Kalau ditempat Pak Dedi Mulyadi fotocopy banyak. Nah kalau di kampung saya di Masuji sana mau fotocopy ya mungkin paling dekat 50 km naik motor.

Memang, masih terisolir namanya di kampung. Kemudian ya kesulitan lagi saya ke pengecer. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saya di Lampung saya tanya, kalau mau nebus pupuk enggak punya kartu bagaimana? Kok bisa manual, tapi kami repot Pak. Jadi rekapnya terlalu banyak. Lah, memang Bapak tidak punya komputer? Alhamdulillah Pak komputer saya walaupun sudah jelek ada, tapi saya enggak bisa pakai. Loh, memang Bapak enggak punya anak? Anak saya kerja di Kota. Nah hal-hal ini kita buat sederhana mungkinlah supaya petani gampang mengakses, pengecer juga gampang memberikan data yang baik untuk pertanggungjawabannya.

Silakan apabila ada Anggota Komisi IV yang ingin bertanya. Cuma kita sesuai dengan komitmen harus dengan Tatib, 3 menit. Betul Pak Johan?

Silakan Pak Dedi.

PERGANTIAN KETUA RAPAT

KETUA RAPAT (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Baik.

Kita harus akui secara bersama bahwa keberhasilan dibidang pertanian itu lebih besar karena keikhlasan para petani. Para petan ikhlas menerima keadaan apa pun tanpa protes pada negara. Sehingga karena orang ikhlas biasanya produktif. Mudah-mudahan keikhlasan ini bisa ditembus oleh kita semua untuk ikhlas juga membantu meringankan berbagai kesulitan yang mereka miliki, dari mulai kesulitan dapat bibit, kesulitan dapat pupuk, kesulitan biaya produksi yang mahal, terakhir kesulitan mereka menjual.

Ini adalah problem yang dialami oleh para petani. Kehidupan para petani tidak seindah gambar yang kita lihat, dan tidak semudah apa yang kita ucapkan. Mereka kehidupannya jauh lebih sulit dibandingkan dengan kita semua. Dan untuk itu agar petani segera terbebas dari himpitan kesulitan, tidak berjanji dalam setiap hari sambil begini petani diwilayah utara Jawa itu begini tiap hari, aku berjanji apa yang dialami. Kita mulai dari penyanyi lawas kita yang baru sembuh dari penyakit, pernah kehilangan emasnya di kamarnya, dan *Insha Allah* hari ini akan diganti karena sudah ada Mas Panggah, jadi beratnya lebih berat dibanding Mas yang hilang. Ibu Endang Estaurina, S Thohari.

Terima kasih.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Terima kasih Pak Dedi, sampurasun.

Bismilahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam Indonesia Raya.

Pak Menteri, dan jajarannya yang saya hormati, dan juga
Para Pimpinan kita khususnya Kang Dedi yang terhormat, dan saya
banggakan, juga
Para Dirut yang mendampingi Pak Menteri dan beserta jajarannya yang sangat
saya banggakan.

Saya kebetulan mewakili Fraksi Partai Gerindra memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian yang prestasinya 5 kali berturut-turut WTP, namun Pak masih ada yang perlu Bapak koreksi yaitu tentang Kredit Usaha Rakyat. Kebetulan dulu saya sempat jadi Direktur Pembiayaan selama 10 tahun Pak, dan sebetulnya petani kita ini sulit kalau diajak dengan mekanisasi perbankan. Karena yang diperlukan adalah kemudahan akses bukan kemurahan.

Yang kedua, tentang realisasi anggaran Kementan per 21 Agustus 2021. Disini sebesar 48,35%. Jadi ditambah dengan outstanding kontrak sebesar 14,01%. Nah ternyata realisasi anggaran ini kan belum maksimal. Nah mohon ada effort dari Bapak dan jajarannya supaya hambatan-hambatan dilapangan ini bisa dipermudah sehingga realisasinya nanti bisa tercapai dengan maksimal.

Yang berikutnya adalah tadi Pak yang dikemukakan oleh Bapak tentang BRIN. Kami sependapat dengan usulan Bapak, malah saya ikut merintis untuk peneliti-peneliti yang sekarang jadi Dirjen-Dirjen ini Pak. Nah dulu Pak 30 tahun yang lalu, kami mencari kandidat dokter itu sulitnya bukan main. Nah jadi Bapak jangan sisihkan para peneliti-peneliti kita termasuk bio teknologi. Karena Balai Biogen yang ada di Bogor itu saya ikut merintis dari BRIN Pemerintah Jepang yang tadinya sangat sulit Pak, butuh mencairkan dana tersebut. Tapi dengan dukungan dan doa dari semua petinggi-petinggi yang ada di Bapenas akhirnya berhasil. Jadi kalau menurut saya Pak Bio Teknologi juga jangan dilepas karena itu penting untuk varietas-varietas unggulan kita.

Berikutnya Pak tentang hasil panen komoditas flori kultura. Nah ini tidak terserap Pak baik di masyarakat maupun dipedagang-pedagang kita yang kecil-kecil. Nah mohon ada inovasi khusus dari teman-teman Direktorat Jenderal Teknis untuk mengubah anggarannya supaya mendukung para petani-petani kita yang tadi dikemukakan oleh Pak Dedi kita ini. Nah jadi keihklasan petani ini juga harus kita beri dukungan moril Pak, nah terutama untuk menghargai petani-petani atau peternak ayam kita. Peternak ayam kita ini hidupnya makin hancur Pak karena dilapangan harganya itu hanya Rp9000 per kilogram, sampai saya ikut membeli untuk dibuat souvenir kepada teman-teman pensiunan dari ayam-ayam yang sudah diolah. Nah ini kan juga perlu ada perhatian dari Direktorat Jenderal PKH untuk menjadikan sector perunggasan ini sebagai prioritas rencana kerja dan lebih berpihak kepada peternaknya, bukan kepada pengusahanya.

Nah juga ada beberapa usulan dari Fraksi Partai Gerindra kepada Pak Menteri, tentang pemeriksaan dan review BPK. Nah itu Pak perlu dilihat kembali karena ada format perjanjian PT Pertani yang tidak seragam kepada unit pengelola benih atau bagaimana. Nah ini mohon ada evaluasi dari Pak Menteri. Sebetulnya kami sudah mencatat Pak ada 20 point. Nah yang terakhir adalah Pak karena kita tadi beraneka zona, jadi kita sebut agro ecology zona yang berbeda, maka tentu saja Pak impor kedelai kita itu sebetulnya bisa disubsitusi dengan yang namanya koro pedang, yang bagus sekali Pak akan tumbuh didaerah-daerah panas. Namun sampai saat ini mohon maaf ini Pak, tidak pernah ada uluran Pemerintah. Malah Pak, pada waktu itu ada peneliti kita yang berhasil dari IPB Pak, dapat peringkat tertinggi, *cum laud* di Perancis karena koro pedang, tapi ternyata setelah sampai di Indonesia tidak pernah ada uluran dari Pemerintah untuk mengembangkan teknologi tersebut sampai meninggal Pak peneliti tersebut.

Kalau boleh saya sebut namanya Prof, Dr. Dedi Agus, sahabat saya. Saya sering miris Pak lihat kejadian ini. Makanya dengan kehadiran Bapak tadi akan mengambil alih Badan Litbang Pertanian saya bangga Pak karena saya

ikut merintis 30 tahun yang lalu Pak. Saya diutus oleh Pak Harto langsung untuk keliling ke Badan-Badan Internasional untuk cari *grand* Pak. Tapi setelah sampai di Indonesia *grand* itu dijadikan bancakan terus terang saja Pak. Saya miris Pak. Yang terakhir adalah *grand* dari Bank ... khususnya untuk lembaga pembiayaan pertanian Pak (Bank Pertanian). Tapi ternyata tidak berhasil karena setiap penggantian Menteri ada penggantian *policy*. Untuk itu Bapak harus mulai sekarang membuat *grand strategy* Pak supaya ganti Menteri tidak ganti *policy*, ganti Presiden pun tidak ganti *policy*.

Demikian.

Terima kasih. Mohon maaf kalau saya agak emosional karena memang usia sudah tua Pak.

Terima kasih.

*Billauhitaufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Endang yang telah mengekspresikan emosinya karena dia adalah pelaku sejarah, bagaimana pangan itu bisa dibangun dengan kuat, dan kekuatan itu harus terus tidak boleh berhenti karena pangan itu juga terus dikonsumsi oleh masyarakat. Siapa pun yang memimpin negara ini maka pangan harus menjadi factor utama yang harus mendapat perhatian. Dan kita jujur kalau dibanding negara lain perhatian negara terhadap petani itu rendah. Di negara lain produk pertanian dibeli oleh negara dengan harga yang sangat baik.

Di negara lain, petani tidak berpikir lagi pupuk. Di negara lain petani tidak berpikir lagi benih. Di negara lain areal pertaniannya dilindungi oleh negara, tidak alih fungsi seperti kita dalam setiap waktu, bertaruh dalam setiap masa. Wajar kalau di negara lain petaninya sejahtera dan pangannya swasembada. Nah kalau kita hari ini, petani harus bertaruh dengan keinginan anaknya untuk menjual areal pertaniannya karena godaan perubahan, petani harus bertaruh dengan semakin banyaknya inpsi dalam dunia pertanian untuk mengubah peruntukannya, petani harus bertaruh dengan berbagai kepentingan dalam setiap waktu, dan Kementerian Pertanian pun harus bertaruh karena Lembaga Penelitiannya harus pindah yang pada akhirnya nanti kehilangan para penelitinya. Kalau sudah kehilangan para penelitinya maka kehilangan benihnya, kalau sudah kehilangan benihnya nanti para petani akan kesulitan kembali mencari benih sehingga harus mencari benih-benih baru, dan kita harus khawatir juga jangan sampai yang menanam benihnya tidak bertanggungjawab untuk mengawin dan mensertifikasinya. Nah karena banyak orang yang menanam benih disembarang tempat tanpa sertifikat.

Untuk itu kita sampaikan, ini mau Pak Slamet apa Johan yang mau ngomong? Fraksi Keadilan Sejahtera oleh Pak Johan. Pak Johan termasuk setiap menanam benih pasti disertifikasi sah dan halal.

Terima kasih.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati,
Para Pimpinan, dan Anggota Komisi IV.

Pertama, mohon maaf Pak Menteri saya ingin mengoreksi didepan. Ini soal konsistensi saja. Ketika melaporkan realisasi kegiatan, itu menggunakan ukuran hektar, sudah ditanam sekian hektar. Tetapi ketika perencanaan dia bicaranya tonase. Nah ini kan patut saya menduga-duga, karena kalau saya bicara hektar Pak, kita bicara bibit disitu, kita bicara pupuk disitu, kita bicara Alsintan, kita bicara macam-macam. Tetapi ketika bicara perencanaan disini malah bicaranya tonase bahwa tahun ini kita akan meningkatkan produksi padi sekian-sekian ton, tapi setelah kita pelaporan evaluasinya bicaranya hektar. Tolong nanti dijelaskan soal konsistensi ini, jangan sampai kita berlindung, perencanaan kita tinggi karena gagal kita bicara sudah kita tanam sekian hektar, dia berhasil atau tidak. Nah itu yang pertama Pak.

Yang berikutnya masuk ke substansinya. Dalam laporan realisasi kegiatan utama Kementan Tahun 2021 per 21 Agustus ini saya membaca pengembangan padi itu baru 52,95%, terus yang kedua produksi bibit ternak unggul ini baru 55,15%. Nah dan ukur realisasinya 30,94%. Menurut saya ini capaiannya sangat rendah sampai bulan Agustus. Yang berikutnya kenapa saya memfokuskan kepada 3 komoditas ini Pak, karena ada yang paradox disini, dengan rendahnya capaian kita dengan target yang sudah ada terus realisasinya baru sekian, kemudian ada disikapi dengan kebijakan importasi. Bapak kemarin ekspor beras ke Saudi Arabia katanya kan, tapi hari ini kita mendapat berita bahwa Indonesia ini akan impor beras lagi. Tidak bisa kita memenuhi target terlalu rendah dibibir ternak unggul sapi misalnya, hari ini kita impor sapi dari India, kerbau dari India. Demikian juga untuk pangan kita, belum lagi cabai, belum lagi singkong, terus untuk apa *Food Estate* kita tanam singkong kemarin itu, sampai tentara masuk sawah Pak tanam singkong, kita impor singkong. Nah tolong kami nanti dijelaskan antara fakta kita hari ini dengan nanti tentu kita bicara tentang di 2022.

Nah jadi Komisi IV itu Pak, kita dapat complain dari warga negara itu baik rakyat kita, baik Fraksi kita, baik Partai kita itu ketika ada berita impor Pak walaupun sebenarnya kebijakan impornya bukan di kita, karena kita bicara tentang produksi saja tetapi kan nanti bisa dilihat bisa dijelaskan oleh masyarakat kepada kita bahwa berarti kita ini kurang produksi. Kalau seandainya kita kurang produksi berarti kan ada impor. Nah makanya saya sekali lagi ketika perencanaan ini target produksi komoditas utama 2022 dari dulu saya sudah kasih saran Pak, tolong dengar saran saya sekarang ini. Dalam buat perjalanan target produksi tolong disertakan juga dengan kebutuhan nasional. Target padi 55,20 juta ton, target kebutuhan nasional kita berapa biar kita tahu lebih atau kurangnya. Cabai sekian, berapa kebutuhan kita biar kita tahu kurangnya berapa. Nah sehingga nanti kalau misalnya ada complain, jadi kita tahu kebijakan Menteri Pertanian ini mendukung impor atau

yang gerakan 3 kali lipat ekspor itu. Nah biar gerakan impor itu bukan hanya gimic-gimic politik, serius kita kalau mau ekspor. Jadi itu yang pertama.

Yang kedua Pak Menteri, soal BRIS, BRIN apakah itu namanya. Mohon maaf, Jadi soal BRIN ini nanti mungkin perlu kita bicarakan secara serius, memang kalau misalnya Badan Litbang tadi itu dipotong maka BPTP kita dibawah itu seperti kaki tanpa kepala. Nah karena kalau misalnya Bapak ingin mempertahankan atau kita sepakat mempertahankan itu ya kita sepakat cari nomeklatur yang berbeda sehingga dia tidak menjadi Badan Litbang. Mungkin bisa jadi Badan Sertifikasi Benih atau apakah nanti kita sepakati yang kita menambah fungsi dari badan yang ingin diambil itu, sehingga Litbang kita, BPTP kita tidak kehilangan kepala. Nah terkait dengan itu Pak, saya kembali lagi mohon maaf Pak Menteri saya tagih janji Bapak ini soal kedelai. Nah kedelai itu Bapak janji 2 kali masa tanam bisa meningkatkan produksi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan impor kedelai ini.

Saya kasih tahu Bapak di BPTP NTB, ada 1800 ton benih yang mereka menunggu program Pemerintah agar bisa dipakai benihnya. Ini saya mengatakan bahwa BPTP kita bekerja, BPTP kita itu menghasilkan benih-benih unggul. Mereka Pak kemarin ngomong ke saya, tolong dikasih tahu Pak ada stok bibit kita. Kami menunggu mudah-mudahan ada program Pemerintah yang mau pakai bibit kita. Benih unggul Baintan, varietas unggul ya, ubi varietas unggul Balitbang 1800 kalau enggak salah saya atau 1080 ton.

Nah yang berikutnya adalah soal kebijakan impor ini Pak, cabai Pak, singkong, ya semuanya pangan kita ini. Nah saya ingin melihat komitmen Pak Menteri, sampaikan komitmen di kita bahwa dari sisi produksi kita tidak punya masalah sehingga kalau ada impor kita bisa bertanggungjawab kepada rakyat dan negara, kita terhadap petani kita bahwa ada Kementerian lain yang bermain-main dengan impor ini. Ngomong kasih tahu kita disini jujur kita back-up Bapak, bahwa secara produksi kami siap memenuhi kebutuhan nasional cabai, kami siap memenuhi kebutuhan singkong, kami siap memenuhi kebutuhan pangan-pangan rakyat ini dengan dukungan anggaran sekian. Biar jelas.

Berikutnya Pak soal, ini baru kita selesai Reses semua. Saya mungkin mohon maaf terakhir ini Pak. Soal harga gabah. Harga gabah ditingkat petani Pak, Dapil saya 5 Kabupaten. Semua tempat keluhannya sama. Harganya dibawah HPP Pak, 3400, 3800, bahkan pernah dibawah 3000. Dan ini terjadi ketika masyarakat panen. Pak tolong berikan kami penjelasan tentang ini, kira-kira Kementan mampu tidak menjaga stabilitas harga gabah ini, atau bagaimana strategi Pak Menteri itu agar harga gabah yang anjlok ini. Pak, saya kemarin datang ke gudang salah satu rakyat itu, dia sudah invest gabah ada disitu nilainya sekitar 3 Miliarlah itu ukuran pedagang-pedagang kampung itu kan besar Pak, itu dia tidak bisa jual, BULOG tidak bisa menyerap. Saya konfirmasi ke Bulog, semua gudang BULOG di Indonesia penuh. Berarti kan dari sisi produksi hebat Pak tetapi kemudian ada impor ini semakin menyakinkan kita. Jadi sekali lagi untuk 2022 nanti saya berharap kami mendapat gambaran, mungkin belum kita bicarakan detailnya pada saat ini tapi saya ingin mendapat semacam grand desain dari Pak Menteri itu dari sisi

produksi kita mampu mencukupi kebutuhan negeri kita. Fokuskan kesitu saja. Kalau ada program-program besar proyek-proyek fisik yang besar itu tunda saja dulu Pak refocusing itu. Prinsipnya harus massif program-program pertanian itu kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan petani.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas kecerdasannya dari Pak Johan.

Ya memang problem kita itu begitu petani itu, kalau petani panen harganya pasti murah, panen singkong murah, panen padi murah, kadang panen jagung juga murah. Tapi begitu barangnya sudah tidak ada di petani pasti jadi mahal, dan ini negeri ini kan 2 kelompok. Satu kelompok yang senang menanam, pengen produksi meningkat, doanya setiap hari kepada Allah agar produksinya melimpah, ada satu kelompok lagi adalah berdoa agar produksinya rendah. Karena yang yang berdoa produksi rendah ini bisa impor, kalau bisa impor kan dapat *fee impor*, itu konon kabarnya begitu. Nah sekarang dengan Badan Pangan Nasional terbentuk mudah-mudahan kewenangannya ada disitu, dan mudah-mudahan jadi mitra kerja Komisi IV sehingga kita bisa mengendalikan tapi jangan sampai juga jadi mitra kerja Komisi lain. Repot lagi.

Selanjutnya agar tidak repot karena Pak Ono ini kerjanya sangat banyak, aktivitasnya tinggi, dipersilakan.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang saya hormati Pak Menteri dan beserta seluruh jajaran,

Ijinkan saya menyampaikan secara resmi dari PDI-Perjuangan. Yang pertama terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri ada istilah program prioritas, ada prioritas nasional, dan juga kita kenal saat ini ada pemulihan ekonomi nasional, yang tentunya dari apa yang disampaikan Pak Menteri dengan langkah-langkah yang akan dilakukan narasinya ya tidak ada yang istimewa menurut saya. Narasinya seperti biasa terkait dengan ketersediaan, akses, konsumsi, program nilai tambah dan lainnya. Tapi ada satu yang paling penting menurut saya, terkait dengan pandemi ini walaupun banyak pihak mengatakan bahwa sektor pertanian walaupun terjadi kontraksi tapi tidak sebesar sektor lainnya tapi kenyataannya petani-petani kita juga mengalami bagaimana penurunan pendapatan, karena pada akhirnya tingkat konsumsi masyarakat juga menurun karena pandemi ini karena memang pendapatannya juga menurun. Sehingga mohon dijelaskan secara rinci Pak, terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional yang sifatnya jangka pendek yang akan berhubungan dengan peningkatan pendapatan atau kesejahteraan petani. Tadi disinggung juga oleh Pak Dedi. Itu yang pertama.

Nah yang kedua, bahwa kami menilai program kegiatan di Kementerian Pertanian harus bersifat masif atau massal. Volumennya besar dan berdampak secara nasional. Oleh karena itu kegiatan yang volumenya kecil-kecil bersifat kegiatan proyek Direktorat yang diarahkan, yang sifatnya kecil tadi untuk dihilangkan dan difokuskan pada kegiatan strategis yang berdampak nasional tadi. Selama ini program masih mencakup ratusan kegiatan tersekat-sekat, per Dirjen, Badan Direktorat, sehingga kita berharap kami berharap kedepan program harus fokus pada sasaran strategis, dan terpadu antar Dirjen serta berdampak nasional.

Yang ketiga, tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi IV, ini terkait dengan banyaknya jenis kegiatan dimana berimplikasi semua staf sibuk ke Daerah untuk menyerap anggaran, menghabiskan anggaran, sehingga pembinaan dan pelayanan petani menjadi terabaikan. Semua sibuk bagaimana serapan anggaran itu maksimal, sibuk administrasi. Nah sehingga kondisi ini mengakibatkan terlalu banyak kegiatan yang akan mengakibatkan bahwa program-program itu banyak yang gagal, maka Tahun Anggaran 2022 harus benar-benar fokus dan terpadu antara Eselon I.

Selanjutnya Pak terkait dengan impor beras, sebagaimana yang kita tahu di awal tahun ada kebijakan dari Kementerian Perdagangan untuk impor beras 1 juta ton, dan itu pun menjadi polemik dimana terjadi perdebatan, dan pada saat itu juga Komisi IV menolak impor beras tersebut berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa prognosis produksi padi mencukupi sampai dengan Juli 2021. Tapi sekarang Pak Menteri ada laporan dari BPS, dimana realisasi impor beras secara akumulasi dari bulan Januari sampai Juli ini sudah mencapai 242,9 ribu ton, senilai 110,2 juta US\$, ini BPS sehingga mohonlah penjelasan seperti apa kenyataan yang terjadi, apakah memang produksi yang kita rencanakan yang disampaikan oleh Pak Menteri pada akhirnya tidak bisa juga membendung impor beras yang sampai sebesar itu walaupun ini lebih kecil dibandingkan Januari sampai Juli tahun kemarin. Nah sehingga mohon penjelasan secara rinci.

Yang terakhir Pak Menteri, selain Badan Riset dan Inovasi Nasional, ada juga saat ini Badan Pangan Nasional. Menurut saya coba dikaji lebih mendalam. Kalau tadi terkait dengan BRIN, tadi Pak Menteri sudah menyampaikan tapi sudah ada kewenangan-kewenangan dari Kementerian Pertanian yang nanti akan juga beralih ke Badan Pangan Nasional. Mohon untuk dilakukan kajian kewenangan-kewenangan apa saja yang bisa diambil alih oleh 2 Badan baru tersebut.

Itu saja Pak Menteri.

Sekali lagi terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'allaikumsalam.

Terima kasih.

Pak Ono ini wilayahnya wilayah pertanian dan wilayah pertanian. Jadi sangat kuat dua-duanya.

Nah selanjutnya Pak Suhardi Duka.

Dipersilakan.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua,

Anggota Dewan yang terhormat,

Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Sekjen bersama dengan jajaran Eselon I,

Yang pertama Tahun Anggaran 2020, ada 2 yang ingin saya apresiasi. Yang pertama adalah audit BPK, 5 kali berturut-turut dengan Wajar Tanpa Pengecualian. Saya kira ini kita perlu apresiasi.

Yang kedua, pendapatan penerimaan PNPB melampaui target 226,35% dicapai 999 Miliar lebih dari target 441 Miliar. Untuk itu saya kira target 2022 agar bisa lebih dari 1 Triliun. Saya sedikit kritisi yang pertama adalah masih SILPA sekitar kurang lebih 700 Miliar dari realisasi 95,5% walaupun realisasinya cukup tinggi tapi SILPA-nya juga cukup masih tinggi. Yang kedua, selama Tahun 2020 terhadap petani dirasakan kurang perlindungan saat panen. Saya kira juga teman-teman tadi menyampaikan bahwa saat panen harga turun, ini akibat terpaan impor yang begitu besar. Yang ketiga, sistem pengadaan terbuka, kurang terbuka selama Tahun ... (01.16.22) utamanya pada bibit kakao, kopi, dan banyak yang lainnya dan penangkar lokal tidak berdaya. Itu 2021. Realisasi 62,38% ini juga masih rendah. Bisa-bisa SiLPA lagi kalau tidak dipacu, tinggal berapa bulan. Bantuan Alsintan terima kasih sudah sampai sebagian petani, kelompok tani. Bantuan bibit jagung juga sebagian sudah tiba, tapi dibantuan bibit perkebunan itu belum sama sekali. Tentu ini juga akan bermasalah sama dengan 2022 kalau sistemnya tidak diatur dengan bagus.

Kemudian stok beras 2021 8,1 juta ton. Surplus kita pasti. Tapi data BPS lonjakan impor beras pada bulan Maret saja 2021 232%, dengan nilai 22,27 triliun. Ini siapa sebenarnya yang impor beras ini begitu besar. Disaat kita surplus dan pendekatan teori ekonomi mana saat kita punya banyak kemudian kita beli. Saya kira ini perlu menjadi kajian khusus Pak Menteri, dan ini yang menyebabkan melemahnya nilai tukar petani karena persoalan terpaan impor yang begitu besar ini. Pak Presiden dalam pidatonya jelas menginginkan kemandirian pangan, tapi kontradiktif dengan fakta laporan BPS impor masih begitu besar.

Selanjutnya Tahun 2021 juga ini ada peluang devisa yang begitu cukup terhadap ekspor sarang burung wallet. Tapi saat mulai bulan Juli kemarin ada hambatan terjadi penurunan dan bahkan Tiongkok untuk sementara menyetop impor wallet dari Indonesia. Ini akibat ulah dari perusahaan-perusahaan yang memasukan sarang burung wallet ke Tiongkok yang sudah melebihi daripada

kuotanya dan bahkan mengandung nitrit yang begitu tinggi tapi lolos di Badan Karantina karena katanya ada yang bekingin. Ini bahaya. Dari data atau laporan yang saya dapatkan bahwa anak-anak di Karantina sebenarnya sudah kuat tidak ingin meloloskan, tapi karena diintervensi dari atas akhirnya lolos. Jadi kalau ini dibiarkan saya kira tidak bagus, dan idealisme ASN yang ada di Badan Karantina akan drop dalam menjalankan tugasnya kalau di intervensi.

Saya bisa melihat bahwa ada beberapa perusahaan termasuk PT ... (01.19.55) ada 5 perusahaan yang saya tahu, dan ada suratnya dari Pemerintah Tiongkok hanya Bahasa China saya tidak baca. Jadi saya minta Pak Menteri, ini diberikan perhatian khusus dan saya minta jawaban khusus terhadap petani sarang burung wallet ini. Ribuan rumah wallet di Indonesia. Kalau ini tidak diberikan perhatian khusus ini akan menimbulkan pengangguran dan lain sebagainya, dan kita kehilangan devisa yang begitu besar.

Tahun 2022 pagu indikatif 14,45 triliun, kecil bila dibanding tahun sebelumnya. Olehnya itu Fraksi Partai Demokrat cukup atau turut mendorong untuk ada penambahan. Pidato Pak Presiden memberi penekanan terhadap masa depan Porang. Porang ini juga saya catat dalam Pidato Presiden didalam rancangan anggaran Tahun 2022 saya melihat Pak Dirjen TP tidak memberikan porsi khusus untuk pengadaan bibit porang. Saya minta supaya tanaman ini adalah tanaman yang bisa menghasilkan devisa kalau dikelola dengan baik, dan diberikan porsi daerah-daerah yang memang potensi untuk penanaman porang agar terjadi deversifikasi tanaman yang baik didaerah, dan bisa mendorong ekspor karena memang konsumsi dalam negeri untuk porang ini tidak terlalu besar, hanya peruntukannya untuk wilayah-wilayah tertentu.

Saya juga ingin mengkritik sedikit tentang rancangan anggaran di Dirjen BUN. Kawasan food estate 600 Miliar, ini perlu diperjelas, perlu didalami kepada siapa, dimana dan untuk apa karena ini anggaran cukup besar 600 Miliar.

Dirjen PSP, mesin dan alat pertanian untuk *Food Estate* 100 Miliar. 3 tahun berturut-turut Pak, saya khawatir di *Food Estate* itu bertumpuk mesin-mesin pertanian. Di lain sisi jalan usaha tani itu semakin dikurangi porsi anggarannya. Untuk Tahun Anggaran 2022 Komisi IV akan membahas dan tentu mendalami setiap mata anggaran bersama Eselon I, kemudian di lain sisi ada Perpres 66'2001 tentang Badan Pangan Nasional. Saya kira juga kita akan bahas lebih dalam bersama dengan atau yang disampaikan Pak Menteri tadi. BRIN (Badan Riset Nasional) yang akan menggabungkan semua Balitbang-Balitbang yang ada di Kementerian. Memang saya juga ada kekhawatiran akan terjadi stagnasi inovasi-inovasi pada Kementerian-Kementerian apabila ini dihilangkan.

Fraksi Partai Demokrat menerima penjelasan rancangan anggaran Tahun 2022, dan menerima laporan Tahun Anggaran 2020, serta dengan penekanan-penekanan yang telah kami sampaikan, dan akan terus mendorong Pemerintah agar tetap memberikan perlindungan kepada petani Indonesia dan dari serangan impor yang begitu besar sampai saat ini.

Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

*Wauallahumafiq Ila Aqwamith Thoriq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Pertama, Pak Menteri menyampaikan “Selamat Datang” pada pengantin baru kita, diruangan yang penuh kebahagiaan, dan saya melihat ada perbedaan wajah antara dulu sebelum menikah dan setelah menikah. Sebelum menikah walaupun bahagia ada tersimpan duka, walaupun Pak Suhardi sebentar lagi juga Suhardi Bahagia, dan setelah menikah kelihatan Pak mukanya tercerahkan karena seluruh pori-pori kulitnya sekarang aliran darahnya mengalir dengan baik. Selamat datang bahagia selamanya, doa dari kami semua.

Yang berikutnya, saya juga tadi bicara ke Pak Suhardi. Ini problem di kita ini kalau ada satu komoditi laku itu promosinya berlebihan. Karena promosi berlebihan maka orang Indonesia itu kata orang Sunda punya penyakit itu turut munding. Jadi selalu ngikutin. Porang ini baik. Jangan-jangan nanti semua orang tanam porang. Semua, ditempat saya ini sekarang mau nanam apa, porang-porang. Saya khawatir suatu saat ini komoditi porang itu kelebihan, hampir kelebihan enggak laku. Nanti komoditi lain yang dibabat itu jadi laku lagi karena kurang. Nah inilah yang berulang-ulang saya sampaikan perlunya Kementerian Pertanian dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Provinsi membuat peta produksi. Wilayah ini produksinya ini, wilayah ini produksinya ini apalagi sudah jaman google sekarang, jaman teknologi, digital, dan Kementerian Pertanian punya perangkat itu, agar apa? Agar kita punya keseimbangan komoditi. Jangankan barang ekspor, barang dalam negeri saja musim cabai mahal, semua nanam cabai, waktu itu cabainya murah. Nah ini harus segera harus dibenahi. Dan Pak Suhardi memang problem dari PNS atau ASN itu Pak, mereka itu rata-rata professional, idealism, Cuma rata-rata takut hilang jabatan dan tidak kuat terhadap tekanan. Nah itu bedanya. Kalau sudah ditekan sedikit ikut terhadap perintah. Beda dengan politisi, kalau politisi bisa pindah partai, kalau ... beda. Itu bedanya. Ini problem dari PNS ini. Ini problemnya, itu yang jadi problem. Karena pekerjaan PNS satu-satunya harapan dalam hidupnya. Kalau politisi kan banyak harapan dalam hidupnya.

Dan selanjutnya, nah ini kalau dari wajahnya ini bukan wajah petani tetapi selalu memperhatikan nasib petani. Kalau dari nama juga bukan nama petani, nama pengusaha ini tapi sangat berpihak kepada petani. Khususnya lebih mendekati seorang sastrawan, Pak Edward Tanur mewakili Fraksi Kebangkitan Bangsa, dan orang tidak akan menyangka kalau ini PKB.

F-PKB (EDWARD TANUR, S.H.):

Baik.

Terima kasih banyak Pak Dedi. Ini penyemangat.

Dari yang saya hormati Pimpinan, beserta Anggota Komisi IV, Bapak Menteri beserta jajaran BUMN yang hadir, singkatnya kita semua hari ini.

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bernafas hari ini, ya walaupun ada COVID tapi kita masih bisa bertahan. Jadi pertama yang harus saya sampaikan itu apresiasi kepada Kementerian Pertanian, karena kalau dilihat secara keseluruhan Kementerian Pertanian ini salah satu Kementerian yang bertahan, yang memberikan nilai positif dalam keadaan terpuruk, ekonominya terpuruk, seperti misalnya mendapat pengakuan WTP dari BPK, habis itu ada penghasilan non pajak. Oh PNBPN, itu bagus. Itu adalah hal-hal yang positif yang memberikan semangat. Jadi tidak semuanya kurang atau tidak semuanya jelek, ada baiknya misalnya program bantuan Alsintan ini luar biasa sekali. Bagi kami petani di NTT ini sangat berkat yang sangat berlimpah-limpah, karena dengan bantuan Alsintan ini terus terang meningkatkan produktivitas dari petani, terlepas mungkin dari pupuknya terlambat, apanya terlambat, ya sudahlah. Kita berusaha untuk menyesuaikan, karena semuanya ini kepastiannya adalah milik Allah saja. Jadi kita tidak usah berkecil hati, tetap semangat.

Hanya yang perlu saya koreksi satu lagi, mengenai PSP. Tadi saya lihat mengenai program jalan pertanian, irigasi, itu saya perlu sampaikan disini ditempat kami itu belum terealisasi. Semuanya sudah dimasukkan Cuma anggarannya belum turun. Tadi saya lihat 77% saya bilang dimana saja yang 77%, di kami masih 0% ini, dananya belum turun. Jadi tolong dikoreksi. Kami minta supaya dikoreksi, sehingga bisa mempercepat program-program itu. Mereka sudah siap semua. Dan juga ada satu program unggulan. Ini yang mungkin kedua kali saya ngomong, P2L itu ... (01.29.53) sekali. Itu memang program itu harus diteruskan. Sangat membantu masyarakat di desa, dan lagi program-program yang lain saya kira semuanya oke-oke saja, hanya kita perlu penyempurnaan. Ini yang saya rasakan, jadi saya tidak tahu orang lain rasakan yang lain ya terserah dia.

Dan juga mengenai program *Food Estate*. Ini sebenarnya program sebenarnya baik, tapi kita menilainya masih premature. Kan baru mulai berjalan, tapi kita harapkan kedepan agar program-program yang dirintis ini bisa memberikan manfaat, karena baru awal kita baru program food estate ini. Ini kan baru berjalan berapa bulan. Jadi butuh penyesuaian dan koreksi. Kalau tidak kita buat satu program baru jalan 2-3 bulan atau 4 bulan stop. Wah ini kita coba-coba sampai kapan baru bisa mendapatkan hasil yang baik.

Berikutnya tadi sudah disampaikan rekan saya Pak Suhardi mengenai sarang burung walis. Saya kira memang kita perlu, memang di satu sisi UMKM merasa kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar, tapi di satu sisi kita perlu kualitas dan mutu yang baik sehingga negara-negara tujuan itu tidak merasa dirugikan, orang mau beli dengan harga tinggi tentu butuh kualitas juga yang baik. Tapi okelah nanti kedepan mungkin dari Kementerian Pertanian bisa memfasilitasi sehingga UMKM tidak merasa ditinggalkan, dicari solusi yang terbaik.

Yang satu lagi mengenai ketersediaan pangan, memang pangan ini berkaitan erat dengan inovasi teknologi pertanian yang bagus, yang lebih maju. Jadi ketersediaan pangan ini perlu ditunjang. Saya senang bahwa akhir-akhir ini ada Bimtek, ada penyuluhan, ini memberikan semangat kepada petani-petani kita untuk belajar, mau mengubah pola pikirnya, dan mau mengubah pola kerjanya. Kalau hanya sebatas mengikuti zaman tempo dulu wah itu tidak bisa, harus ya itu Balai Litbang itu sangat penting. Ini adalah hal-hal yang positif bagi Kementerian Pertanian sehingga target kita yang pencapaian ekspor 3 kali lipat itu betul-betul bisa nyata. Jadi jangan ada Bahasa antara ada dan tiada, harus ada dan lihat, nyata. Harus ada dan nyata. Ini yang sering programnya ada tapi actionnya tidak ada. Nah ini mau bagaimana ini caranya. Jadi program dan action itu harus berjalan. Jadi kami dari Fraksi PKB sangat mengapresiasi bahwa dari Kementerian Pertanian lambat laun sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Kalau masalah ekspor-impor itu, itu masalah tinggal diklarifikasi saja dari BPS itu apakah data itu betul atau tidak. Di satu sisi kan Pak Menteri pernah rilis bahwa ekspor ke Arab. Di satu sisi dalam waktu yang bersamaan, BPS merilis ada impor sekian. Jadi siapa yang dusta diantara kita ini, atau yang ngawur diantara kita ini, ini kita cari tahu supaya jangan ada fitnah, jangan ada dusta diantara kita. Kami Komisi IV selalu memberikan support bagi kami ujung tombak dari pembangunan negara ini adalah sector pertanian. Jadi mudah-mudahan kedepan bisa ada perubahan yang lebih signifikan.

Terima kasih banyak.

Hanya ini yang bisa saya sampaikan.

Wassalamu'allaikum.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Edward.

Closing statementnya adalah jangan ada dusta diantara kita, dan kita tak akan pernah mendustaimu karena sudah nikah sekarang, jadi tidak ada lagi dusta.

Nah sekarang dari angkatan tua, sekarang ke angkatan muda. Neng Yessy dari Fraksi Nasional Demokrat.

F-NasDem (YESSY MELANIA, S.E.):

Terima kasih Pimpinan atas waktunya.

Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Menteri beserta jajaran, Eselon I juga Kementerian Pertanian, yang dari BUMN juga mungkin hari ini ada turut hadir, dan

Rekan-rekan Anggota Komisi IV semua yang saya hormati.

Pada kesempatan ini ijin saya mewakili dari Fraksi Partai NasDem untuk menyampaikan beberapa hal terkait rapat kita pada hari ini. Tentu yang pertama, kami menggarisbawahi, kami menghighlight dari paparan yang sudah

disampaikan dan dari bahan juga sudah dibagikan kepada Anggota, kami mengapresiasi setidaknya ada 3 sampai 4 point dari Kementerian Pertanian ini.

Yang pertama terkait laporan keuangan di Tahun 2020, dimana 2020 realisasi penyerapan anggarannya mencapai 95,61% dan ini sangat meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2019 yang hanya sekitar 88%. Nah ini suatu prestasi juga yang patut kami apresiasi. Kemudian juga dilengkapi dengan opini dari BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian selama 5 tahun berturut-turut. Ini juga sebuah prestasi yang kita tidak boleh tutup mata untuk tetap memberikan apresiasi ini kepada Kementerian Pertanian, dan tentu harapan kita kedepan akan terus, dipastikan akan terus juga dilihat kebermanfaatannya, keberpihakannya kepada petani, ini perlu dipertahankan. Kemudian kami juga perlu mengapresiasi terkait realisasi dari PNPB yang hampir, bukan lagi hampir bahkan sudah lebih 200% dari yang ditetapkan sekitar 400-an Miliar. Ini hampir 1 Triliun ini juga luar biasa saya pikir.

Dan yang terakhir terkait evaluasi tahun berjalan baik 2021, kami mengapresiasi terkait capaian ekspor di periode Januari- Juli yaitu tumbuh positif 8,72%. Dibandingkan dengan tahun lalu di periode yang sama, ini juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Dan kami juga membaca sekilas bahwa ekspor ini juga turut dibantu atau ditopang oleh komoditi seperti obat-obatan, aroma *therapy* dan rempah-rempah juga. Dan ini suatu terobosan juga dari Kementerian kita.

Kemudian tentu untuk memastikan keberpihakan kebermanfaatannya program-program dari pertanian. Kami dari Fraksi Nasdem juga memberikan beberapa catatan, beberapa penguatan mungkin yang bisa kita diskusikan bersama, kita olah bersama. Yang pertama terkait evaluasi realisasi anggaran di 2021 yang kami pikir juga masih relative rendah, ini sama seperti pandangan dari teman-teman yang terdahulu dari Fraksi lain baru sekitar 48% per Agustus ini. Nah kalau mengacu kepada ini tentu dengan outstanding kontraknya kurang lebih 62%, ini juga masih relative kecil dan ketika di breakdown kembali juga kami melihat bahwa Dirjen PKH kemudian perkebunan terkait PSP juga terkait realisasi UPO ini juga masih sangat rendah. Padahal kalau dilihat, PKH ini juga salah satu Dirjen yang semestinya bisa menjadi ujung tombak dalam pemberdayaan bagi petani bagi masyarakat Indonesia. Dimana realisasi bantuan dari sapi, kambing, ayam, dan lain-lain ini sangat tangguh oleh masyarakat kita di Dapil. Bahkan sekembali dari Reses juga saya dan teman-teman pasti ditanya terus sama kelompok-kelompok tani kapan nih sapinya datang, kapan nih kambingnya datang, dan seterusnya.

Kemudian yang berikutnya, kami juga menggarisbawahi terkait rencana pengembangan komoditi jagung dan kedelai. Nah tentu 2 komoditi ini adalah komoditi yang seksi saya pikir, jadi hampir menjadi pertanyaan, menjadi pembahasan, menjadi tanda tanya terus bagi Komisi IV bagaimana rencana kedepan karena mengingat komoditi jagung ini hampir 52.000 hektar dengan anggaran 97,2 Miliar dan mohon juga penjelasan terkait efektivitas program serupa yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, mengingat komoditas kedelai di Indonesia selalu menjadi persoalan.

Kemudian catatan kami yang ketiga, terkait di Dirjen Horti dan Karantina. Ini ada rencana terkait program digitalisasi kampung hortikultura. Nah ini kalau tidak salah saya di halaman 35 dan halaman 36, itu nampak sekali bahwa ada 3 nomenklatur mungkin disitu, digitalisasi kampung hortikultura dengan anggaran: 1. 2,5 Miliar, 2. 2 Miliar, dan 3. 2 Miliar juga. Dan kemudian di Badan Karantina Pertanian ini juga kami melihat ada 78 Miliar untuk 7 sistem informasi. Nah ini yang menjadi pertanyaan kami, apa nanti output yang dihasilkan dan kemudian siapa saja yang akan menerima manfaat dari sistem tersebut, dan mengapa ada berbagai sistem informasi yang terpisah. Mungkin kedepan kami menyarankan dari Kementan bisa lebih membangun sistem yang terintegrasi antara Dirjen atau Badan yang terkait.

Dan kemudian terkait isu-isu actual, tidak berbeda jauh tadi dari rekan-rekan, dari Bapak Ketua Dedi juga sudah menguatkan terkait komoditi porang. Porang ini kita mungkin boleh mengatakan bahwa masyarakat kita Indonesia ini cenderung "latah" mengikuti setiap trend. Sekarang ini kan lagi viral-viralnya tentang porang, Pernyataan Pak Jokowi, baik itu pernyataan Pak Mentan sendiri mengatakan bahwa porang ini salah satu komoditi unggulan kita kedepan, dan juga unggulan emas kita juga kedepan untuk ekspor komoditi porang. Nah melihat berita seperti itu Pak Mentan ini masyarakat kita di Dapil ini latah. Tidak tahu apakah secara struktur tanah, apakah tekstur DAS dan lain sebagainya itu cocok atau tidak semua ingin nanam porang. Bahkan kita Reses juga ada yang minta bibit porang, pengadaan bibit porang dan lain sebagainya. Nah ini mungkin betul perlu ada pemetaan wilayah, komoditi mana misalkan Kalimantan Barat mungkin horti cabai, yang lain porang, itu silakan. Jadi jelas nanti alurnya seperti apa. Dan kami juga meminta mungkin pendapat dari Kementerian terkait dari hulu sampai hilirnya industri porang ini, dan juga tata niaganya kedepan seperti apa, karena melihat ini memang potensi yang luar biasa. Jadi jangan sampai barang emasnya nanti menjadi barang rongsokan ketika tidak terakomodir tersistem dengan baik.

Dan yang terakhir terkait dengan *Food Estate*, memang ditengah fenomena, ditengah pro dan kontra yang terjadi kami dari Partai NasDem menyambut baik terkait. Pagi tadi kami menerima berita online bahwa dari IPB kalau tidak salah, akademisi dari IPB mengatakan bahwa *Food Estate* di Kalimantan Tengah itu sukses. Nah mungkin kami menyambut baik Bapak, dan juga bisa diberikan informasi, diberikan data kepada kami yang sukses itu seperti apa. Jadi supaya teman-teman yang lain, mungkin juga termasuk kami masih bertandanya di wilayah-wilayah *Food Estate* yang lainnya bisa menjadi contoh, bisa menjadi gambaran kedepan bahwa food estate ini fluktuatif, meskipun pro dan kontra tapi ada nilai plus juga, jadi bisa membantu petani-petani kita. Karena melihat, kalau dilihat dari sejumlah tolak ukur yang ada seperti realisasi luas tanam dan panen yang tinggi, meningkatnya produksi indeks pertanaman, dan produktivitas pelaksanaan *Food Estate* khususnya di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas di Kalimantan Tengah ini terbilang sukses. Nah mungkin kami meminta gambaran Pak Menteri bagaimana ini bisa dikatakan sukses supaya bisa sharinglah dengan Komisi IV terkait *Food Estate* ini.

Mungkin itu saja dari Fraksi NasDem. Lebih dan kurangnya mohon maaf.

Salam sehat untuk kita semuanya.
Selamat siang.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Ini barangkali takut saya lupa Pak Menteri, ini program pemeliharaan sapi oleh warga. Kalau sapiunya betina itu terlalu lama, karena mengandulkan itu untuk mendapat benefit itu waktunya terlalu lama, ada yang enggak beranak-anak walaupun disuntik berapa kali. Yang cepat itu, itu adalah program penggemukan. Di kasih bibit yang harganya 12, itu dalam setahun itu bisa dijual 30 itu 8 bulan. Bagaimana kalau kedepan itu match. Kalau match itu artinya begini, ada yang programnya yang beranak, ada juga didampingilah. Kalau 10 itu dualah yang buat penggemukan agar mereka dapat benefit juga cepat. Ini tidak semuanya itu. Jadi yang berkembang ada, yang penggemukan itu saran saja, keluhan dari para petani. Karena lama Pak katanya ini, ini saran saja.

Dan selanjutnya, selain ini ditindaklanjuti oleh ini Bupati yang sekarang lagi persiapan untuk bikin sarang wallet. Pak Hanan.

F-PG (Ir. HANAN A. ROZAK, M.S.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan, dan Anggota Komisi IV yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. baik yang hadir fisik maupun virtual.

Pak Menteri, Pak Sekjen, dan jajaran Eselon I lainnya yang kami hormati. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia yang hadir khususnya yang saya hormati.

Saya singkat-singkat saja. Yang pertama, saya ingin mendapat penjelasan lebih rinci lagi terkait dengan apa yang disajikan oleh Pak Menteri tadi terkait dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak Pak yang sangat luar biasa bisa 200% lebih peningkatannya. Ini mohon nanti bisa kami diberikan informasi rincinya, ini sumbernya darimana Pak, dari apa saja? Tadi Pimpinan Ketua Komisi IV dalam pengantar rapat sudah menjelaskan bagaimana mengulang-ulang terus memfungsikan BPTP-BPTP kita yang ada didaerah itu untuk bisa diberdayakan, difungsikan sebagai hasil sumber-sumber bibit. Nah ini apakah dari optimalisasi lahan-lahan atau aset-aset apa terkait dengan PNBPN ini. Ini mohon diurai disitu. Saya yakin kalau saran dari Pimpinan tadi ditindaklanjuti, ini mungkin bisa 300% ini Pak kalau ada sumber penghasilan dari bibit yang dihasilkan oleh BPTP. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, terkait dengan penilaian WTP 5 tahun berturut-turut ini, tentunya kita berikan apresiasi dan selamat kepada Pak Menteri. Namun Pak, ini saya melihat keberhasilan ini tidak terlepas dari keberhasilan dalam pengadministrasian dan pengelolaan asset. Oleh karena itu ini perlu

ditertibkan lagi kedepan, jangan sampai akibat pengelolaan asset yang ada dimiliki oleh Kementerian Pertanian, penilaian atau capaian WTP ini akan terganggu. Kuncinya di pengadmistrasian dan pengelolaan asset.

Selanjutnya terkait dengan program 2021 Pak yang sudah sampai bulan Agustus ini baru mencapai 48,35%. Ini kami mohon mendapat informasi yang lebih rinci lagi, jangan hanya diinformasikan Dirjen ini hanya sekian persen, tolong ini kegiatan apa ini Pak yang menghambat ini, apakah dalam pengadaan, atau dalam apa ini yang mengakibatkan terhambatnya kegiatan ini sehingga capaian di bulan Agustus baru mencapai dibawah 50%.

Pak Menteri yang saya hormati,

Berikutnya terkait dengan program-program di 2022. Saya juga sempat diberi masukan oleh Pak Ketua, di program ketersediaan akses dan konsumsi pangan yang berkualitas. Disitu tidak ada, disitu hanya ada tanaman pangan, PKH, PSP, PKP, dan Barantan. Tidak ada Dirjen Perkebunan Pak, padahal Dirjen Perkebunan ini salah satunya sumber pangan juga, gula, kopi itu pangan juga, teh pangan juga, kemudian minyak sawit. Nah ini kenapa ini Pak tidak diakomodir didalam program ini untuk Eselon I unit Eselon I Perkebunan. Ini saya kira perlu diperhatikan kalau masih memungkinkan ditinjau lagi terkait dengan penganggaran dan sebagainya untuk di Dirjen Perkebunan.

Untuk dimaklumi persoalan-persoalan perkebunan Pak Menteri, kita semua memahami adalah terkait dengan kondisi pertanaman. Kalau sawit saya kira sudah ada program untuk peremajaan dengan dana sawit. Nah sedangkan karet, kopi, dan sebagainya, lada, ini perlu di intervensi dengan APBN. Nah saya kira kedepan ini mohon mendapat perhatian.

Berikutnya terkait dengan sasaran-sasaran kerja Pak. Kementerian Pertanian targetnya adalah bagaimana mencapai target terkait dari sisi kepentingan Pak, kepentingan Pemerintah tentunya. Karena Kementerian Pertanian ini adalah perpanjangan tangan Pemerintah. Tapi dari sisi petani kita jarang bicarakan, produksi terus, target 55 juta ton. Untuk mencapai 55 juta ton itu dengan strategi peningkatan produktivitas atau perluasan areal seperti itu, intervensi-intervensi dalam bentuk program-program yang sudah dilaksanakan selama ini. Namun sisi petani, ini yang belum mendapatkan perhatian yang serius. Pertanyaan saya seperti itu Pak, seorang petani yang punya 1 hektar apa pun yang. 1 hektar sawah maksud saya, apa pun yang kita kerjakan, kebijakan apapun yang diberikan kepada petani yang tetap saja pendapatannya yang 6 ton itu Pak, antara 6 ton sampai 7 ton, mau dikasih apa saja segitu Pak. Nah sekarang ini perlu dipikirkan kedepan peningkatan pendapatannya Pak, sumber pendapatan lain tentunya. Nah oleh karena itu program-program yang terkait dengan diluar usaha pokoknya ini perlu mendapat perhatian dan perlu disebarluaskan atau ditingkatkan, diperluas. Contoh Pak, adanya bantuan ternak, karena ternak ini tidak berbasis lahan, siapa pun petani bisa melaksanakan budidaya ternak. Nah ini perlu. Kemudian tanaman pekarangan. Saya sangat sependapat. Pekarangan lestari, ini perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pendapatan Pak. Kalau dari usaha pokoknya, dari sawahnya, dari kebunnya segitu saja apalagi dia berhadapan dengan

masalah harga. Harga ini sekarang ini Pak ... (01.50.51) atau karet, sawit, ubi kayu Alhamdulillah ini Pak Menteri ditingkat petani ini sudah lumayan ya. Karet sudah diatas 9000, sawit diatas 2500 sekian, kemudian jagung sudah 5500, ubi kayu sudah diatas 1000. Jadi ini tidak menjadi masalah lagi untuk saat ini. Nah ini cabai Pak. Kita sekarang mengembangkan cabai Pak, cabai 5000. Ini bahaya. Idealnya cabai itu minimal 20.000, ini bagaimana caranya saya kira ini terkait dengan sebaran produksi. Jadi perlu ada kebijakan-kebijakan pengaturan ini, untuk diatur si petani tentunya harus di intervensi. Kalau dia tidak tanam cabai pada bulan ini misalnya kita intervensi dengan apa, seperti itu. Nah saya kira ini perlu mendapat perhatian.

Kemudian juga masalah kedelai Pak untuk yang akan datang. Kedelai ini tolong dari Kementerian Pertanian tadi saya sependapat untuk penelitian-penelitian kalau bisa hal-hal yang sangat spesifik terkait dengan pertanian tetap dipertanian. Cari bibit kedelai yang benar-benar cocok untuk kondisi negara kita ini daerah tropic. Selama ini produksi kedelai mohon maaf Pak, yang paling intensif dari seluruh tanaman ini kedelai. Begitu ditanam benih itu dilahan, disampingnya harus sudah ada pestisida, kemudian dia tumbuh nanti ada. Pertama ada alat bibit dalam waktu seminggu, kemudian ada penggerak batang, penggerek polong, dan seterusnya. Kapan untungnya nih nanam kedelai. Karena apa, benihnya ini tidak tahan untuk kondisi-kondisi iklim kita, cari, penelitiannya mencari bibit ini, benih ini, benih kedelai yang cocok untuk kita yang benar-benar bisa menghasilkan produksi ya kalau bisa diatas 2 ton Pak, ini 1 ton saja susah. Kita paksakan petani nanam kedelai, tapi itu hasilnya dibawah 1 ton. Kalau ada yang lapor diatas 1,5 ton ya itu mungkin diukur dari skala ubinan mungkin, tapi kalau penempatan dilapangan tidak, jarang kita yang mendapatkan diatas 1 ton.

Kemudian Pak Menteri, saya menyoroti juga terkait koordinasi lintas Kementerian. Kementerian Pertanian tidak bisa berdiri sendiri, kalau sudah urusan sawah ya pasti dengan Kementerian PU dalam hal ini Dirjen Pengairan. Nah ini ada laporan dari lapangan ini Pak. Di Dapil saya di Tulang Bawang Barat itu ada namanya daerah irigasi way rarem. Panjang primer yang direhab itu 25 kilometer. 1 tahun itu hanya bisa direhab 2 kilometer paling banyak. Sudah 3 musim tanam Pak Menteri. 3 musim gadu tidak bisa tanam, kalau rendengan dia 9000 hektar, kalau gadu dia 6000 hektar. Kalau 3 musim tanam 3 kali 6 sudah 18 ribu x 5 ton kehilangan kesempatan kita memproduksi 90.000 ton selama 3 musim tanam gadu. Nah ini ada permohonan dari masyarakat tani Pak Menteri mungkin bisa dikoordinasikan dengan Kementerian PU. Coba kalau seandainya tidak bisa sekaligus direhab itu saluran primernya nah tolong ada giliran, tahun ini direhab, tahun depan tidak. Sehingga pada saat tidak di rehab dia bisa 2 kali tanam. Kemudian pada tahunnya depannya dia cukup pada saat direhab dia satu kali tanam karena dimusim gadu itu dikeringkan. Ini yang rehabilitasi. Ada juga yang pembangunan bendungan baru Pak, bendungan sekampung. Akibat pengisian bendungan ini, ada potensi padi yang saat ini sedang ada dilapangan terpaksa kering Pak, tidak dapat air karena ditutup salurannya untuk mengisi bendungan yang baru itu Sekampung itu karena mau diresmikan katanya, dipercepat pengisiannya. Petani hanya minta digeser sebulan saja, nutupnya sebulan dulu jangan ditutup saat ini, digeser 1 bulan untuk memberikan kesempatan kepada tanaman-tanaman

yang puluhan ribu hektar padi saat ini dilapangan yang terancam kekeringan Pak. Memang ada Rapat Koordinasi yang saya pantau, salah satunya adalah disediakan, disiapkan asuransi katanya kan tapi kerugian petani sudah jelas-jelas yang hanya digeser sebulan saja, bila perlu peresmiannya digeser 1 bulan untuk menyelamatkan potensi produksi yang sangat luar biasa itu. Jadi memang kita orientasinya berpikirnya hanya produksi terus, sementara tadi saya kembali ke pendapatan petani ini kedepannya saya kira perlu kita perhatikan, mendapat intervensi-intervensi program dalam rangka peningkatan pendapatan petani.

Demikian.

Saya akhiri,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pimpinan ijin menambahkan apa dikatakan oleh Pak Hanan. Jadi dengan akan diresmikannya waduk itu, mohon maaf ini Pejabat Kementerian PU itu cari muka, supaya apa? Supaya cepat terisi jadi Presiden bisa datang tapi dia tidak memikirkan tanaman yang sedang berlangsung, begitu airnya kurang, tanamannya mati, apakah semua petani terasuransi, kan tidak juga. Ini loh. Saya minta Menteri setelah rapat ini telapon PUPR khususnya Dirjen Sumber Daya Air pendinglah dulu, 3 minggu atau sebulan kan enggak mati juga kalau dipending. Itu saja.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Memang urusan irigasi ini urusan lucu. Kita ngomong produksi tapi tidak bisa usulin jaringan irigasi. Itu luculah. Kedepan mudah-mudahanlah ada perubahan sehingga jaringan irigasi itu di Kementerian Pertanian bidang sarana dan prasarana.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ijin Pimpinan, saya menyampaikan. Beberapa tahun lalu, periode lalu, itu ada bukan di Kementerian PU namanya Hilman Dirjen Sumber Daya Air, adanya di Kementerian Pertanian tapi kok tiba-tiba pindah. Jadi tidak nyambung. Jadi satu sisi orang bikin bendungan disini, sedangkan sawahnya disini alirannya irigasinya. Betul kan Pak Kadi, Pak Kadi kan sudah lama. Betul namanya Hilman?

Ya sudah itu saja.

KETUA RAPAT:

Nanti kita pindahkan lagi Pak Ketua, mohon Pak Ketua lobi Ibu Mega untuk dipindahkan lagi kesini.

Terima kasih.

Selanjutnya ini yang terakhir dari Fraksi, kita ingin dengar suara lembutnya Bu Ema Ummiyatul.
Silakan.

F-PPP (EMA UMIYATUL CHUSNAH):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Bapak Menteri Pertanian beserta jajaran, Bapak Dirjen yang hadir, Pimpinan Komisi IV dan Bapak/Ibu Anggota Komisi IV yang kami hormati,

Ada 3 hal yang ingin saya tanyakan, yang pertama kami ucapkan terima kasih karena dapat salam dari Bapak-Bapak petani Kabupaten Jombang karena kemarin kami sudah melaksanakan panen, pelaksanaan program denfarm padi khusus dan spesifik yaitu varietas *interim nutrition ...* (01.58.46), inpari 32, 42 dan 45. Alhamdulillah bisa berhasil dengan baik dengan hasil yang memuaskan. Program ini adalah program percontohan pertanian modern. Untuk kedepan kami berharap program ini terus ditingkatkan dan ada didaera-daerah yang mungkin lahannya bisa diperluas. Hanya masukan saja Pak Menteri, ada varietas inparing nutrizing yang memang varietas ini untuk pencegahan stunting yang baik dikonsumsi oleh Ibu hamil dan anak-anak, dan juga ada ... (01.59.23) merah pulen. Nah ini untuk masukan saja, untuk program denfarm kedepan untuk menggunakan pupuk organik mulai awal sampai akhir ini menggunakan pupuk organik sehingga hasil padi yang dihasilkan benar-benar sehat untuk dikonsumsi, khususnya inparing nutrijing yang bagus untuk pencegahan stunting. Mohon ini diperhatikan karena untuk pencegahan stunting jadi kami mohon untuk bisa pupuknya organik.

Yang kedua, kami menanyakan dan mohon klarifikasi kepada Dirjen PKH terkait bantuan ternak yaitu ayam. Info yang saya terima beberapa waktu yang lalu, bantuan DOC atau anak ayam ini beserta pakannya, tapi kenyataan dan realisasi dilapangan hanya mendapatkan DOC-nya saja tidak mendapatkan pakan. Hal ini menjadi permasalahan dilapangan karena ada beberapa calon penerima bantuan ini mengundurkan diri karena keberatan untuk pengadaan pakannya. Mohon penjelasan dan solusi yang terbaik bagaimana bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama untuk calon-calon peternak ayam.

Yang terakhir, terkait dengan program pengembangan pangan alternative salah satunya sorgum, yang tadi sudah disampaikan Pak Menteri terkait dengan Tahun 2022, didaerah sudah mulai berkembang. Petani sudah ada perkembangan yang signifikan untuk menanam sorgum. Mohon kedepan petani sorgum lebih diperhatikan, difasilitasi dengan anggaran yang sudah direncanakan pada Tahun 2022 nanti.

Yang terakhir program P2L. Program P2L kami menerima 40 kelompok, 6 kelompok Alhamdulillah sudah proses pencairan tapi Pak Menteri yang 34 kelompok ini masih menunggu SK dari Provinsi sampai sekarang belum ada

kejelasan. Mohon karena untuk penyerapan anggaran supaya ini segera direalisasikan karena sudah ditunggu oleh kelompok.

Terima kasih. Itu yang kami sampaikan.

*Wauallahumafiq Ila Aqwamith Thoriq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'allaikumsalam.

Terima kasih.

Seluruh pandangan Fraksi-Fraksi sudah disampaikan, dengan 2 catatan penting Pak Menteri. Catatan penting yang pertama, dulu kita kehilangan sumber daya air, sehingga sering kali tidak terjadi sinkronnya antara belanja di sumber daya air dengan kebutuhan air di lingkungan Kementerian Pertanian. Yang kedua, kita kehilangan lagi geser lagi Badan Riset Jangan sampai ada bencana baru lagi yaitu program produk dari Badan Riset tidak nyambung lagi dengan kebutuhan para petani di Kementerian Pertanian. 2 catatan penting ini tidak boleh jadi bencana bagi dunia pertanian Indonesia, harus jadi solusinya. Solusinya apa, termasuk barangkali pembiayaan. Kita kan juga enggak tahu, kalau ditempat orang lain pembiayaannya masih dicukupi atau tidak, dianggap prioritas atau tidak. Itu yang penting, dianggap prioritas atau tidak. Ini yang harus menjadi catatan penting kita, dan seluruh catatan penting itu akan disampaikan dalam pendalaman.

Yang pertama Bu Ketua, dipersilakan.

F-PKB (ANGGIA ERMA RINA, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Baik.

Terima kasih.

Pak Menteri dan Bapak/Ibu sekalian,

Menyambung dari Kang Dedi tadi tentang Sumber Daya Air dan kemudian mungkin yang sekarang dibahas adalah tentang Badan Riset dan Teknologi. Saya setuju di kaji ulang karena khawatirnya seperti yang terjadi dalam kasus air tadi, dulu bisa. Karena kalau air ini saya sendiri sudah melihat dari mata kepala saya sendiri Pak Menteri di Kalimantan, yang diharapkan di perairannya disebelah sini tetapi dibangun oleh PUPR disebelah yang tidak, ditempat yang tidak seharusnya yang langsung bisa diakses oleh para petani. Begitu juga kasus misalnya untuk pemberhentian ini. Usulan dari Pak Menteri misalnya itu menjadi salah satu solusi tetapi mohon untuk dikaji lebih dalam lagi misalnya kalau Badan Riset ya, BRIN ini mungkin bisa mengadakan penelitian-penelitian yang dasar, pengembangannya nanti dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Karena kita lihat ego sektoral itu kan luar biasa, dimana arahnya yang satu kemana, yang satu kemana. Jadi ini harus menjadiantisipasi supaya tidak muspro juga kebijakannya. Muspro itu Bahasa Indonesianya apa ya, sia-sia (saya nanyanya ke Pak Mindo). Siapa tahu Pak Menteri tidak tahu Muspro itu, Bahasa Jawa itu (Neng Ema tahu). Jadi ini serius

Pak Menteri, mohon untuk benar diperhatikan dan bagaimana caranya kalau Komisi IV ya kita bareng-barenglah, tidak juga menginginkan bahwa semuanya dibawa lalu kemudian tidak nyambung antara yang dihasilkan pengembangan, apalagi tadi awal rapat juga Pak Ketua juga sudah mengarahkan bagaimana kita konsentrasi pada pengembangan benih-benih unggul yang sudah dihasilkan oleh teman-teman. Itu pertama.

Lalu yang kedua tentang porang Pak. Porang kemarin waktu Pidato Presiden diangkat. Lalu kemudian ekspektasinya seperti apa, dan sekarang hasil porang ini harganya turun Pak ya. Nah ini ada analisisnya apa nih yang bisa diklarifikasi atau dijelaskan kepada kami di Komisi IV supaya kita juga tahu nih ada apa dengan porang, karena kita lagi gencar, lagi senang, lagi membudidayakan tapi ternyata kok dilapangan hasilnya harganya turun, kira-kira itu seperti apa.

Yang terakhir Pak, saya nyambung dengan yang saya sampaikan di awal tentang, tadi juga disinggung oleh Neng Ema tentang padi untuk stunting. Saya tidak akan berhenti karena sampai hari ini kasusnya terus naik stunting ini, dan itu untuk generasi kita, penting yang diperhatikan makanya ini nyambung sekali dengan tadi yang saya sampaikan di point pertama. Itu juga sudah menjadi kesimpulan rapat kita di beberapa, tidak hanya 1-2. Rapat terakhir dengan Bapak itu juga termasuk termasuk ikut di dalamnya.

Saya pikir itu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih.

Dan pendalaman yang pertama dipersilakan, Pak Mindo.

Silakan.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Terima kasih.

Ini ada kata-kata lagu “sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia”, kan begitu. Saya mau menyambung 1 hal dulu, Porang. Sebelum saya bicara porang ini saya mengingatkan kita kembali pada akhir '70, awal '80-an. Mulai dari Pak Presiden, Menteri, Kepala Daerah. Waktu itu Pak Dedi belum menjadi Kepala Daerah, menyarankan semua tanam cengkeh. Surplus sekali harga jatuh. Ada saran kalau enggak salah waktu ada seorang cendikia, potong saja tebang cengkehnya supaya antara *supply and demand* itulah yang dilakukan, kan kasihan rakyat kalau gitu ya. Ini mau saya ikatkan ke porang. Porang ini pernah harganya 16.000 Pak Menteri umbinya, sekarang rakyat tawarkan 5500 di Lampung ada mantan Bupati disana 2 kali, sekarang Anggota DPR RI enggak laku juga. Jadi terkait dengan porang ini akses terhadap kemana dijual itu harus dibuka. Itu yang pertama.

Yang kedua, kita harus naikan posisi tawar petani. Sulawesi Selatan sudah pernah mengeksport Porang dalam jumlah tertentu. Kemarin Pak Menteri bersama Presiden meninjau pabrik di Daerah Pemilihan saya yang rencananya membuat beras analog berbasis porang, bagus, sangat bagus. Tetapi akan lebih bagus lagi, sekali lagi akan lebih bagus lagi kalau Kementerian Pertanian lewat Dirjen Pangan mendesiminasikan teknologi pengolahan umbi porang jadi makanan. Sehingga importir itu tidak bisa mengatur harga. Di tingkat usaha kecil dan menengah bisa membuat mie, bisa membuat daging nabati, bisa membuat kerupuk, dan sebagainya-dan sebagainya, diseminasikan teknologinya. Harus mengambil inisiatif dengan segera ke Menteri Pertanian untuk kerjasama dengan Universitas yang mempunyai jurusan pangan, tentu juga dengan BRIN tentunya (Badan Riset dan Inovasi Nasional) harus kerjasama dengan itu. Kalau tidak seperti itu Pak, anggaran sudah disebar-sebarkan membantu benih, over produksi, hanya bisa menjual maksimum ... (02.10.13) ya senang Pak industriawan menerima ... (02.10.17) karena dia tidak membeli air, post logistiknya murah. Jadi jual ... jangan sampai dianggap setengah jadi, keliru, ini tetap bahan dasar. Umbi dipotong-potong dikeringkan itu bukan bahan setengah jadi. Memang harus seperti itulah bisnisnya. Yang tidak diperlukan jangan ditransportasikan, jangan dibayar ongkos transportasinya, air tidak diperlukan makanya dikeringkan dilokal di petani itu. Jangan didefinisikan itu sebagai barang setengah jadi. Ya saya kira kalau tepung, jadi tepung oke, diseminasikan teknologinya, kerjasamalah. Itu Pak Menteri, porang masa depan bisa begitu itu.

Yang kedua, tentang pemupukan. Ke tahun depan ini harus evaluasi sungguh-sungguh. Ada pabrik pupuk disini ya. Pak Menteri ini bukan berasal dari pertanian, saya mau jelaskan. POG itu enggak pupuk Pak. Keliru Kementerian Pertanian selama ini. Kalau pupuk itu disebutkan Pupuk Organik Granul. Pupuk itu ada haranya, bisa ditrist. Hara makronya itu Nitrogen, Fosfat, Kalium, enggak bisa ditrist disitu banyak pun pelaksanaan campur tanah itu. Jadi ini tolong dievaluasi kedepan ini, karena kalau enggak salah 1 juta kilo kalau enggak salah bahan subsidiya. Sak triliun lebih itu subsidiya itu. Coba dievaluasi sungguh-sungguh ini. Nah kalau disebutkan POC (Pupuk Organik Cair) itu memang tidak bisa dkerjakan industri kecil, harus industri menengah. Karena itu butuh pengetahuan, bisa ditrist berapa kadar ininya, berapa mikro ... dan sebagainya, oke. Itu dipertimbangkan itu. Nah khusus untuk POG ini enggak boleh seperti selama ini petrokimia, Pupuk Indonesia perhatikan ini, dikuyah-kuyah, dikasih ke distributor belum tangtuh orang sunda bilang. Iya toh, belum tangtuh bahwa setiap tanah itu butuh bahan ini, beda-beda. Ya di Karawang dengan di Ciamis beda itu Kang Dedi, ya. Jadi jangan dikuyah-kuyah juga. Jadi saya mohon ini dievaluasi dalam perencanaan kedepan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pak Panggah.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Rekan-rekan Anggota, Pak Menteri dan jajarannya,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Saya ingin menyambung juga dari apa yang disampaikan teman-teman terdahulu. Jadi terkait dengan ekspor porang tadi. Kasus porang ini menunjukkan bahwa kita tidak ada pengawalan dan perencanaan yang baik Pak, sehingga memang selalu pola seperti itu di menanam atau ada potensi pasar yang besar, kemudian petani menanam akhirnya terjadi over supply dan harga jatuh. Itu kan alamiah sekali gitu loh. Polanya itu alamiah sekali. Sehingga kalau ada program merdeka ekspor, nah ini saya kira ini coba kita dalam Pak. Merdeka ekspor itu maknanya seperti apa. Ini jangan sampai hanya menjadi jargon saja, sementara persoalan-persoalan seperti porang itu terus berlanjut. Nah ini Pak, mungkin kami dari Komisi IV ini ingin mendalami ini, menarik sekali karena memang sector pertanian ini menjadi sector andalan, tidak hanya dalam menghasilkan devisa, tapi juga pemerataan di pedesaan, ini pentingnya Pak. Jadi mohon ini bisa dikonkritkan apa itu yang dimaksud dengan merdeka ekspor itu, kelihatannya kok bombastis sekali ya tapi ya jangan sampai tidak menyelesaikan masalah-masalah yang terus berulang. Nah ini kita ingin tahu seperti apa konkritnya dari konsep merdeka ekspor ini. Dan persoalan itu selalu ada terus, umumnya ya begitu pola tanam di sektor pertanian dengan pasar ini ya enggak nyambung Pak. Itu saja sebenarnya selalu dari generasi ke generasi sampai sekarang ya masih persoalannya seperti itu. Sehingga ini memang Komisi IV wajib mendukung terhadap program Merdeka Ekspor ini sehingga menyelesaikan masalah fundamental itu, bagaimana menyambungkan antara produksi dan pasar, apakah pasar dulu apa produksi dulu. Menurut saya pasar dulu nih yang perlu di explore ya. Pasar itu ada pasar dalam negeri. Pasar dalam negeri ini bisa ke industri makanan yang membutuhkan bahan baku dari sector pertanian, atau dibangun suatu industri nilai tambah seperti yang disampaikan Pak Mindo tadi, kalau perlu diolah menjadi industri hilir. Ini juga bisa membuat suatu pola produksi sendiri dalam skala yang IKM misalnya ini polanya seperti itu.

Nah ekspor, ekspor juga perlu di *anu* ini dengan Kementerian Perdagangan Pak. Kita tidak bisa berdiri sendiri ini. Di Kementerian Pertanian ini harus betul-betul satu program dengan Kementerian Perdagangan untuk mengidentifikasi pasar-pasar khususnya adalah pasar-pasar ekspor. Nah baru kemudian dibentuklah suatu manajemen daripada produksi dan stok, dan juga pemasaran. Ini harus dikawal betul, dipilih suatu komoditi apa, jangan semuanya dikembangkan, belum tentu bisa mendapatkan satu akses pasar yang membantu petani sehingga memang diprioritaskan saja, seperti mungkin di kampung tadi yang Pak Dirjen Hortikultura bikin kampung-kampung-kampung gitu kan. Nah ini mungkin salah satu tapi harus benar-benar Pak, jadi betul-betul menjadi suatu kawasan komoditi tertentu yang pasar recognize terhadap wilayah itu. Jadi kalau saya mau beli kentang itu mesti di wilayah mana, kalau saya beli bawang ya sudah di Brebes sudah ketahuan itu ya, tapi kalau mau beli durian dimana, nah itu harus ter-recognize oleh pasar. Itu saya kira yang bagus. Nah ini kita dukung saya kira ini ya, tapi kita ingin persisnya seperti apa, dan yang dilaporkan disini mengenai ekspor itu profilnya seperti apa, kita juga ingin tahu apakah ini bersifat insidental atau ini terprogram secara

berkelanjutan. Jangan-jangan memang seperti Pak Dedi sampaikan Pak Ketua ya, ini hanya kemurahan dari para petani bukan suatu by desain ya ekspor ini. Sehingga memang sifatnya insidental. Nah ini saya kira pencermatan terhadap hal-hal seperti ini kita perlu tahu Pak, dan kita dorong kita dukung dari Komisi IV agar betul-betul menjadi suatu perwujudan, suatu pola produksi dan pemasaran dan manajemen produksi tata niaga yang sehat sehingga betul-betul terwujud menjadi suatu kesatuan pasar produksi dan membantu petani-petani kecil dipedesaan.

Saya kira itu saja Pak yang bisa saya sampaikan.

Satu lagi terkait masalah realiasi anggaran, saya kira jangan kebut semalam. Itu biasanya diawal-awal Semester I itu rendah-rendah nanti di Oktober ini pengalaman, September itu ngebut. Nah itu nanti kualitas pekerjaannya akan sangat tidak sesuai khususnya kalau yang belanja modal ya pembangunan fisik, itu kalau dikebut dalam waktu singkat ya biasanya belepotan pekerjaannya. Ini apa-apa saja ini yang masih belum terwujud dari sisa anggaran yang saat ini baru sampai pekerjaannya 48% ini. Nanti jangan sampai ngebut dibelakang karena data dari kita di lapangan, di Dapil itu masih banyak yang belum turun seperti dari peremajaan, kopi, alat pasca panen, ini sudah direncanakan tapi sampai sekarang masih belum terealisasi, kemudian dari Horti misalnya, kampung buah ini konsepnya bagaimana ini Pak. Kita sudah siapkan itu wilayahnya, wilayah durian, wilayah kelengkeng, wilayah alpukat, tapi sampai saat ini belum ketahuan bagaimana realisasinya. Ini saya kira mungkin dari teman-teman yang lain juga masih ada yang masih belum terealisasi, dan perlu dipercepat realisasinya.

Saya kira demikian Pak Ketua yang kami sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'allaikumsalam.

Bu Endang masih pendalaman juga?

Silakan.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Pak Dedi mohon ijin ini saya kena tegur karena ada 10 point yang belum saya kemukakan sesuai dengan tulisan yang ada di.

KETUA RAPAT:

Ditegur oleh Pak Budi.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Jadi Pak Menteri yang saya hormati,

Perlu saya sampaikan bahwa ada beberapa point yang saya lupa tadi karena saya pikir sudah dikemukakan oleh teman-teman yaitu tentang realisasi kegiatan utama Kementan sampai 21 Agustus yang sangat rendah adalah pengembangan padi yang sebesar 52,95%. Nah mohon kendalanya yang dihadapi ini apa saja perlu dijelaskan.

Kemudian yang kedua rancangan pagu anggaran Kementan yang Tahun 2022 sebesar Rp14.451.740.428.000,00. Menurut Partai Gerindra anggaran ini sangat kecil bila kita melihat kontribusi riil sektor pertanian pada saat kondisi COVID-19. Nah jadi mohon ditingkatkan lagi terutama untuk petani perkebunan.

Kemudian yang berikutnya, Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan konkrit kepada Kementerian Pertanian terutama Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terkait dampak refocusing anggaran terhadap program yang berkaitan dengan bantuan masyarakat dimana Dinas Pertanian sudah mengeluarkan CPCL seperti kegiatan irigasi, namun di triwulan ke IV tiba-tiba terkena refocusing. Nah bagaimana hal ini dapat diatasi oleh Kementerian Pertanian.

Kemudian berikutnya, tentang anggaran Januari sampai dan Juni 2021 tentang porang Pak. Yang disini katanya ada 148.000 ton meningkat, 160% nah seperti tadi yang ditanyakan teman-teman, bagaimana Pak Menteri Pertanian dan jajaran khususnya Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk lebih serius mendorong sektor usaha produksi budidaya melalui peningkatan peran penyuluh dalam melakukan pendampingan pelatihan. Nah sehingga eksportir 5 besar di dunia ini bisa didukung.

Nah kemudian ramai diberitakan tentang harga ayam hidup yang hancur. Nah tadi saya sudah kemukakan bahwa sampai saya ikut menolong membantu para peternak-peternak kita. Kemudian Peraturan Presiden Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, yang mengamankan Badan Ketahanan Pangan Kementan. Mengamanatkan Pak. Berarti Badan Pangan Nasional ini tentu saja harus ada kaitannya dengan Badan Ketahanan Pangan, apakah itu artinya Badan Pangan Nasional tidak terbentuk tahun depan karena masih ada di Kementerian Pertanian, mohon penjelasannya.

Kemudian berikutnya Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Menteri Pertanian untuk mendorong segenap jajarannya agar usulannya DAK Tahun 2022 senilai 2,2 Triliun agar benar-benar dimanfaatkan untuk program DAK fisik dan non fisik sektor pertanian dan pangan, khususnya kegiatan-kegiatan strategis yang bersifat padat karya karena itu sangat potensial di masyarakat lokal.

Nah Fraksi Partai Gerindra juga meminta penjelasan program apa yang dikembangkan untuk 288 Kota-Kabupaten, dan dimana lokasi DAK fisiknya?

Nah kemudian tadi tentang Pertanian sudah saya kemukakan.

Yang berikutnya adalah program pengembangan kawasan perkebunan Tahun 2021 yang dikelola oleh Direktorat Perkebunan Kementerian Pertanian perlu dievaluasi lagi. Nah tadi sudah diceritakan oleh teman-teman bagaimana kesulitan menemukan CPCL-nya. Nah tentu saja sumbernya ini dari LKPP dan LHP sementara dari Kementerian Pertanian Semester II. Nah jadi kegiatan program ini semoga Pak Menteri bisa mengevaluasi lagi untuk tepat sasaran dan tepat guna.

Kemudian berikutnya tentang ketersediaan pangan di masa pemberlakuan PPKM, khususnya minggu ke-3 Agustus 2021, terbilang masih banyak yang belum terpenuhi sehingga mengalami kebutuhan stok pangan dalam hitungan ton dan masing-masing pangan pokok yang menjadi strategis nasional. Jadi hal ini seperti beras dan lain sebagainya masih membutuhkan kira-kira 585.371 ton. Jagung.

KETUA RAPAT:

Sudah 4 menit Bu.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Iya.

Jadi ini Pak, sebetulnya sudah saya tulis semuanya dan tadi sudah saya rangkum Cuma Pak Ketua kita ingin dibacakan point per point. Beliau katanya, Bu Endang selalu mengutamakan yang lain. Jadi mohon maaf mungkin itu, saya agak emosi tadi sehingga banyak sekali hal-hal yang tidak saya bacakan secara tertulis.

Yang kemudian nilai tukar petani Pak, (ya sudah lebih ini Pak). Nilai tukar petani mohon dievaluasi lagi karena turun 0,11%.

Dan yang terakhir terutama di Kalimantan Timur untuk perkebunan, perlu dievaluasi lagi.

Nah berikutnya dari Fraksi Gerindra, Pak Jokowi meminta agar generasi muda untuk terjun kedalam dunia pertanian. Oleh sebab itu Kementan harus membuat strategi, menyiapkan pendampingan (nantinya Pak daripada saya dimarahi nih Pak).

Yang berikutnya, telah lahir Peraturan Presiden Nomor 72 tentang Percepatan Penurunan Stunting namun di Perpres tidak melibatkan Kementerian Pertanian. Nah mohon penjelasannya.

Nah yang terakhir Pak, meminta kepada Kementerian Pertanian untuk meningkatkan bagi penyuluh karena beban kerja dan wilayah kerja yang luas. Disamping itu perlu ditingkatkan kegiatan Bimtek khususnya untuk penyuluh dalam rangka meningkatkan kualitas SDM.

Terima kasih Pak.

Mohon maaf Pak, saya orang tua kalau dimarahi jadi bingung Pak. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Eyang, tetap semangat. Kita sama eyang hormat. Itulah kalau geliat hati tak mampu menekan perintah institusi. Hatinya tadi bergelora kalau dengar cerita pangan, sejarah, FAO, Pak Harto, pendidikan Perancis, lupa terhadap perintah Pak Budi harusnya ngomong ini-ini. Kita kasih kesempatan biar Pak Budi bahagia, Bu Endang juga tambah panjang umurnya karena bahagia. Bu Endang ini tidak boleh oleh kita ini ditekan Pak karena harus. Jangankan Bu Endang, Mbak Luluk saja kan ditekan wah enggak bisa, sekarang bahagia. Ya sekarang Alhamdulillah, sekarang ditempat ini semua orang sudah bahagia di rumahnya masing-masing. Dan biasanya Pak Sutrisno ngomongnya virtual, tersistem, sekarang ngomong fisik, dan yang paling utama posisi duduknya berhadapan dengan Pak Ketua Komisi.

Ya dipersilakan.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri beserta jajaran,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Saya akan mensikapi dari fungsi anggaran ini Pimpinan, termasuk juga amanat, arahan Ketua DPR RI pada saat Pidato Pembukaan Sidang Penyampaian Nota Keuangan. Komisi IV ditugaskan untuk mengawasi dan menjaga ketersediaan pangan nasional. Untuk itu saya akan mensikapi data laporan keuangan Tahun 2020 dari laporan realisasi anggaran sebagai mantan Pejabat Daerah kalau mengkaji anggaran kan pasti pendapatan sama pengeluaran.

Saya mulai dari PNBPN. Tadi teman-teman sudah mengangkat naik sekian ratusan. Tapi sesungguhnya kenapa sampai naik seperti itu, karena target awalnya kalau kita bandingkan year on year di 2019 itu sudah meningkat 835 Miliar, tapi direncanakan di Tahun 2020 hanya 441 Miliar sehingga naiknya luar biasa. Kalau dihitung *year on year* naiknya hanya 19,6%. Saran saya, memenuhi amanat Pak Suhardi Duka agar tahun depan bisa diatas 1 Triliun, tolong rencana tahun depan itu bukan diturunkan berdasarkan realisasi Tahun 2020 saja sudah 999 Miliar.

Kemudian yang kedua di post belanja, bisa juga terkejut pada belanja pegawai. 2019 2,5 Triliun, tapi 2020 hanya menganggarkan 2,4 Triliun itu. Itu pun realisasinya hanya 2,2 triliun. Artinya apa, belanja pegawai sudah berubah menjadi belanja variabel. Kalau tetap menjadi biaya tetap tentunya sebabnya mungkin ada karena ada pengurangan kepegawaian, ada merumahkan pegawai karena kena COVID, atau banyak yang pensiun. Kalau itu yang terjadi akibatnya adalah produksi pangan akan terganggu. Mohon ini penjelasan karena ini belanja pegawai, belanja tetap mestinya.

Kemudian dari neraca Pak Sekjen, posisi tanah di 2019 7,6 triliun, tapi di Tahun 2020 itu menurun posisinya. Mohon maaf 76 triliun, menurun 71 triliun, apakah juga terjadi alih fungsi. Kalau itu terjadi alih fungsi itu artinya apa, ruang untuk meningkatkan produksi pangan akan terganggu. Ini mohon penjelasan, tanah yang mana ini turun dengan nilai 5 triliun dari 76 triliun menjadi 71 triliun pada Tahun 2020.

Kemudian yang kedua, realisasi APBN 2021 (ini outputnya ini). Yang bersentuhan dengan produksi pertanian ada 5 institusi. Semuanya realisasinya sampai dengan Agustus dibawah 50%, terendah itu kalau tidak salah di Ketahanan Pangan sama Hortikultura. Hanya 38 Dirjen PKH, 38,79 dan perkebunan 39,97%. Memang ada proses itu ada kontrak tapi kapan itu kontrak kita akan direalisasikan. Nah inilah penyebab tentunya dari sisi outcomenya. Lesunya hasil produksi pertanian kita, terjadi penurunan harga cabai, penurunan harga sayur mayur, tapi disisi lain sebagaimana disampaikan Pak Slamet pada waktu Paripurna kemarin, Pemerintah mengimpor barang-barang pangan kita, sebet saja impor cabai, impor singkong, impor gula, impor garam, bawang putih, daging, dan beras. Disisi lain terpuruknya harga produksi pangan kita, sebut saja ayam juga turun harganya, cabai juga begitu. Nah kalau barang-barang itu memang belum bisa sepenuhnya dibuat di negeri kita tercinta ini saya bisa memaklumi, tapi kalau cabai harus impor saya juga dari sisi mana itu logika berpikirnya. Nah oleh karena itu persoalan sangat mendasar yang terjadi ini adalah, karena tadi tata niaganya bagi petani belum ada sentuhan dari Kementerian. Mohon diperhatikan persoalan distribusinya.

Saya ingin menyikapi bawang putih Pak Menteri, saya sudah 2 kali ini. Kemarin virtual tahun yang lalu. Saya menemukan bawang putih, sekarang saya bicara langsung bawang putih. Sampai-sampai malam saya tugaskan TA saya Pak Pimpinan suruh nyabut bawang putih (nih bawang putihnya saya bawa). Saya sudah minta, sudah menjanjikan sama petaninya. Pak Dirjen Hortikultura tutup mata, permintaan Dinas yang tanpa menguji apakah ... (02.35.51) itu bisa, tidak bisa. Saya minta kepada Pejabatnya, tolong jangan ditindaklanjuti karena itu tidak akan mungkin jadi, yang ini sudah jadi. Ini turun temurun, minimal tolong dibimbing mereka supaya produksinya juga lebih meningkat. Ada Balitbang bisa mendampingi. Ini memang posisi lokasinya 600 meter di atas permukaan laut. Ini saya sendiri menanam nih Pak, ingin membuktikan sama Menteri Pertanian bahwa ada di Majalengka untuk tanam bawang dengan bagus. Ini kurang dari 3 bulan nih, kurang dari 3 bulan, ini 2,5 bulan sudah dicabut. Apakah posisi ini diabaikan? Minimal bisa untuk konsumsi masyarakat, dengan begitu akan mengurangi nilai impor kita.

Kemudian Pak Menteri, yang terakhir ini masalah pupuk. Pada saat kami berkunjung ke Indramayu saya membawa kelompok tani menyampaikan persoalan pupuk. Pengambilan pupuk Tahun 2020 kok oleh Dinas, oleh perwakilan dari Perusahaan Pupuk, oleh distributor dicatat bukukan di Tahun 2021. Persoalannya adalah petani tidak bisa mendapatkan hak mendapatkan pupuk di Tahun 2021. Masalah bukan hanya disitu, saya khawatir ada kerugian negara. Karena Tahun 2020 3,1 triliun ada tambahan subsidi. Kalau begitu pupuknya tidak dicairkan tapi bisa kemungkinan subsidiya dicairkan. Ini

mohon ditindaklanjuti itu, ini bukan hanya 1 tempat ini satu tempat terjadi, mungkin juga ditempat-ditempat yang lain.

Kemudian terkait pupuk, saya membaca bahwa di sawah kita sudah banyak unsur fosfat, unsur kalsium, yang mengejutkan saya adalah manakala ini berlebihan berakibat pada menurunnya produksi pertanian itu. Mohon di Tahun 2020 dianggarkan untuk dilakukan sosialisasi kepada para petani agar petani paham kondisi ini karena tiap-tiap tahun ditambah terus itu pupuknya, kita tidak tahu akibatnya. Bisa lewat Bimtek para Anggota Dewan, ini sangat penting. Bimtek ini sangat efektif Pak, ini pasti blusukan dan memang menghadirkan para petaninya.

Saya juga ada iri Pak Menteri, kalau permohonan anggaran dari Dinas segera direspon dengan tutup mata, kami yang blusukan ini berkomunikasi dengan petani sampai hari ini masih dipersulit harus ada rekomendasi dari Dinas.

KETUA RAPAT:

Waktunya cukup Pak pendalaman.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terakhir.
Terima kasih Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Ini tokoh perempuan dari Banten yang banyak mengajak teman-temannya ke Banten agar hidupnya sehat dan dicintai oleh suaminya.
Silakan Bu Nur'aeni.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan dan Anggota Komis IV yang saya hormati,
Pak Menteri beserta jajarannya,

Pertama, tentu saya atas nama masyarakat Dapil saya Kabupaten Serang Cilegon mengucapkan terima kasih atas kunjungan Pak Menteri tempo hari, tapi permohonan maaf saya tidak bisa mendampingi kemarin karena ada sesuatu hal sehingga tidak bisa hadir, dan mudah-mudahan kehadiran Pak Menteri banyak memberikan manfaat untuk masyarakat saya khususnya para petani, mudah-mudahan saja diberikan program yang lebih ke Banten karena dekat lokasinya dari Ibukota negara.

Apresiasi pula atas capaian opini yang diberikan oleh BPK, WTP ya berturut-turut. Semoga ini menjadi semangat kedepan agar lebih meningkatkan kualitas kinerja dari jajaran Kementerian Pertanian dan mensejahterakan para petani Indonesia kita.

Tentu catatan yang ingin disampaikan terhadap penyampaian opini yang kemarin dari kami bahwa mohon kiranya catatan yang masih untuk dilakukan atau pun masih temuan dalam hal catatan untuk segera diupayakan untuk diselesaikan secara tepat waktu. Kaitan dengan program di Tahun 2020 ataupun kondisi para petani kita khusus di Dapil di 2020 masih saja terjadi mungkin aspirasi kaitan dengan susahny mendapatkan aksesibilitas permodalan, KUR yang masih minim di Provinsi Banten, Pupuk Bersubsidi juga ini semakin langka, ini jadi perhatian, disamping itu juga irigasi yang saat ini juga masih sangat dibutuhkan. Mohon kiranya Menteri Pertanian dan jajaran juga sepakat untuk bisa melakukan koordinasi yang intens dengan Kementerian lain, karena tidak menutup kemungkinan persoalan irigasi yang semakin susah sehingga air persawahan ditingkat petani semakin kering karena adanya pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Nah ini kiranya mohon bantuan dari Pak Menteri Pertanian. Yang berikutnya juga ada juga adanya alih fungsi lahan dikarenakan pembangunan jalan tol Serang Panimbang yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi jalan tol banyak yang belum di PR-kan kepada para petani kita. Ini juga menjadi persoalan utama.

Berikutnya, saya juga menyoroti dan memberikan apresiasi dengan kenaikan PNBP yang disampaikan oleh Pak Menteri kurang lebih 195,5M ini. Tentu kami juga ingin mengetahui lebih rinci dari sub sector apa saja PNBP yang dihasilkan yang bisa dipungut serta korporasi mana saja yang memang sudah membayar PNBP tersebut untuk negara. Dan kami minta juga bahwa PNBP ini disampaikan secara transparan disaat kami membahas anggaran di tahun berikutnya. Karena yang saya evaluasi saat penyampaian program penganggaran di tahun-tahun sebelumnya tidak menyampaikan pendapatan PNBP yang dihasilkan dari Kementerian Pertanian berapa, dan seperti apa. Ini mohon kedepan untuk digambarkan lebih jelas di Komisi IV.

Untuk 2021, ada beberapa mungkin dari Dirjen baik PKH, maupun Dirjen Perkebunan yang memang realisasinya masih rendah. Nah kami mengingatkan dengan waktu efektif yang 4 bulan ini mohon kiranya untuk bisa dipercepat, dan minta membuat timelinenya dan disampaikan kepada kami, karena masyarakat menunggu terhadap program tersebut.

Untuk Tahun 2022, saya juga meminta target komoditas utama ini harus realistis, diukur ya secara cermat, serta berdasarkan hasil kajian-kajian yang mendalam, tidak asal-asalan. Tadi yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Karena apa, dari beberapa yang disampaikan dari tahun ke tahun juga contoh misalkan, Dirjen Horti dari jumlah luas juga misalkan di buku dicantumkan luas lahan sekian hektar, akan tetapi didalam pembahasan ada istilah ton-ton, dan sebagainya. Nah dari sisi ini mungkin supaya kami juga paham dan dari perencanaan Kementerian Pertanian juga bisa terukur realistis, mohon kiranya ini juga dicermati.

KETUA RAPAT:

Cukup Bu?

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Terakhir, kaitan dengan “Merdeka Ekspor” sangat menyambut baik, akan tetapi harus diimbangi serta harus memiliki komitmen yang nyata. Kalau melihat dari rencana anggaran 2022 yang semakin menurun saya kira semangat kendor ya hanya slogan-slogan belaka. Nah untuk itu mohon kiranya direncanakan 2022 juga, kami mendukung sekali anggaran untuk pertanian ini ditingkatkan untuk bisa merealisasikan dari semangatnya Merdeka Ekspor.

Dan yang terakhir, agar program-program seperti peningkatan daya saing dan inovasi yang dimiliki dikembangkan, khususnya di Balitbang lebih dioptimalkan dari peran dan fungsi walaupun ada Badan BRIN saya lebih setuju optimalkan peran dan fungsi Balitbang serta PTSP ya, BPTP yang ada di Kementerian Pertanian.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Ini yang ingin senang kebanyakan perempuan yang mengajukan untuk didalami ya.

Selanjutnya Mbak Alien.

Silakan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ijin Ketua. (Kok kalau saya langsung diingatin saya. Heran saya, selalu diskriminasi waktu)

Baik.

Terima kasih.

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang saya hormati Pimpinan saya yang luar biasa, empat-empat ini saking semangatnya kadang Ketua sampai duduk di meja Anggota, dan Anggota Komisi IV yang saya sayangi, dan tentunya Pak Menteri, Bapak Sekjen, beserta Eselon I yang saya hormati. Inshaa Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wata'ala. Aamiin.

Tentunya “Wajar Tanpa Pengecualian” ini harus kita memberikan apresiasi, karena wajar tanpa perempuan tidak mungkin. WTP itu kan Wajar Tanpa Perempuan kata Ketua Sudin bilang, tapi Alhamdulillah ini sudah tahun ke-5 Kementerian Pertanian mendapatkan apresiasi dari BPK yaitu “Wajar

Tanpa Pengecualian". Tentunya ini harus digenjut lagi istilahnya Kang Johan walaupun Mbak Luluk sudah. Ini bagaimana sih, kalau saya yang ngomong banyak yang protes ya.

Jadi ingin saya sampaikan Pak Menteri, tentunya kita selalu focus pada rapat kita hari ini yaitu Laporan BPK Tahun 2020, dan juga realisasi anggaran Tahun 2021, serta perencanaan pagu anggaran Tahun 2022. Tentunya yang menjadi pandangan saya adalah kenapa pada Tahun 2021 ini masih adanya penyerapan anggaran yang sangat signifikan, tidak bisa kita melihat penyerapan anggarannya per Eselon I itu ada masalahnya dimana sehingga 48% ini masih terkendala. Tentunya tadi saya sudah mendengar paparan dari Bapak Menteri bahwa sampai dengan 21 Agustus itu realisasi serapan anggaran itu Kementerian Pertanian 7,85 triliun (48,35%) yang harusnya kita ketahui bersama 4 bulan lagi, berarti masa periodisasi penyerapan anggaran per 30 Desember itu sudah ada harus pelaporannya. Dan ini harus betul-betul kita atensi bersama. Tentunya saya ingin menyampaikan Pak Menteri bahwa COVID-19 ini kita belum mengetahui sampai kapan berakhirnya, saya tidak tahu tapi dengar-dengar lagi kemungkinan besar di bulan Oktober adanya pemotongan anggaran. Sehingga kemungkinan besar Pak Menteri melihat dari beberapa Eselon I yang penyerapan anggarannya masih terhambat dan masih terlambat mungkin bisa dilihat nanti untuk ancang-ancang pemotongan anggaran tersebut. Ini mungkin Pak Sekjen bisa melihatnya.

Kemudian tentunya sudah menjadi isu actual bahwa porang ini menjadi satu ketertarikan yang sangat besar termasuk di Maluku Utara juga, tapi kita melihat bahwa benar sekali kita harus melihat komoditi-komoditi andalan per Provinsi Pak Menteri, karena ini sudah kami sampaikan dari Tahun 2020 sehingga adanya klasifikasi daerah per Provinsi, kalau memang penting mungkin per Kecamatan atau per Desa sehingga bisa ada klasifikasinya untuk komoditi andalan per Daerah.

Kemudian saya ingin menyampaikan lagi bahwa dalam situasi krisis pandemi COVID-19 ini seharusnya semangat Pemerintah adalah membantu mempermudah, mengayomi, melindungi, melayani para petani, tapi malah yang terjadi adalah aturan yang semakin mempersulit dengan berbagai alasan. Terus juga cabut atau tinjau ulang Peraturan Menteri atau Peraturan Dirjen yang menghambat, atau mempersulit usaha dibidang pertanian karena masyarakat atau pelaku usaha yang sedang sulit.

Kemudian kita juga harus melihat, menginventarisir Peraturan Menteri, Peraturan Dirjen yang dinilai mempersulit usaha pertanian, untuk itu kita akan lakukan kliring dengan Gapoktan dan Asosiasi untuk meminta masukan menampung keluhan peraturan-peraturan yang kontra produktif.

Kemudian saya ingin menyampaikan bagaimana rencana Tahun Anggaran 2022 yang akan datang, masihkah ada rencana untuk bisa memprioritaskan program-program unggulan yang ada di negeri kita Pak Menteri. Jadi saya selaku Fraksi Partai Golkar juga mengapresiasi kepada Bapak Menteri dengan kegiatan-kegiatan yang sungguh luar biasa pada tahun

ini, pada masa pandemi ini tapi Menteri Pertanian tetap aktif dan juga memberi dorongan positif khususnya di PNBP.

Kemudian Pak Menteri, saya ingin sampaikan bahwa RIPH bawang putih. Ini semakin hari semakin kita perlu memperjelas lagi, apakah RIPH bawang putih ini masih dipentingkan atau tidak. Karena kemarin terjadi Tahun 2020 dan 2021 adanya penerbitan RIPH tanpa mewajibkan masa tanam bagi perusahaan yang diwajibkan untuk mengimpor. Saya berharap bahwa RIPH ini tetap ada karena kita harus melindungi juga petani bawang putih kita di negeri kita yang kita cintai ini. Ini saya melihat ada bawang putih yang sudah dibawa tapi saya tidak tahu itu bawang putih impor atau bawang putih local, nanti disampaikan saja langsung.

ANGGOTA:

Lokal.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Oh pantasan kecil-kecil. Jadi ingin saya sampaikan bahwa ini perlu diatensi kembali RIPH ini Pak Menteri, jangan sampai petani-petani bawang putih kita ini juga dirugikan.

Kemudian saya ingin melihat di Kementerian Pertanian khususnya yang ada di Hortikultura Pak Menteri. Karena saya melihat banyaknya produk-produk hortikultura ini tapi kok dari hortikultura ini tidak ada misalkan kebun percontohan Pak Menteri dari hortikultura. Padahal kita ini kan sebenarnya meminta, jahe jangan di impor, bawang putih jangan di impor, terus juga cabai misalkan. Kenapa di Hortikultura ini tidak kita lihat, atau kita bentuk. Saya tidak tahu struktur organisasi yang ada di Hortikultura ini seperti apa, apakah sama kayak di Litbang atau seperti apa, karena kalau di Litbang itu kalau enggak salah sampai di BPTP, BPTP ada juga kebun percontohannya. Tapi mohon maaf, saya melihat juga tidak berjalan dengan baik. Mungkin Pak Menteri yang khusus yang Hortikultura di Hortikultura saja untuk percontohan kebun misalnya komoditi Hortikultura. Sehingga kita mengetahui persis nih, bisa kita mengukur kestabilan dan juga kita melihat ketersediaan yang ada di produk-produk hortikultura. Itu juga bukan hanya untuk dibuah-buahan atau di sayur-sayuran tapi juga disitu ada tanaman-tanaman yang khusus yang bisa kita lihat.

Kemudian satu lagi Pimpinan, saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya anggaran refocusing 2021 ini sudah ditandatangani atau belum? Nanti tolong disampaikan, ya maksudnya Pimpinan soalnya matanya semua ke Pimpinan sini, makanya saya lihat sini. Jadi saya ingin menanyakan bahwa refocusing yang terakhir dilakukan pada masa Reses untuk Kementerian Pertanian sudah ditandatangani oleh Pimpinan Komisi IV atau belum? Terus, tentunya kita juga perlu diberitahukan apa saja yang sudah di refocusing, kegiatan apa saja dan apakah itu tersangkut dengan kepentingan dari para petani.

Itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena tentunya kita berharap pada saat ini yang harus kita lindungi dan harus kita betul-betul menjaga adalah para petani kita. Tentunya NTP perlu untuk bisa dinaikan, bukan malah turun.

Itu saja yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih.

*Wabillauhitaufiq Walhidayah,
Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pak Muslim. Setelah ini kita skors.

F-PD (MUSLIM, S.H., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Pimpinan, beserta teman-teman Anggota Komisi IV, Pak Menteri, Pak Sekjen dan jajarannya,

Pertama, tentu saya mengapresiasi terhadap hasil audit BPK selama 5 tahun berturut-turut. Saya pikir ini satu hal yang luar biasa. Ada beberapa Kementerian malah turun Pak Menteri, ini saya pikir satu hal yang sangat positif terhadap kinerja Kementerian Pertanian.

Yang kedua Pak Menteri, saya melihat disini ada satu semangat yang luar biasa terkait dengan "Merdeka Ekspor", saya melihat betul dengan Pak Jokowi kemarin ini ada satu spirit yang bagus dan harapan petani Pak. Namun demikian memang kalau ini betul-betul maksimum Pak Menteri, ini mereka menunggu hari ini, kenapa? Banyak sekali produk-produk Horti ini di daerah-daerah ini yang butuh sentuhan Kementerian Pertanian, apakah jahe, lengkuas dan lain-lain. Saya melihat disini banyak sekali. Mungkin salah satu saya juga belum melihat konjak, apa itu konjak? Ini dari negara China, Vietnam, Taiwan, saya belum tahu tuh betuk produk konjak. Porang ya.

Kemudian di halaman ada itu lainnya saya lihat disini di ekspor sub sektor perkebunan. Itu senilai 1,4 triliun, saya lihat enggak ada keterangan Pak Menteri, mungkin bisa dijelaskan, itu nilainya sangat besar sekitar 75.000 ton, ini produknya apa dan juga saya lihat satu lagi point ke-9 juga sama. Ini mungkin bisa dijelaskan juga.

Yang kedua, tentu berkaitan dengan food estate tadi saya lihat. Ini banyak sekali saya yakin menjadi pembahasan. Saya lihat salah satu yang menarik kemarin saya baca di sebuah media itu di Kalimantan Tengah itu dianggap berhasil memproduksi khususnya berkaitan dengan food estate, bahkan rilis dari IPB itu sangat bagus. Saya berharap juga nanti bisa dijelaskan, dari sekian banyak food-food estate yang telah dijalankan oleh Kementerian, mana-mana yang berhasil, mana-mana yang tidak, mana yang menjadi

problem apa, mana yang tidak. Kita akan mendukung kalau ini menjadi satu langkah konkrit Kementerian Pertanian dalam konteks *Food Estate* ini. Ini mudah-mudahan bisa di rilis data itu Pak Menteri.

Kemudian yang ketiga itu saya melihat problem utama hari ini, ini karena kita turun di Dapil Pak Sekjen berkaitan dengan distribusi pupuk ini. Ini tentu yang sangat, harapan kita adalah distribusi ini kita harapkan prosesnya juga berjalan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran. Tapi dalam hal ini akan sulit dicapai jika proses verifikasi RDKK dilakukan secara manual ke Disdukcapil karena membutuhkan waktu yang lama dan juga rawan kesalahan. Kita tahu betul saat ini Kementerian Pertanian itu lagi melakukan pendataan menggunakan SIMPULTAN kalau enggak salah Pak Menteri ya. Pertanyaan saya ini, sampai kapan SIMPULTAN ini akan diterapkan kepada khususnya secara menyeluruh di seluruh Indonesia.

Mungkin yang terakhir itu berkaitan dengan alangkah baiknya, saya yakin disini ada Litbang ya. Litbang ini juga harus menguji coba di beberapa Daerah berkaitan dengan system ya termasuk juga mengakomodir bagaimana menggunakan bio metric khususnya *facial recognition*, menggunakan wajah Pak Menteri karena ini kan di beberapa negara sudah menggunakan system itu. Saya berharap Litbang ini bisa menjadi motor, bisa apakah di Pulau Jawa dulu atau Sumatera. Jadi sehingga kita harapkan RDKK ini tidak hanya mendata NIK ya, selama ini kan seperti itu Pak tapi juga wajah penerima. Hal ini saya yakin sangat penting khususnya dalam rangka memitigasi peluang terjadi kebocoran dalam penyaluran pupuk. Ini mudah-mudahan nanti Pak Sekjen bisa menjadi masukan. Jadi sehingga kedepan persoalan penyebaran pupuk subsidi ini, ini kan setiap tahun jadi problem. Tapi kalau ini kita enggak cari solusi saya yakin ini juga enggak akan pernah selesai.

Khusus terakhir berkaitan Dapil ini. Pak Menteri, kemarin saya di telepon beberapa Eselon II di Kementerian itu berkaitan penyerapan anggaran di Daerah ... di Aceh. Karena ini ada peralihan dari Bank Konvensional ke Bank Syariah. Jangan sampai nanti di tahun berikutnya khususnya anggaran-anggaran DAK maupun berkaitan dengan Provinsi Aceh dikurangi. Ini kita berharap Pak Sekjen, tapi sekarang sudah berjalan. Saya berharap juga dipantau terus oleh Kementerian, jadi sehingga ada peralihan dari Bank Konvensional ke Bank Syariah ini segera bisa terlaksana. Jadi sehingga penyerapan anggaran ini bisa maksimal khususnya di daerah. Mungkin itu beberapa hal Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Ansy lema.

Saya begini, ini sampai pukul 13.45 habis seluruh pertanyaan. 15 menit kita istirahat, sholat, dan makan, pukul 14.00 sudah masuk lagi untuk jawaban Menteri dan kesimpulan.

Terima kasih.
Sekarang Pak Ansilema, habis ini Pak Slamet dipersiapkan.
Terima kasih.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Kang Dedi Pimpinan.

Pak Menteri yang saya hormati, Pak Sekjen, Pak Dirjen.

Yang pertama, ya saya harus beri apresiasi kepada Kementerian Pertanian ini atas sejumlah capaian baik Penerimaan Negara Bukan Pajak maupun predikat dari BPK itu saya pikir saya harus berikan apresiasi.

Yang kedua, secara khusus juga saya kemarin habis Reses mau menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pertanian, Pak Menteri, para Dirjen atas bantuan konkrit untuk petani dan peternak. Terus terang Pak, baik alat mesin pertanian pra dan pasca panen, pengadaan bibit, bimbingan teknis kepada petani, peternak, dan penyuluh untuk meningkatkan kapasitas mereka, juga program-program pro rakyat seperti P2L dan UPO itu kami syukuri. Tetapi terkait dengan realisasi anggaran ini kalau boleh untuk mengantisipasi jangan sampai terkena refocusing dan realokasi khusus Direktorat Jenderal PKH, dan Dirjen Perkebunan kalau bisa lebih akseleratif kerjanya, jangan sampai karena ini baru diangkat 39,97% dan 38,79%. Jangan sampai program belum serapannya belum naik, kemudian sudah direalokasi dan refocusing karkena kemungkinan akan terjadi kembali.

Terkait dengan Dirjen PKH, saya ingin bertanya dalam Rapat Dengar Pendapat 25 Mei 2021, Pak Mindo senior saya dan saya itu bicara tentang dukungan terhadap pengembangan plasma nutfah sapi Sumba ongol di Sumba Timur NTT. Kami ingin tanya waktu itu ada alokasi 14 Miliar teknis kerjanya ini seperti apa Pak? Yang kedua masih Direktorat Jenderal PKH, saya juga ingin bertanya soal bagaimana dengan efektivitas serum yang disuntikan kepada babi yang mengalami ASF. 1 bulan lalu saya tanya katanya sudah pada tahapan kedua, sekarang bagaimana ceritanya, hasilnya bagaimana, apakah akan berhasil atau tidak.

Yang terakhir tadi teman-teman banyak bicara tentang “Merdeka Ekspor”, bicara tentang diversifikasi produk sesuai dengan konteks local. Saya mau menyampaikan sebelum kita bicara hal itu kita ini harus merdeka, berdaulat dalam hal benih dulu. Benih ini ujung tombak pertanian Republik Indonesia, benih yang baik dan berkualitas akan menghasilkan hasil panen yang berkualitas, dan kalau benih ini berkualitas maka pertanian kita berkualitas, kita makan pangan pun manusia Indonesia akan berkualitas. Pertanyaannya sekarang, sebenarnya benih yang mayoritas ada di negara kita ini benih dari dalam negeri atau benih yang dihasilkan oleh korporasi. Saya kok melihat terus terang kita ini belum merdeka dalam sisi perbenihan ini, maka saya berharap benih produksi local ini harus sungguh menguasai pasar pertanian domestic kita. Caranya bagaimana, ya kuatkan inovasi, Balitbantan harus diperkuat, BPTP harus diperkuat, dan benih yang harus dihasilkan ini

harus sesuai dengan karakteristik local. Karena terus terang saya sempat melihat beberapa pemberitaan, dan juga beberapa video ada kerja sistematis dari korporasi benih global itu ingin melakukan monopoli pasar benih ini dengan cara ya terus terang mematikan potensi benih-benih local yang merupakan benih khas Indonesia ini. Nah jangan sampai ada monopoli pasar benih, jangan sampai ada penyeragaman politik benih dan tolong Kementerian Pertanian kalau boleh memudahkan sertifikasi benih ini Pak, baik untuk Kementerian Pertanian maupun Peternakan. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih Pimpinan, Kang Dedi, Kang Hasan. Kita mendukung terus Kementerian Pertanian untuk kerja lebih maksimal kedepan.

Sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Fokus tuh benih bersertifikat, setiap menanamkan benih harus punya sertifikat itu sah dan legal menurut Undang-Undang (local wisdom). Dan selanjutnya, nanti kita tidak lagi ngomong Wanita Tanpa Pria karena hari ini semuanya sudah berkeluarga dan bahagia.

Silakan Pak Slamet.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Terima kasih Pak.

Bismilahirrahmanirrahim,
Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang saya hormati Pimpinan, rekan-rekan peserta Sidang, Pak Menteri, Pak Sekjen dan seluruh jajarannya yang saya hormati, mudah-mudahan selalu sehat.

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dengan lahirnya BRIN tentunya harus ada nomenklatur-nomenklatur dalam berubah sehingga saya menguatkan keputusan beberapa hasil Raker kesimpulan yang lalu terkait dengan rencana untuk adanya UPT dari Hortikultura. Ini bagus kalau kemudian anggarannya dikesanakan Pak, sehingga tidak ditarik di BRIN.

Yang kedua, saya ingin menyoroti terkait dengan Laporan Kinerja Kementan 2020 Pak. Saya ada beberapa data yang mudah-mudahan ini tidak ada niatan untuk menyesatkan kepada masyarakat dari hasil yang di klaim oleh Kementan. Jadi yang pertama terkait dengan sasaran strategis meningkatnya ketersediaan pangan dalam negeri, indicator kerjanya jelas Cuma yang ingin saya soroti begini, antara target capaian disitu tertulis 2,63. Kita telusuri di target awal itu, itu dicatat kita adalah 3,7 Pak Menteri, Cuma diakhir kemudian terjadi perubahan hanya 2,27, capaiannya itu 22,6 sehingga kalau targetnya diubah wajar kalau disitu diklaim menjadi sebuah keberhasilan. Cuma masalahnya pertanyaan saya, kenapa target itu diubah diakhir setelah kemudian melihat capaian. Nah sehingga kalau ini terus terjadi, ini adalah data

yang menyesatkan. Memang kelihatannya berhasil padahal tidak atau jauh dari target awal. Ini kalau saya salah mohon dikoreksi, tapi yang saya temukan seperti itu.

Satu hal lagi juga terjadi hal yang sama di nomor 8 nanti ... (03.08.49) target awalnya yaitu tertulis 62,55, capaiannya 53, nah sehingga diubah menjadi 50,43 sehingga disitu tertulis berhasil. Jadi karena ini dipublikasi sehingga kita tidak ingin ini data yang menyesatkan. Itu yang kedua.

Yang terakhir, yang ketiga Pak, saya melihat di paparan Nomor 34 ini luar biasa. Saya mensupport dan tentunya terima kasih kalau terjadi komoditi-komoditi ekspor. Terutama saya menyoroti No.3 ubi kayu. Di China, Amerika Serikat, Philipina, Srilangka, dan Hongkong dalam jumlah yang luar biasa. Cuma saya ingin menyampaikan keluhan dari Dapil saya Pak, jadi kalau disini terjadi impor ubi kayu ini kira-kira sebenarnya dimana dan bagaimana caranya, karena di Dapil saya hari ini harga ubi kayu itu 300 bahkan tidak ada yang beli Pak, 300 per kilo. Ini faktanya tidak begitu dan tidak terpanen, tapi disini ada peluang untuk kemudian ekspor. Nah ini kami mohon pencerahan sehingga Dapil kami mungkin secara umum Jawa Barat ini penghasil ubi kayu yang mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dan menikmati dari program ini.

Terima kasih Pak Menteri, Pimpinan.

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Bu Maria silakan.

F-PDIP (MARIA LESTARI):

Baik.

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan, beserta Anggota Komisi IV,
Yang saya hormati Bapak Menteri beserta rombongan, jajaran.

Menyikapi sambutan Bapak Menteri, saya mengucapkan "Selamat" kepada Kementerian Pertanian yang sudah mendapat laporan hasil pemeriksaan, laporan keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2020, disini Badan Pemeriksa Keuangan memberikan WTP, opini Wajar Tanpa Pengecualian. Jadi saya mengucapkan pertama "Selamat".

Terus, saya juga memberi apresiasi kepada Kementerian Pertanian dengan program-program yang nyata. Disini saya juga menyikapi program dari PKH, mohon kiranya bantuan peternakan yang ada di sektor pertanian untuk program Kementerian kita tolong jangan diakhir tahun, karena pada akhir tahun mungkin dari Dinas di Kabupaten, Provinsi itu pasti banyakkannya. Itu kedua.

Yang ketiga, menyikapi program Kementerian Pertanian dengan program petani milenial saya harapkan kegiatan ini bisa menjadikan era digital saat ini semakin mendorong percepatan pembangunan pertanian Indonesia, dan saya harapkan petani milenial ini bisa mendorong pencapaian yang lebih banyak lagi dalam sektor pertanian yang ada. Pada kesempatan tanggal 6 bulan 8 saya membaca dari media social ini, petani milenial ini sudah ada 2000 ya Pak kemarin bersertifikat ya. Nah jadi saya harapkan dalam program Kementerian Pertanian juga ini bisa meningkatkan sektor pertanian yang ada dan produktivitas lebih meningkat lagi, jangan sampai sudah ada petani milenial tapi untuk kebutuhan kita juga tidak bisa memadai, tidak bisa kita serap seperti itu. Jadi semoga program-program Bapak kedepan semakin lebih baik lagi, dan bisa mewujudkan SDM Pertanian yang unggul, mandiri dan modern apa yang Bapak Menteri sampaikan.

Dan terakhir menyikapi pembenihan, untuk melakukan penggabungan Badan Riset dan Badan Karantina Pertanian merupakan upaya yang sangat strategis dalam meningkatkan efektivitas output birokrasi. Namun disisi lain fungsi Kementerian Pertanian perlu terus dilakukan penguatan. Nah hal ini sering dikemukakan oleh Komisi IV terkait masalah pembenihan dan perlindungan tanaman. Dalam penggunaan benih unggul bermutu baru sekitar 40% terutama di Hortikultura dan perkebunan seraya dengan itu kehilangan hasil akibat dari gangguan OPT, bencana alam dan iklim juga masih menjadi factor pembatasan karena angka secara nasional masih tinggi yakni diatas 30%. Oleh sebab itu untuk menguatkan fungsi Kementan dalam mengusulkan untuk membuat Unit Eselon I menangani pembenihan dan perlindungan tanaman sehingga lebih terfokuskan.

Itu saja Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sebentar yang terakhir ini dicatat saya, data. Yang terakhir Pak Ichsan Firdaus. Nah yang nanti itu bukan terakhir, itu tambahan-tambahan dari yang terakhir.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Terima kasih Pak Ketua.

Bismilahirrahmanirrahim,

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Menteri yang saya hormati, para Eselon I Direktur Pupuk Holding.

Pertama-tama saya ingin mengucapkan "Selamat", sepengetahuan saya tadi di Rapat Komisi ini belum ada yang mengucapkan "Selamat:" bahwa Ibu Luluk itu sudah menikah. Jadi saya ucapkan "selamat" sama Ibu Luluk, saya ingin beritahu sama Pak Menteri Bu Luluk sudah menikah Pak. Jadi hati-hati Pak, jaga jarak maksud saya. Karena Covid jadi sekarang jaga jarak. Jadi "selamat" Bu Luluk.

Yang kedua Pak Menteri, saya ingin menyoroti keseimbangan anggaran nih Pak Menteri di Kementerian Pertanian. Saya tadi lihat streaming walaupun saya datang terlambat tapi Pak Menteri sudah menyampaikan, saya tidak melihat ada kesinambungan atau agak nyambung, atau kurang nyambung antara apa yang disampaikan Pak Menteri dengan apa yang terjadi di anggaran ini Pak Menteri. Ambil contoh misalnya, saya tidak melihat bahwa Pak Menteri itu konsentrasi pada misalnya tanaman hortikultura, tapi anggarannya kok lebih tinggi daripada 2021, tetapi kalau kemudian Pak Menteri konsentrasi di Tanaman Pangan, tapi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan anggarannya malah jeblok. Jadi saya tidak melihat bahwa ini ada yang tidak nyambung antara apa yang disampaikan Pak Menteri didalam Raker ini dengan apa yang terjadi didalam penyusunan anggaran. Saya berharap sebenarnya ini ambil contoh saja Pak Menteri, kalau kita ingin meningkatkan produktivitas daging misalnya saja, saya wajar kalau kemudian anggaran PKH naik, tapi Pak Menteri tidak menyampaikan itu. Saya sudah lihat di pagu indikatif pun tidak ada kenaikan itu tapi kenapa anggarannya naik. Nah ini maksud saya harus disesuaikan. Sehingga kemudian ada keseimbangan yang benar apa yang disampaikan Pak Menteri visinya 2022 seperti apa dengan implementasi anggaran yang ada. Saya menyoroti banyak hal, saya sebutkan saja misalnya Pak Menteri. Saya sebutkan saja nih ya, di 2021 Direktorat Jenderal Hortikultura 621 Miliar, dan di 2022 Direktorat Jenderal Hortikultura 1,045 ada kenaikan 400 Miliar, tapi tidak ada peningkatan produksi horti didalamnya. Bukan tidak ada, tidak nyambung. Kalau memang betul Pak Menteri fokusnya pada horti misalnya disampaikan ke kita wajar kalau itu naik, tapi tidak ada. Justru yang ada mempertahankan misalnya tanaman-tanaman pangan, kemudian jalur irigasi misalnya tapi anggarannya enggak nyambung. Saya minta nanti pada saat, Pak Menteri mungkin evaluasi lagi anggaran ini sehingga kemudian betul apa yang disampaikan oleh Pak Ono tadi bahwa kemudian harus ada focus anggaran. Saya selalu bilang, saya ingat pesannya Via Vallen Pak Menteri waktu pas Asean Games “focus satu, satu titik, titik itu” jadi focus saja. Katanya Via Vallen begitu. Saya ingat itu, ya focus pada program. Jadi kalau ada program-program yang memang kecil-kecil buat apa, terkesan bagi-bagi anggaran saja. Lebih baik anggaran itu kita fokuskan, apa sih fokusnya Pak Menteri 2022? Nah yang kecil-kecil ini kita hilangkan (bukan kita hilangkan), kita kurangi saja. Saya menyoroti itu saja. Pertama, terkait dengan focus anggaran. Yang kedua, saya hanya ingin mengingatkan Tahun 2021 ini kita refocusing, sepengetahuan didalam Raker kita itu, itu sudah ada bahwa kita minta laporan penyerapan, ini sudah ada, tapi nanti kita minta focus anggaran 2021 refocusing seperti apa, penyerapannya berapa, ada beberapa hal yang mungkin tingkat penyerapannya kurang. Nah ini perlu kita evaluasi lagi. Terutama Pak Menteri, saya mau tanya terkait dengan *Food Estate*. Seberapa besar kemampuan kita untuk menyiapkan lahan, rehabilitasi lahan kita ini. Kalau memang tidak mampu dilakukan ya kita refocusing saja Pak Menteri. Refocusing pada sektor-sektor yang lebih produktif untuk menaikkan target itu. Itu yang kedua.

Yang ketiga, DAK. Sepengetahuan saya tadi pada saat kita bahas rapat ini tidak ada yang membahas DAK, saya hanya menyinggung saja. apakah menu ini sudah final atau belum Pak Sekjen? Belum kan, harus ditetapkan Komisi kan, maka kita tunggu nanti menunya ini kita pelajari dulu, kita sama-

sama diskusi, seperti apakah menyunya, masih cukup atau tidak, ataukah perlu penambahan atau tidak.

Yang terakhir Pak Ketua, saya ijin terkait dengan pupuk subsidi. Saya menyoroti tingkat penyerapan pupuk subsidi untuk organik, pupuk cair maupun pupuk granul yang angkanya relative rendah. Padahal kita sama-sama ingin petani kita ini terbiasa dengan pupuk yang ramah lingkungan, tapi kalau tingkat penyerapan pupuk cairnya 5% ini ada apa, ini sudah Agustus. Nah ini tolong disorot dengan baik, saya minta penjelasan dari PT Pupuk Indonesia, bahwa kenapa pupuk organik kita ini tingkat pencapaiannya itu rendah sekali, apakah memang petaninya tidak mau melakukan itu, tidak menggunakan itu atau kurang sosialisasi. Kalau memang kurang sosialisasi semestinya tidak hanya Kementerian Pertanian punya peran, tapi PT Pupuk Indonesia juga punya peran untuk melakukan sosialisasi ini. Jadi saya pikir kita harus evaluasi, kenapa kok tingkat penyerapan pupuknya itu rendah.

Yang sangat terakhir, Kepala BKP mana Pak? Oh Pak Sahrul sekarang Kepala BKP? Waduh kembali lagi ya, selamat datang Pak Sahrul (Kepala BKP). Saya ingin tanya,

KETUA RAPAT:

Cukup?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Belum.

Terakhir, terkait dengan Badan Pangan Nasional dan Badan Ketahanan Pangan. Apakah nanti Badan Ketahanan Pangan ini, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, ini ditarik ke Badan Pangan Nasional atau memang nanti fungsinya seperti apa sih. Sepengetahuan saya, perdebatan kita terkait dengan Badan Pangan Nasional ini, ini ada kaitannya dengan BKP pada saat periode lalu. Nah ini sebenarnya ininya apa, apa namanya. Kalau memang BKP nanti ditarik ke Badan Pangan Nasional ya sudah anggarannya kita ambil saja Pak, sama seperti BRIN. BRIN sama Badan Litbang. Jadi jangan kemudian fungsinya dipindahkan ke Badan Pangan, tapi anggarannya diboyong juga ya jangan, mendingan kita ganti dengan sektor-sektor yang lebih produktif.

Itu Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Dipercepat, Mbak Luluk.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri yang saya hormati, dan juga semua jajaran dari Kementerian Pertanian,
Bapak/Ibu Anggota Komisi IV yang berbahagia.

Yang pertama, “Selamat” dulu untuk capaian WTP-nya. Saya senang sekali karena ini berturut-turut Kementerian Pertanian. Ini juga prestasi yang lain karena ditengah pandemi masih tetap juga eksis, ekspor juga meningkat, dan seterusnya.

Saya ingin menyoroti beberapa hal, mudah-mudahan enggak sampai 3 menit Pimpinan. Yang pertama yang terkait dengan food estate. Dulu dalam beberapa kali rapat sebelumnya dengan Pak Menteri, kita sudah pernah meminta hasil kajian menyeluruh, komprehensif, yang terkait dengan food estate, dan pada waktu itu kalau tidak salah ingat kita minta bulan Agustus di tahun ini itu sudah kita dapatkan hasil kajiannya. Nah apakah Kementerian Pertanian sudah siap dengan hasil kajian itu, kalau ada mohon untuk bisa dibagi ke Komisi IV Pak karena kita juga, kalau ditanya orang itu biar bisa jawab, kita bisa bantu kalau memang itu perlu dibantu tetapi kita juga akan memberikan masukan yang konstruktif kalau memang itu benar-benar dibutuhkan. Tetapi sepanjang hasil kajian itu juga enggak di share ke kita apalagi kalau sampai kemudian itu belum dilakukan, nah ini kan kita patut untuk prihatin bersama-sama.

Kemudian yang kedua yang terkait dengan petani milenial, saya ingin menyambung saja yang sudah disampaikan oleh Mbak Maria. Sebenarnya jumlah milenial kita, anggap saja orang-orang muda itu sudah hampir 40% Pak dari total populasi di Indonesia. Nah kalau kemudian disebutkan hanya sekian ribu, katakanlah enggak lebih dari 2000 atau dibawah 5000 orang-orang muda yang meminati, menggeluti bidang pertanian itu hanya berapa persen dari angkatan muda, atau milenial yang ada di Indonesia. Itu artinya bahwa sektor pertanian ternyata belum bisa menarik minat anak-anak muda untuk dijadikan pilihan masa depan mereka. Nah ini saya kira menjadi tugas berat dari Kementerian Pertanian untuk memastikan bahwa di tahun-tahun yang akan datang, entah 10 tahun, atau 15 tahun yang akan datang enggak akan berhenti ini yang namanya dunia pertanian kita. karena apa, karena kita enggak akan kekurangan para tenaga kerja, enggak akan kekurangan orang-orang yang mikir disana, enggak akan kekurangan orang-orang yang juga menekuni bidang ini secara serius. Nah kalau dilihat dari datanya yang ada, berarti kan kita sangat patut khawatir. Karena apa, masih dikuasai dan didominasi oleh orang-orang tua Pak, jadi usia-usia 60 tahun, 50 tahun, sementara usia yang 17 tahun keatas itu semuanya masih belum meminati untuk disektor pertanian. Nah sekali lagi, dulu pernah saya menanyakan langkah-langkah yang paling penting, yang sangat strategis, insentif, dukungan, apa yang perlu dilakukan. Karena kalau dilihat dari anggarannya ini juga enggak terlalu muncul gitu loh. Ya kita enggak ingin ini hanya menjadi semacam moment-moment ceremonial, kemudian juga komplamenter dari sekian banyak agenda prioritasnya Kementerian Pertanian, sementara kita tidak menyiapkan regenerasi pertanian dan angkatan kerja kita ini secara serius.

Yang berikutnya Pak Menteri, yang terakhir dengan porang. Tadi semua sudah membicarakan tentang porang ya. Saya sepakat dengan kekhawatiran teman-teman semuanya kalau kemudian ini akan menjadi booming dan tidak diantisipasi maka pasti ini akan melemahkan posisi petani. Lagi-lagi mereka akan menjadi korban dari situasi yang mungkin menggiurkan pada mulanya. Nah kita sempat juga waktu itu diskusi di Komisi IV, jangan sampai ada kebijakan yang membolehkan ekspor umbi porang, itu penting. Nah apakah ini yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian, apakah sudah ada misalnya Peraturan Menteri yang memang melarang ekspor umbi. Kenapa? Karena kalau umbi ini yang kita ekspor Pak, mungkin 5 tahun lagi itu dunia luar itu sudah enggak perlu porang lagi dari kita karena mereka sudah bisa tanam, mereka sudah bisa produksi, dan mereka sudah bisa mengembangkan, dan secara teknologi apalagi mereka sudah kuasai, kita ini kan hanya baru bisa batas nanam, dan paling banter hanya bisa jadi tepung atau jadi cip-cipan doang, jadi snack. Kita belum sampai bisa menghasilkan turunan dari porang. Nah mungkin kita bisa dorong Balitbantan atau Lembaga Risetnya Kementan ini, kira-kira yang dihasilkan dari porang itu apa saja sih, turunannya itu sampai, kalau bisa itu turunan yang paling akhir. Seberapa jauh itu perlu dukungan dari apakah BRIN dan lain-lain, sehingga yang akan kita olah yang kita produksi, kita kembangkan, dan yang kita ekspor itu bukan hanya dalam bentuk turunan satu atau dua saja. Jadi paling banter hanya tepung, tapi kalau bisa ya kosmetiknya, mungkin juga produk untuk kesehatan, atau yang lain-lain yang memang itu bisa dihasilkan dari porang.

KETUA RAPAT:

Cukup?

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Satu lagi Ketua. Yang terakhir (bukan terakhir sih), yang terkait dengan petani perempuan, saya mohon ini juga bukan yang pertama, saya dulu bilang sama Pak Menteri, kalau bisa petani perempuan kita ingin kayak petani-petani yang ada di China itu Pak, bagaimana mereka itu juga secara teknologi mereka itu ... (03.27.46) karena memang negara itu dan Pemerintah memfasilitasi dan mendukung mereka untuk memiliki kesetaraan didalam mengakses baik itu anggaran, program, kebijakan, dan juga bimbingan dan seterusnya. Jadi jangan sampai kemudian petani perempuan ini seolah-olah nasibnya itu hanya di klaster P2L, tapi di sisi lain mereka enggak punya akses untuk bisa menikmati fasilitas teknologi yang ada dimiliki oleh Kementerian Pertanian. Jadi kayak P2L ternyata enggak bisa mengakses Alsintan, enggak bisa mengakses traktor, enggak bisa mengakses teknologi yang lain-lain. Jadi mereka hanya dipatok disitu. Saya kira ini juga bias gender yang kita enggak harapkan bisa terjadi. Saya kira itu ya Pak Menteri ya, kita dukun Pak Menteri dan semua jajaran di Kementan untuk makin majulah, pertanyaan kita makin kuat karena kita percaya pandemi ini yang kita harapkan betul itu sebenarnya eksis dan mendukung perekonomian kita tetap tumbuh ya pertanian. Jadi kita bersama-sama Pak Menteri ya.

Terima kasih.

*Wauallahumafiq Ila Aqwamith Thoriq,
Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'llaikumsalam.

Terima kasih Mbak Luluk, bahagia selalu selamanya, cintanya abadi.

Selanjutnya Mbak Kiki, mohon dipercepat karena kita ini gemetar badannya sudah pengen sholat.

Terima kasih.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Singkat Pimpinan.

Pertama, saya ingin menyampaikan terkait Undang-Undang Nomor 21 Taun 2019 tentang Karantina, bahwa *custom immigration* sama apa namanya *Quarantine* itu supaya diperkuat juga. Jangan bicara merdeka ekspor tapi karantinanya juga tidak terfasilitasi Pak Menteri, Pak Sekjen. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, kembali tadi, saya didalam forum yang terhormat ini terkait BRIN yang dari tadi teman-teman sampaikan untuk didorong dimasukan ke kesimpulan rapat karena kemarin di KKP kita juga menyimpulkan dalam rapat bahwa skema seperti apa yang akan dibuat oleh Kementerian Pertanian karena sepemahaman saya ada beberapa, saya enggak tahu ada beberapa atau mungkin ada Dirjen-Dirjen tertentu yang perpanjangan tangannya dilapangannya tidak maksimal. Jadi agar ini bisa. Jangan sampai satu Badan terlalu gemuk juga tidak baik. Jadi supaya rata pembagian tusinya clear.

Nah ketiga, permasalahan juga yang tadi saya ingin sampaikan. Sekali lagi sinergitas antar Dirjen ini bicara hulu sampai hilir Pak Menteri. Jadi jangan sampai duduknya, sekali lagi saya tekankan duduknya di Komisi IV bareng-bareng, beres rapat bubar. Akhirnya yang jadi sasaran tembak Pak Menteri karena apa, tidak ada kerjasama antar Dirjen yang bekerja sebagai timnya Pak Menteri.

Nah terkait itu, oleh karena itu contoh tadi juga yang keempat mungkin Litbang. Sudah mutlak bahwa penelitian riset itu, itu akan bergeser karena itu dalam bentuk Undang-Undang Pak. Akan tetapi besar harapan kami pertanian ini seperti halnya KKP kemarin, apakah mungkin nanti dibikin semacam Badan dibawahnya Kementerian itu yang berbicara masalah kebijakan. Jadi rotmapnya Kementerian Pertanian itu clear. Rotmap yang akan di deliver kepada para Dirjen-Dirjen dari hulu sampai hilir. Jadi kembali lagi penekanan saya di forum yang terhormat ini mungkin karena kemarin di Rapat KKP kita juga mendorong itu masuk di kesimpulan rapat semoga didala kesimpulan rapat hari ini penguatan terhadap Kementerian Pertanian untuk bersiap, karena sepengetahuan saya Pimpinan April 2022 BRIN sudah harus launching.

Saya akhiri.

Terima kasih.

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Mbak Kiki mengakhiri seluruh pendalaman yang dilakukan, dan kita skors sampai pukul 14.30 dan kita akhiri dengan ucapan "Selamat Ulang Tahun" buat Bu Endang, bahagia selalu, dan ada hadiah istimewa bukan gratifikasi dari Pak Menteri.

Terima kasih.

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Kita skors.

(RAPAT DISKORS)

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI, Saudara Menteri Pertanian Republik Indonesia, dan para Pejabat Eselon I lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, BUMN, Hadirin sekalian yang berbahagia.

Setelah seluruh tanggapan, saran dan pendapat dari semua Fraksi dan pendalaman oleh seluruh Anggota Komisi IV, saatnya sekarang Saudara Menteri Pertanian Republik Indonesia menyampaikan jawaban terhadap saran, pendapat, dan pertanyaan segenap Anggota Komisi IV. Bagi yang tidak hadir mungkin pertanyaannya nanti tertulis saja agar supaya waktunya efektif dan efisien.

Kami persilakan Saudara Menteri.

MENTERI PERTANIAN:

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan dan segenap Anggota DPR Komisi IV yang kami sangat hormati dan banggakan,
Bapak sekalian yang sama kami hormati.

Ijinkan kami menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang luar biasa atas tanggapan, atas saran, atas berbagai koreksian menjadi catatan yang serius bagi kami dan masukan-masukan penyempurnaan dari apa yang menjadi laporan kami, catatan-catatan yang telah kami sampaikan.

Ijinkan kami menyampaikan apresiasi saya dan terima kasih saya kepada juga beberapa Anggota Komisi yang telah menyampaikan beberapa capaian-capaian yang dianggap cukup baik dengan berbagai catatan yang ada, ini menjadi masukan-masukan yang kami akan terus sempurnakan dimasa yang akan datang. Ijinkan saya secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Ketua Komisi yang telah memberi banyak sekali masukan, Pak Dedi juga seperti itu, Bu Endang, Pak Johan, Pak Ono, Pak Suhardi Duka, Pak Edward, Ibu Yessy, Pak Hanan, Bu Ema, Bu Anggia, Pak Mindo juga terima kasih, Pak Sutrisno, Ibu Nur'aeni, Ibu Alien, Pak Muslim, Pak Ansilema, Pak Slamet, Bu Maria, Pak Ichsan, Bu Luluk, Mbak Kiki, kurang lebih 23 yang memberi masukan. Ijinkan Pimpinan dan Anggota Komisi IV secara lengkap akan kami jawab secara tertulis, tetapi tentu saja yang mampu kita sampaikan apa yang mungkin kami sampaikan adalah hal-hal yang highlight atau catatan-catatan khusus yang perlu kami klarifikasi atau jadikan catatan dalam kesempatan yang baik ini.

Pimpinan dan segenap Anggota yang kami hormati,

Dari 23 tanggapan yang ada, kami catat ada yang berkait dengan budidaya, ada yang berkait dengan pasca dan pengolahan pertanian, ada yang berkait dengan market, dan beberapa catatan-catatan lainnya yang tentu saja kami tidak bisa jawab secara teknis dan lengkap selain akan menjadi catatan. Kebiasaan kami Pimpinan, sesudah Rapat Kerja seperti ini kami rapat lagi di Kantor atau di Rumah Jabatan di Wican untuk mengklarifikasi semua masukan yang ada, kumpul dari berbagai catatan-catatan yang ada. Oleh karena itu sekali lagi kami berharap akan kami jawab tertulis secara lebih lengkap dari apa yang ada agar bisa menjadi referensi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya.

Ada beberapa hal yang memang sangat menonjol dalam tanggapan-tanggapan antara lain adanya importasi. Ingin saya sampaikan catatan sampai saat ini dari kami tidak mencatat ada importasi yang telah disetujui oleh Kementan, tidak ada. Dan Bapak Presiden sendiri mempertegas setuju untuk tidak melakukan importasi pada beras yang ada.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Menteri, pengertiannya importasi apa nih, coba jelaskan.

MENTERI PERTANIAN:

Beras Pak. Jadi importasi beras, Bapak Presiden juga mempertegas bahwa beberapa saran kemarin untuk melakukan importasi beras setelah melihat panen raya dan Bapak Presiden 3 kali turun bersama kami maka Bapak Presiden juga mempertegas untuk tidak melakukan importasi. Oleh karena itu didalam forum yang terhormat ini, 2 tahun terakhir ini tidak ada importasi beras. Bahwa masih ada beras dari 2018 yang berada di gudang BULOG ini lain persoalan yang ada tentu bukan itu yang dimaksud.

Yang kedua, ada importasi yang berkait cabe, dan lain-lain sebagainya, ini juga tidak menggunakan rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Saya tidak berhak menjawabnya Pimpinan karena ini dalam kompetensi tentu institusi ini diluar Kementerian Pertanian. Tetapi saya kira, saya yakin bahwa ini juga ada catatan-catatan khusus yang mungkin saja menjadi latar belakang dari data-data yang ada.

Ijin kami akan mencoba mengklarifikasi data ini yang mana yang dimaksud. Karena bisa saja tahu-tahunya misalnya ada beras matik, ada beras jepang, korea dan lain-lain, ini merupakan non lartas yang tentu tidak dalam kompetensi kita tapi itu pun terbatas. Kalau ada kemudian masih ditemukan lebih dari itu, ijin Pimpinan saya pikir, saya berpikir sendiri, perlu kita laporkan saja. Saya kira ini bagian dari penyelundupan-penyelundupan yang harus kita cegah. Saya sependapat dengan forum Komisi IV bahwa keberpihakan kita pada rakyat, kepada petani, dan Inshaa Allah Kementan akan konsisten menjaga kepercayaan Komisi IV untuk membela petani kita didalam. Kita coba mendorong semua upaya kami semua lakukan untuk memperkuat kemandirian yang ada, baik di Horti, di Perkebunan maupun yang lain-lain. Tetapi tentu saja ini menjadi catatan-catatan khusus bagi kami dan para Dirjen untuk terus melakukan upaya-upaya maksimal karena tentu saja kalau kita biarkan terus seperti ini, tentu saja hasil-hasi panen kita juga akan terganggu khususnya dalam menjaga stabilitas harga. Kami ingin menyampaikan atau mempertegas kembali di forum ini. Kementerian Pertanian itu adalah budidaya dan produktivitas. Sementara stabilisasinya tidak pada kami. Nah ini juga menjadi tentu saja bagian-bagian dari membutuhkan exercise lebih dari kami atau menggunakan berbagai perangkat-perangkat yang kemungkinan kita lakukan yang bisa keluar dari aturan-aturan yang ada untuk menjaga stabilitas yang ada, antara lain melakukan intervensi-intervensi kalau memang ada panen yang berlebihan di satu daerah tetapi di daerah lain defisit maka dilakukan transfer ke daerah tersebut untuk melakukan stabilisasi harga.

Pimpinan yang kami hormati,
Para Anggota Komisi IV yang saya muliakan.

Saya ingin, mungkin mudah-mudahan ini enggak salah. Masa lalu itu kami punya BUMN Pak. Bulog itu dibawah Kementan, Pertani dibawah Kementan, Sang Hyang Seri dibawah Kementan. Jadi hilirisasi ini kami bisa atur, budidayanya berapa, bagaimana menyerapnya, dan lain-lain sebagainya. Ini membutuhkan exercise lebih karena proses-proses itu juga diluar kondisi yang ada. Dan pengalaman over stok, over stok khususnya beras yang kemarin ini kesulitannya luar biasa Bapak. Kemarin dengan mencoba melakukan pendekatan dengan Ratas dan Rapat Intern. Rapat Intern itu sangat terbatas dengan Bapak Presiden, makanya ada serapan 200.000 ton yang digulirkan ke Bansos oleh Bapak Presiden itu, itu membuka ruang sedikit untuk stabilisasi harga Bapak. Karena kalau seandainya tidak ini akan sulit sekali untuk dilakukan. Beberapa edaran yang kami coba manuver, mengintervensi para Bupati, para Gubernur agar jatah beras Pegawai Negeri termasuk TNI-Polri diambil pada daerah masing-masing. Sebagian besar sudah jalan, sebagian juga belum. Karena hanya itu cara kita untuk bisa mendapatkan serapan dan melakukan stabilisasi harga yang ada. Oleh karena itu disini memang ada hal-

hal yang masih perlu kami terus melakukan komunikasi dengan Kementerian lain agar betul-betul serapan kita bisa dilakukan.

Langkah kita selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan Menteri BUMN agar misalnya Berdikari bisa menampung ayam kita, dan kelebihan-kelebihan komoditas kita, dan memfasilitasi sampai dengan hilirisasi dan turunan dari ayam menjadi nugget, turuan dari ayam menjadi bakso, dan lain-lain, daging-daging, dan lain-lain, kita juga lakukan. Pasar tani sebenarnya ujungnya juga seperti itu, pasar tani. Terpaksa kita walaupun ini diluar mungkin saja tidak spesifik menjadi Tupoksi harus kita lakukan karena kalau tidak ada keseimbangan-keseimbangan pasar apalagi terjadi permainan lapangan. Secara jujur saya katakan, pernah ada satu komoditi yang saya coba tahan Pak, ternyata tidak cukup signifikan karena katakanlah ada komoditi tertentu yang harusnya masuk 40 ton didalam 1 hari, didalam 1 pasar induk, dan nyatanya 15 ton yang bisa ... (suara tidak jelas (00.11.15) karena yang lain memegang komoditi itu. Dan akhirnya harganya naik. Oleh karena itu kami tentu saja ini menjadi bahan-bahan dari kami yang terus. Namun Pak Pimpinan, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan kondisi ini cukup kami bisa lakukan perbaikan-perbaikan tentu saja dengan upaya-upaya maksimal dan menarik perhatian Bapak Presiden yang betul-betul Bapak Presiden itu memberikan perhatian yang serius kepada masalah pertanian kita. itu yang berkait dengan masalah BUMN dan hilirisasi yang berkait dengan stabilisasi harga, dan lain-lain yang coba kita lakukan. Dan Alhamdulillah kalau kita baca dari data statistic dan pelaporan yang ada melalui 3 uji artificial intelijen yang kami miliki laporan dari *Standing Crop* yang ada di Litbang, kemudian AWR (*Agriculture War Room*) yang memetakan yang ada, produktivitas kita memang cukup sangat-sangat melimpah, dan ini tentu saja akan menjadi bagian-bagian yang saya pikir inilah yang terakhir kita bisa dapatkan data bahwa data statistik kita menunjukkan bahwa produktivitas kita khususnya beras cukup meningkat dengan baik, kita masih punya over stock. 2020 ke 2021 itu kita masih punya lebih 7 ton dan, 7 juta ton lebih. Itu prestasi-prestasi yang saya kira cukup menggebrakan kita.

Kemudian ekspor kita menunjukkan 2020 itu kenaikannya 15,4% Bapak. Ini hampir tidak pernah dicapai secara seperti itu, hanya waktu zaman Orde Barulah kurang lebih seperti itu pernah beberapa kali di era ini tetapi 15,4 disaat COVID itu memberikan ruang 450 triliun hanya dari ekspor. Itu yang membuat kami pede bahwa kita telah melakukan upaya-upaya maksimal untuk mendorong itu.

Yang kedua di 2021 ini, triwulan satu ekspor kita naik menjadi 39 koma sekian persen, hampir 40% Bapak, dan itu setara Rp290 triliun. Dan itulah yang membuat kami pede membuat Merdeka Ekspor itu dengan uji coba. Jadi mohon maaf, memang ini hanya memanfaatkan momentum untuk menghadirkan konsolidasi emosional semua daerah bahwa bisa melakukan ekspor. Dan momentum Merdeka Ekspor itu membuat ada kerja ekstra yang dibuat secara kebersamaan di jajaran Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan ekspor sekaligus memberikan rancangan kepada seluruh daerah yang 514 Kabupaten/Kota untuk tertarik untuk mempersiapkan momentum ekspornya. Dan ternyata kita mampu memberi

ekspor 340 Kabupaten/Kota yang ada. Berarti masih ada 71 Kabupaten yang tidak peduli atau katakanlah belum melakukan ... (suara tidak jelas (00.14.57) maksimal terhadap ekspor. Itu yang kita capai dari momentum 17, dan kita punya 54 pintu pelabuhan yang dijaga oleh Karantina. Kita coba 17 pintu, hanya 7 hari digarap bisa Rp7,2 triliun. Oleh karena itu, itu memberikan ruang-ruang kepercayaan bagi kita bahwa sebenarnya komoditi pertanian kita memiliki yang cukup untuk melakukan

F-PDIP (RIEKZY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Sebentar, tunggu selesai dulu baru interupsi.
Lanjutkan dulu.

MENTERI PERTANIAN:

Oleh karena itu saya kira apa yang ada ini bukan yang di akrobatik, bukan hanya untuk di pura-pura, semua sertifikat ekspor dan komoditi ekspor akan kami lampirkan dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Karena ini semua ada, dan sertifikat ekspor itu hanya yang 7 hari, bukan yang sebelumnya, bukan yang sesudahnya. 7 hari persis baik yang sudah tersedia dan belum terkirim, dan itu kurang lebih 7,2. Kita berharap momentum ini setelah diikuti oleh para Gubernur, para Gubernur bahkan meminta, para Bupati meminta bahwa jangan Cuma momentum hari kemerdekaan, momentum lain harus diwujudkan. Dan Bapak Presiden juga mengapresiasi untuk melanjutkan momentum ekspor berikutnya dalam 1 tahun, tidak hanya 1 tahun 1 kali.

Pimpinan, dan Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati,

Hal lain yang ingin kami terangkan adalah masalah porang. Porang dan sarang burung wallet itu baru 2 tahun diambil menjadi komoditi pertanian itu dengan paksa-paksa sedikit Bapak Pimpinan, maafkan saya. Bukan berarti porang baru, bukan berarti sarang burung wallet baru. Ini porang adalah tanaman liar yang berada di hutan-hutan umumnya, dan belum masuk dalam komoditi pertanian. Dia melayang walaupun tetap sudah diekspor sudah jauh-jauh hari.

Yang kedua adalah sarang burung wallet ada di gua-gua, barulah 2 tahun ini kita budidayakan lebih intensif. Yang kemarin 19.000 hektar, sekarang ini sudah mencapai 47.000, dan target kita mencapai 50.000, mudah-mudahan kita bisa capai. Dan tentu saja akan kita mapping secara perlahan untuk itu. Baik sarang burung wallet maupun porang dengan nilai yang sangat besar kalau itu diekspor setelah ini kita tangani dengan baik. Persoalannya adalah harga yang paling mahal itu adalah ke negara China. Ini berarti negara lain tidak menyerap, tetapi harganya yang mahal itu adalah China. Nah setelah China ini tahu kita kembangkan seperti biasa mereka mulai selektif menerima apa yang ada, dan

berbagai kemudian bareur-bareur termasuk tresting mereka harus sangat kuat, dia mau per kilo pun dia tahu darimana sarang burungnya, darimana lahan penanamannya, dimana rumah prosesingnya, dimana rumah industri pengolahannya sampai pengeringannya. Mereka sangat-sangat menjaga bahwa dua komoditi ini kalau tidak bersih banget, tidak sesuai dengan dia punya persyaratan-persyaratan dia akan menjadi masalah. Setelah kita kembangkan maka porang itu tidak hanya dikirim keluar melalui industri, ada yang dichipping, dikeringkan pakai matahari dan sudah diterobos sampai ke China, kemudian diantaranya karena pakai matahari tidak sesuai dengan spek yang mereka mintakan, dan kemudian ada jamur kena matahari, karena ini harusnya pemanasannya diatas 200 sampai 300. Ini menjadi tantangan tersendiri yang akan kami juga lakukan.

Orang semua senang dengan porang Bapak karena porang itu per kilonya sekarang ini harganya 7000 ya, pernah 16.000 memang. Tapi itu pada saat belum seperti itu pengolahannya. Jadi 7000 itu sementara, sebenarnya porang dengan harga dasar 2000-an. Jadi sudah sangat untung Bapak. Memang ada penurunannya seperti biasa karena itu sudah mulai banyak, industry juga membutuhkan maka mulai ada seleksi-seleksi yang ada. Tapi kami akan terus lakukan ini, tentu saja kita pada ujung nanti pada upaya berikutnya tidak harus tergantung dengan ekspor. Oleh karena itu kita akan coba melakukan, mendorong industri-industri, home industri melalui chipping dan tepungnya tentu dilakukan ditingkat-tingkat katakanlah tingkat dasar, ada industry menengah sampai dengan katakanlah tepung dan kemudian ada pengolahan, dan yang terakhir yang diresmikan Bapak Presiden itu adalah industry porang chipping, pecahan chipping, kemudian atau keripiki chipping, kemudian dia masuk kepada tepung, dan berikutnya diletakkan batu pertama untuk mendirikan industri beras porang. Per kilo 1. beras porang itu harganya Rp240.000 di luar negeri. Hal yang sama dengan, kita mempersiapkan beras porang itu karena hampir semua orang diet, hampir semua orang diabet, hampir semua orang yang bersoal dengan cancer menggunakan itu di dunia Bapak, dan kita punya porang yang dikirim ke Jepang, kita punya porang yang dikirim ke China. Ya dari Jepang kembalinya Sirataki itu. Nah kita buat sendiri Pimpinan. Oleh karena itu, kalau dia dalam skala tertentu katakanlah 100 hektar, kita bisa industri melalui chipping, lebih dari 100 hektar menjadi ... (00.21.38) menjadi tepung, bisa di ... (00.21.40) langsung oleh rakyat. Tentu ini melalui suatu konsepsi yang harus terbangun, ada pelatihan-pelatihan dan lain-lain sehingga.

Bapak-Bapak sekalian,

Kita hanya mampu mengembangkan ini sampai 10.000 kedepan. Harapannya setiap tahun hanya 10.000, kalau begitu sampai 2024 saya kira sampai 100.000 hektar masih mungkin dan kita akan mapping terus. Akan kelebihan dari porang misalnya, porang itu harus ditumpangsarikan dengan tanaman yang tinggi termasuk pisang. Oleh karena itu 7 bulan pisangnya diambil, porangnya 8 bulan, MT2-nya 16 bulan, dan MT pisang bisa menjadi 3 kali, karena 1 kali pisang dipotong tanahnya 3. Jadi dia kalau 1 hektar bisa 1000, maka dia menjadi 3000 pada MT2 pisang. Porang kalau tidak diambil tdiak mengapa, sampai 3 tahun, 4 tahun taruh saja dibawah situ tidak dibeli,

jadi ini barang tidak busuk Bapak. Kalau dia ditaruh makin besar. Jadi berbeda dengan buah yang nanti dia hancur. Oleh karena itu memang ini memang saya kira, Bapak Presiden sangat antusias banget, dan porang tidak hanya untuk makanan, porang sekarang dipakai untuk kosmetik, porang dipakai untuk farmasi, kira-kira begitulah. Sehingga mudah-mudahan, tolong pengawasan Pimpinan dari Komisi IV kami coba sikapi dalam bentuk yang sistematis. Tentu belum sempurna apa yang kita lakukan karena ini baru kita ambil alih dalam 2 tahun terakhir, dan kelihatannya perkembangannya cukup menjanjikan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Tunggu-tunggu, saya juga dari tadi sudah mau motong karena tadi masalah beras, masalah lain-lain saya juga mau motong, sampai selesai, silakan, baru yang mau interupsi-interupsi jadi clear semua.

MENTERI PERTANIAN:

Kemudian masalah stunting, beras stunting, varietas stunting kita sudah siapkan, sekarang lagi dalam koordinasi dan pembicaraan langsung dengan Menko PMK untuk bisa kita intervensi pada daerah-daerah khusus yang memerlukan untuk kita. Saya kira varietas-varietas stunting yang kita capai ini sudah mendapatkan pengakuan-pengakuan untuk mengembangkan kedepan. Kurang lebih seperti itu. Yang lain kami jadikan catatan.

Ijin, dari data statistik kami akan lihat NTP (Nilai Tukar Petani) dan Nilai Usaha Petani dalam 1 tahun 2020, ini data statistik ... (00.24.30) kami. Ijin kami sajikan. Ini Bapak, kita star di 99, 2 tahun lalu. Sekarang mencapai 103, 100, ya kurang lebih seperti inilah. Berarti memang nilai kesejahteraan petani juga dalam Covid kelihatannya juga bertambah, tidak turun Bapak walaupun tentu terjadi fluktuasi-fluktuasi yang tertentu. Kalau kita lihat dari target yang ada di 2024 itu 104 Bapak, 124. Jadi kita tinggal 1 tahun ini kira-kira kita dorong terus biar nilai tukar ini ada.

Saya kira dari saya itu. Nanti kalau ada tanggapan lain khusus untuk pendapatan atau PNBPN itu yang terbesar penerimaan itu tadi ada pertanyaan Pak di Karantina 277,5 Miliar itu dari Karantina. Jadi seperti tadi bahwa Karantina harus diperkuat, saya kira ini bagian-bagian yang harus kita dorong kedepan. Dari saya secara umum itu.

Kalau anggaran kasih waktu 1 bulan ini untuk lebih focus. Ada kegamangan sedikit di tingkat implementasi karena refocusing mengancam terus Bapak. Bagi Pejabat yang menengah ini tentu implementasi program takut ini digulirkan kemudian terjadi refocusing, dan untung kemarin tidak buru-buru. Jadi kurang lebih ini mungkin alasan saya mengatakan seperti itu, tapi kenyataannya saya sudah dorong luar biasa, kok biasanya ada kegamangan karena ada informasi akan ada refocusing lagi, refocusing lagi jadi seperti itu.

Bapak Pimpinan, Bapak sekalian.

Oleh karena itu 1 bulan ini Pak Sekjen dan para Dirjen kita akan coba focus mendorong lebih kuat lagi. Mudah-mudahan inilah refocusing yang terakhir yang ada.

Kami akan lengkapi dengan, mungkin kalau masih dibutuhkan Eselon I kami akan menambahkan tetapi lebih banyak kami akan siapkan jawaban tertulis.

Kami kembalikan Pimpinan.
Sekian.

Assalamua'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih Saudara Menteri atas jawabannya.

Dari tadi saya ingin bertanya, yang pertama pertanyaan saya tadi mengenai impor beras tadi. Ini beras utuh, atau beras mati, atau beras Jepang (beras khusus) atau karena yang saya tahu ini sebagian besar ini beras pecah. Setahu saya yang dulu peraturannya setiap ada impor masalah pangan harus ada rekomendasi dari Kementerian terkait. Seperti impor garam itu harus ada rekomendasi dari Kementerian KKP. Oh tadi bilang ada, berarti tidak ada suratnya. Menteri? Tidak ada surat?

MENTERI PERTANIAN:

Tidak ada Pak.

KETUA RAPAT:

Tidak ada surat, dikeluarkan?

MENTERI PERTANIAN:

Tidak.

KETUA RAPAT:

Tidak ada persetujuan impor?

MENTERI PERTANIAN:

Tidak.

KETUA RAPAT:

Berarti itu kemungkinan besar adalah untuk industri. Dikeluarkannya, rekomendasinya dari Kementerian Perindustrian. Biasanya seperti itu. Yang

kedua tadi saya tanyakan, kok Pak Menteri Cuma berbicara Berdikari, tidak bicara SHS sama Pertani yang untuk dinaikan? Tolong SHS, Pertani, Berdikari, ini kan semua anak asuhnya Kementerian Pertanian. Tolong tiga-tiganya didorong diberdayakan, jangan hanya orang luar saja. Kalau mereka bisa memproduksi benih bibit yang bagus sertakan, kalau perlu mereka suruh kerjasama sama Litbang untuk pengembangan bibit dan lain-lain. Jangan hanya asing-asing-asing saja. Ini yang saya tidak mau. Masa kita bibit, benih saja dijajah sama asing. Ini sudah 76 tahun, sedangkan yang namanya PT Pertani itu kan dari Pertani atau SHS yang dari zaman Belanda? Pertani ya. PT Pertani itu dari zaman sudah ada. Berarti ini Dirut RNI-nya ini kurang lobi. Coba nanti banyak omong sama Pak Menteri supaya ada peningkatan. Saya maunya SHS sama Pertani hidup kembali, termasuk Berdikari juga. Jangan nanti Berdikari dikasih 10.000 ekor sapi, ekornya saja, sapinya enggak ada.

Silakan yang interupsi.

Siapa dulu?

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Saya Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Terima kasih.

Saudara Menteri,

Saya minta tolong, dari tadi yang disampaikan oleh Bapak terkait ekspor tadi, okelah kita sepakat tetapi dari awal kami minta tolong data Pak. Data komoditi ini enggak pernah clear, kan itu. Kayak Litbang, varietasnya banyak mungkin tapi kan fokusnya dimana. Kalau maaf kata kayak Sumatera Selatan misalkan kemarin saya baca listnya itu sesuatu yang *sorry to say* tidak terlalu perlu dibanggain karena ada enggak juga jalan Pak Menteri. Jadi saya kembali lagi, minta tolong data Pak. Dengan segala rasa hormat kami semua didalam forum ini meminta tolong data di *provide*. Karantina itu yang lagi bisik-bisik itu ya tolong dilibatkan juga Pak. Bapak bicara wallet. Wallet itu ya dari zaman saya masih bayi sampai setua ini ya sudah ada juga, tapi apa yang menjadi hilirisasinya. Demand itu ada syarat-syaratnya seperti apa? apa sekarang Karantina memenuhi standar sarana, prasarana untuk mengkuualifikasi itu, kan enggak juga. Jadi saya harap list dari komoditi itu Pak Sekjen, jangan dicatat terus Pak tapi enggak dikerjain. Ini sudah berapa kali diminta Pak Sekjen. Jadi saya mohon sekali lagi nanti di RDP saya, kita semua meminta disajikan itu Pak Menteri.

Terima kasih.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Saya ijin Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Johan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Siap.

Pertama soal impor beras Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa 2 tahun terakhir ini tidak ada importasi, kalau ada itu penyelundupan. Sudah dipertajam juga sama Pak Ketua tadi mengatakan tidak ada surat yang dikeluarkan oleh Kementerian. Karenanya menurut saya tolong Pak Menteri berikan hak jawab karena berita tentang importasi ini sudah banyak media yang memberitakan. Saya ambil salah satu contoh berita CNBC, mengatakan bahwa impor beras melonjak 232% di Maret 2021 terbesar dari India, itu judul beritanya. Kalau memang betul kita tidak ada impor Pak berikan hak jawab, jangan didiamin. Kalau Bapak diamin karena mereka mengambil data BPS. Nah kita harus bisa memberikan dengan data-data yang kita punya, atau misalnya apa yang menjadi perlu kita klarifikasi agar public tidak membenarkan berita ini. Nah itu Pak Ketua yang pertama.

Yang kedua, soal burung wallet karena kampung saya lagi booming Pak. Sumbawa itu jadi pusat burung wallet juga sekarang. Kalau 1-2 sarang punyalah kita Pak Menteri. Nah jadi apa yang Pak Menteri ceritakan tadi itu sudah dikerjakan oleh rakyat dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Nah yang dikerjakan oleh rakyat itu, itu bahkan pembeli dari China datang langsung ke Dompu Pak. Dari Surabaya, dari luar langsung kesana, dia tidak mau melalui calo-calo yang ada di Indonesia. Nah menjadi persoalan kan ketika Pemerintah intervensi sekarang masuk, membuatlah aturan yang disebut tadi itu sampai bagaimana rupa kandangnya, dimana dia berada, nah itu kan yang mempersulit. Nah jadi maksud saya itu, masuknya Pemerintah harusnya kan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Masuknya Pemerintah harusnya memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Nah tapi ini kenapa ketika Pemerintah masuk, justru mereka terganggu. Nah itu kan yang diangkat oleh Pak Suhardi tadi itu. Tapi Alhamdulillah kalau soal harga di kami ini sekarang masih bagus Pak. Jadi misalnya harga yang mangkok itu 11 juta misalnya, tapi kalau misalnya ada nilai tambah dari kita. Kita beri mesin untuk membersihkan segala macam ini saja bisa sampai 22 juta. Nah tapi jangan sampai kemudian seperti burung wallet, porang ini. Sudah kita ngomong begini, Pemerintah begini, komoditas ini, nilai ekspor begini, nilai ekonominya begini-begini, tapi tidak ada intervensi dari Pemerintah. Kita yang ditagih Pak. Pak Johan, kita ini lagi rapat dengan Kementerian itu minta kami bibit porang dong. Kan itu pertanyaan public ketika Pemerintah mengatakan bahwa kita ini akan mengembangkan porang, mengembangkan burung wallet, minta, saya bisik Pak Wandu, oh ndak, itu sudah menjadi pekerjaan swasta, kita enggak masuklah disitu. Mana yang bisa kita pegang. Kan begitu Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Ketua, saya tambahkan sedikit.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak Suhardi Duka, saya menjelaskan ke Pak Johan mengenai rumah walet tadi. Jadi begini, Karantina negara China tidak akan menerima impor apabila tidak ada sertifikasi rumah walet. Jadi dari Kementerian Pertanian menunjuk Karantina untuk melihat, oh ini loh. Ini sudah ada sertifikasi. Itu bukan mempersulit Cuma mungkin Pejabat oknumnya yang mempersulit. Peraturannya adalah untuk yang bisa diekspor wajib rumah waletnya ada sertifikat. Bukan sertifikat halal, bukan. Sertifikat bahwa ini benar disini dibudidayakan. Itu yang pertama.

Yang kedua, mesin untuk pembersihan sarang burung walet tidak ada. Kalau Pak Johan mau lihat nanti sama saya ke Tangerang, ada orang yang punya pembersihan walet kurang lebih 3-400 tenaga kerja wanita. Itu pun masuk kesitu harus pakai seragam, pakai segala macam supaya jangan ada 1 rambut pun yang jatuh masuk kedalam situ.

Yang ketiga, saran kita semua nih ke Pemerintah. Jangan ekspor roll material. Jadi Chinanya enggak bisa beli ke kita. Belinya barang jadi. Dibersihkan dulu, terus di packaging, baru diekspor. Itu mempunyai nilai tambah yang paling banyak untuk petani kita.

Ya Pak Suhardi Duka silakan.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Terima kasih Ketua.

Saya hanya titip sama Pak Menteri terhadap 6 perusahaan yang mengekspor walet ke Tiongkok yaitu PT Cempaka Mega Mandiri Organik Hans, Anugrah Citra Walet Indonesia, Fortunanity Indo Sukses, ... Citra Abadi dan ... (00.36.41). ini diberikan pengawasan yang ketat karena inilah yang diduga memasukan walet ke China dengan nitrit yang tinggi. Sehingga China sedikit menghambat produk Indonesia walet masuk ke China.

Terima kasih Pak Menteri.

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Maksudnya nitrit itu apa, saya enggak jelas.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Itu kandungan kimia yang ada di.

KETUA RAPAT:

Oh, ini saya jelaskan sedikit. Kebetulan saya ya sedikit-sedikit paham. Jadi kalau sarang burung walet itu biasanya ada yang dicampur pemutih untuk membersihkannya supaya kelihatannya putih. Ini oknum yang tidak benar.

Yang kedua, ada juga sarang burung walet yang ada darahnya. Jadi kalau yang ada darahnya itu harganya lebih mahal daripada yang biasa tetapi orang Indonesia mohon maaf ada oknum yang nakal, darahnya itu bukan darah asli dari waletnya tetapi buatan. Maka berapa kali kita di ... (00.37.56) sama China, termasuk Pak Suhardi Duka ngomong tadi pakai pemutih, itu ada juga bukannya enggak ada. Jadi yang paling clear adalah tidak boleh ekspor roll material, titik. Nah tinggal Menteri Pertanian bicara sama Menteri Perdagangan selesailah urusan itu. Jadi yang diekspor adalah barang jadi. Tujuannya apa, nilai tambah petaninya akan lebih baik. Ya Pak Suhardi ya.

Ada lagi yang lain Anggota?

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pak Ketua, saya tertarik untuk diskusi soal ini Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Oh silakan. Kalau mau diskusi sama saya nanti setelah ini. Lanjutkan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Boleh ya Pak Ketua?
Terima kasih.

Pak Menteri,

Saya mengumpamakan tadi kan saya bicara soal mandiri dan daulat benih, tetapi ada indikasi yang menguasai benih kita itu adalah korporasi dibidang perbenihan, itu tesis saya tadi. Kalau saya konversikan diskusi ini masuk kepada soal walet ini saya setuju yang pertama ada standarisasi kualitas karena pembeli itu ingin hal-hal yang baik, satu. Tetapi jangan sampai yang terjadi itu adalah Korporatokrasi, dimana ada permainan korporasi dalam pengertian kartel wallet ini yang kemudian memanfaatkan instrument sertifikasi atau pun standarisasi yang sebenarnya dampaknya juga kepada pengusaha rakyat, karena sebelum ada ini pun kan transaksi ini kan sudah ada Pak. Saya setuju saja negara dalam hal ini Kementerian teknis itu memberikan pendampingan, memberikan pemberdayaan, memudahkan akses, dan ujungnya adalah kualitas ini betul-betul terjaga. Tetapi jangan sampai nanti kemudian kartel korporasi ini yang mengatur semuanya dan kemudian rakyat kita yang terkapar. Nah ini kita juga harus hati-hati. Indah memang kata-kata kualitas, standarisai, sertifikasi, tetapi dibalik ini kita pernah berpikir enggak bahwa ini adalah juga instrument yang dipakai oleh asing untuk kemudian mematikan potensi dalam negeri kita, atau minimal kita mendikte pasar kita.

Nah saya belum punya data yang cukup kuat Pak. Tetapi pola-pola seperti ini bisa kita rasakan atau kita curigai.

Terima kasih.

Pak Ketua, saya kembalikan.

KETUA RAPAT:

Cukup?

Menteri mau jawab silakan, kalau ada yang mau dijawab lagi.

MENTERI PERTANIAN:

Kami akan perhatikan saja Ketua, Inshaa Allah seperti itu karena GACC dari China itu. Kebetulan pasar yang bagus itu China, jauh hampir 2-3 kali lipat dibandingkan pasar lain, bukan berarti pasar lain tidak. GACC China itu sangat berkuasa Bapak. Saya sendiri melakukan upaya-upaya sampai menerobos ke Menteri-Menteri yang lain disana, ternyata dan pernah beberapa kali ... (00.4.13) Pak. GACC enggak mau kalau dia enggak cek langsung rumah wallet itu, bukan, rumah prosesing. Jadi bukan kita yang mempersulit itu Pak, mereka dan dia memiliki instrument yang kuat untuk itu. Jadi seperti itu. Seperti yang Pak Suhardi Duka katakan, kapan ada 1 saja yang melakukan sebuah penyimpangan kena semua Pak. Seperti tadi, porang itu. Karena ada yang kirim ... chipping kemudian chipping ada jamurnya, dia blok seluruhnya dan dia tahu kalau dia punya kekuatan itu. Jadi kami perhatikan semua Pak. Mohon kita selalu sama-sama Pimpinan, kan masing-masing di Dapil sendiri, ini porang memang menarik banget Pimpinan, dan saya kira kita harus bisa memberi ruang karena harga beras ini sangat mahal dan tentu saja diminati seluruh dunia Bapak. Jadi ruang itu pasti ada tetapi kita tidak boleh tergantung dengan ekspor karena seperti itu. Kalau menghadapi RRC itu, China itu kalau kita sudah kembangkan dia mulai nutup diri Pak. Ini juga strategi dagang saya pikir yang ada, kadang-kadang kita berhadapan dengan tangan-tangan mereka yang ada juga disekitar kita. Jadi saya sependapat. Mohon bimbingan saja. Kami siap dilapangan Pak.

Terima kasih.

Kami kembalikan.

KETUA RAPAT:

Kembali tadi ke masalah porang diekspor berupa chipping diekspor ada jamurnya, itu siapa yang salah? Ya Kementerian. Ini salah satunya tanaman pangan Suwandi. Karena apa, mereka menjemur itu tanpa alas, ditanah. Kalau waktu panas dia kering, begitu malam kena embun timbul air kena panas lagi akan berjamur. Begitu waktu zaman Pak Kasdi dari Dirjen Perkebunan maka saya bilang, untuk petani kopi dibantu terpalnya, kan gitu. Karena apa? selama ini kan masih tradisional dijemur ditanah, waktu pagi kena embun, waktu siang kena panas otomatis jamur. Jangankan makanan gitu, kita kalau panas hujan, panas hujan kena jamur juga kita.

Kemudian tadi menanggapi Pak Ansy Lema yang mengatakan mandiri benih. Saya minta nanti dalam kesimpulan dimasukin Ayu. Harus

menggunakan memanfaatkan BUMN Berdikari khususnya ternak, SHS dan Pertanian khususnya bibit dan benih. Masukan tambahannya. Karena apa, saya enggak suka asing menjajah kita masalah benih. Ini kan kita tahu paling Mosanto, buyer, lain-lain, masa kita mau asing melulu.

Jadi Saudara Dirut RNI,

Segera bikin MoU dengan Litbang untuk pengembangan bibit dan benih supaya kita mandiri terlepas daripada asing.

Terima kasih Pak Menteri sudah menyampaikan jawabannya.

Bapak dan Ibu,

Dari dialog saran dan masukan, sebelum acara ini kami akhiri akan dibacakan rancangan kesimpulan Rapat Kerja pada hari ini oleh Ibu Anggia yang tadi mau makan enggak jadi.

KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINA, M.K.M.):

Baik.

Terima kasih Pimpinan.

Saya ini mau cari makanan yang seger-seger enggak boleh.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ijin dicermati, Eselon I masalah angka. Kalau ada yang salah langsung interupsi.

KETUA RAPAT:

Baik, ditayangkan saja dulu.

Baik Bapak/Ibu, Pak Menteri, dan Bapak/Ibu Eselon I,

Mohon untuk dilihat untuk point pertama terutama karena ini angka dan saya tidak akan bacakan secara keseluruhan untuk point yang pertama karena ini yang sudah diaudit.

Draft kesimpulan:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas laporan keuangan Pemerintah Pusat LKPP, Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020 per 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:
(Ini yang mohon untuk dilihat. Terus langsung ditarik kebawah saja).
Pak Sekjen mohon dilihat.
Sampai d. Sudah sesuai ya Pak? Baik.
Point pertama setuju, para Anggota?

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya, Pak Ichsan.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Saya kira untuk point pertama ini kan sudah keputusan. Jadi bukan lagi menerima penjelasan. Saya menerima laporan keuangan untuk 2020 karena ini akan menjadi keputusan nanti di.

KETUA RAPAT:

Audited.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kan penjelasan kalau sudah di audit kan. Kalau kemarin sih penjelasan, menerima penjelasan. Siapa yang ahli Bahasa? Yang S-3?

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kemarin juga waktu sama KKP, kan Kementerian menjelaskan kepada kami laporan hasil. Ya kami menerima penjelasannya. Kemarin pun begitu jawaban dengan KKP, menerima penjelasan. Kalau hanya menerima, apa yang diterima. Kan penjelasannya ini yang diterima oleh kami.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ijin Ketua.

Ini yang dimaksud dengan Pak Suhardi mohon ijin, apakah kita ini konteksnya didalam Raker ini menyetujui atau tidak menyetujui? Ini kan aturannya kayak bagaimana, kalau memang menerima penjelasan artinya sama dengan nanti di point selanjutnya, ada menerima penjelasan. Tapi kalau ini sudah dianggap final ya sudah kita setuju saja, menyetujui laporan keuangan Pemerintah Pusat. Ada konsekuensi hukumnya enggak kalau kemudian kita menyetujui atau tidak menyetujui. Kira-kira itu gambarannya Pak Ketua.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pak Ichsan, ini kan hasil audit BPK. Kita setuju enggak setuju tetap jalan kok. Ini menerima penjelasan bahwa BPK telah memeriksa Kementerian

Pertanian, menerima penjelasannya, bukan menyetujui. Kita enggak setuju juga tetap jalan kalau ini sudah selesai, gitu loh. Iya kan.

Lanjutkan Bu Anggi.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Saya hanya menjelaskan saja maksudnya Pak Suhardi Pak Ketua, jangan marah-marah ke saya Pak Ketua.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Begitu Ketua, sedikit agak berbeda. Karena ini kan akan ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang laporan keuangan Pemerintah Tahun 2020. Berbeda halnya dengan kalau 2021 kita menerima penjelasan karena memang belum penetapan. Kita masih akan bahas. Kalau yang di 2020 ini kan sudah final disini, tidak ada lagi pembahasan berikutnya. Jadi saya kira bukan penjelasan yang kita terima tapi adalah menerima laporan keuangan Pemerintah Pusat yang sudah diaudit oleh BPK yang disajikan oleh Kementerian Pertanian. Tapi kalau memang kesepakatan kita menerima penjelasan ya enggak ada konsekuensi hukumnya bagi kita.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Untuk singkatnya begini saja, menerima laporan keuangan, “penjelasan” atasnya buang. Hanya “menerima”? Ya sudah.

Oke. Lanjutan Bu Anggi.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

2. Komisi IV DPR RI mengkritisi serapan anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2021 yang belum optimal dan meminta Eselon I Kementerian Pertanian yang serapannya masih dibawah 60% segera mengambil langkah-langkah operasional untuk mempercepat penyerapan anggaran. Selanjutnya menindaklanjuti kesimpulan Rapat Kerja tanggal 21 Juni 2021, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian melakukan evaluasi pelaksanaan penyerapan anggaran kegiatan Tahun 2021, serta melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Tahun 2021.

Para Anggota?

Pak Menteri?

MENTERI PERTANIAN:

Setuju Pak.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas pagu anggaran Kementerian Pertanian dalam RKAKL Tahun 2022 sebesar Rp14.451.749.428.000,00 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri BPN, Kepala Bapenas Nomor S-634/MK.02/2021, dan 516/M.PPN/D.8/KU.0101/02/2021, tanggal 23 Juli 2021. Perihal: Pagu anggaran Kementerian/Lembaga dan penyelesaian rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan pembahasan dengan Eselon I Kementerian Pertanian untuk menentukan rincian alokasi dan program masing-masing Eselon I pada Rapat Dengar Pendapat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Para Anggota?
Pak Menteri?

MENTERI PERTANIAN:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai pagu Dana Alokasi Khusus Kementerian Pertanian Tahun 2022 sebesar Rp2.400.000.000.000,00 dan penjelasan menu DAK bidang pertanian, antara lain: pembangunan/rehabilitasi, jaringan irigasi, dan jalan pertanian, lumbung pangan masyarakat, serta sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hasil pertanian. Adapun rinciannya sebagai berikut:
 - a. DAK fisik penugasan bidang pertanian Rp2.200.000.000.000,00 di 288 Kabupaten/Kota,
 - b. DAK non fisik ketahanan pangan dan pertanian sebesar Rp200.000.000.000,00 di 510 Kabupaten/Kota.Selanjutnya akan dilakukan pendalaman dalam rapat selanjutnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
Para Anggota?
Pak Menteri?

MENTERI PERTANIAN:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan kajian terhadap tugas, fungsi dan wewenang Badan Ketahanan Pangan merujuk pada terbentuknya Badan Pangan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional yang kemudian akan dibahas pada rapat selanjutnya.
Para Anggota?
Pak Menteri?

MENTERI PERTANIAN:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan kajian terhadap tugas, fungsi dan kewenangan Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian merujuk kepada terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mengusulkan agar unit kerja BPTP dipertahankan dan diintegrasikan dengan tugas fungsi penyuluhan sebagai upaya akselerasi penyebaran teknologi.
Para Anggota?
Pak Menteri?

MENTERI PERTANIAN:

Khusus point ini Bapak, penyesuaian ke BRIN. Bolehkah kami dikasih waktu untuk melakukan konsolidasi yang mana yang harus kita serahkan kesana, karena mereka kan minta 3P-nya (Prasana, Personal dan Program). Oleh karena itu kami masih punya waktu, kami sudah ketemu dengan BRIN dan dia akan mencoba mengakomodasi pikiran kita dalam 3, yang pertama yang berkaitan dengan riset dasar saja yang beralih, dan itu kita tentukan. Kemudian yang kedua total beralih, dan kita tidak setuju kalau itu ternyata kita tetap utuh. Dan khusus untuk personal adalah riset atau peneliti-peneliti khusus yang kita butuhkan tidak boleh berpindah, seperti itu Pak. Jadi kalau ini kita langsung setuju disini mungkin saran kami Pimpinan dan Anggota, mungkin kami dikasih waktu sedikit untuk melakukan kajian dan kita, dan saya lihat BRIN juga belum terlalu siap juga ... (suara tidak jelas). Seperti itu Pak, kalau tidak diarahkan merusak total anggaran yang kita sementara sudah susun dan sementara berjalan.

Terima kasih Pak.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Begini, ini kan enggak ada kita setuju atau tidak setuju. Belum Pak Menteri, belum. Jadi Komisi IV meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan kajian terhadap tugas, fungsi, kewenangan Badan Peneliti dan

Pengembangan Pertanian merujuk kepada terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Pertanian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selanjutnya Komisi IV Republik Indonesia mengusulkan agar kalau ini terjadi dipindahkan semua agar BPTP tetap ditinggalkan di Kementerian Pertanian apabila terjadi, apabila memang tidak ya tetap semua di Kementerian Pertanian. Kami tidak bilang harus pindah, enggak. Coba dibaca lagi yang jelas, mengusulkan.

KETUA RAPAT:

Atau usul hanya sampai ke teknologi, titik.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Berarti kalau sampai situ nanti BPTP-nya pun diambil semua.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan, ijin Pimpinan.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Iya.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Mungkin yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Pak Menteri itu ada klasifikasi tentang apa-apa saja sih yang mau diserahkan misalkan seperti itu, walaupun ada kajian mungkin ada nomenklatur-nomenklatur yang disampaikan atau diucapkan disini, bukan berarti tidak mau point 6 ini masuk tapi mungkin ada. Saya pikir tadi apa yang disampaikan Pak Menteri ada beberapa point-point tertentu yang mungkin mau diselipkan atau mau ditetapkan, atau mau tetap di Menteri Pertanian. Mungkin apa yang perlu dipertahankan mungkin bisa di ini agar Komisi IV mengetahui kajian apa saja yang harus ... (suara tidak jelas).

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Saya paham. Kalau begitu sampai “teknologi” titik.

Coba dibaca ulang lagi Sekjen. Kita tidak mendorong, judulnya pun tidak melarang, tapi minta tolong dikaji ulang.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Terma kasih Pak Ketua.

Kami ulangi, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan kajian terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian merujuk kepada terbentuknya Badan Riset dan

Inovasi Nasional (BRIN) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Cukup?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Cukup Pak.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Betul kan?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Iya.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ini kan kantong kiri kantong kanan, Pemerintah dengan Pemerintah. Iya toh?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Betul Pak.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Cukup?

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT

7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melaporkan status kepegawaian bagi peneliti beserta status asset di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian merujuk kepada terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang kemudian akan dibahas dalam rapat selanjutnya.

ANGGOTA:

Point 7 ... (suara tidak jelas).

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Jangan dimasukkan.

KETUA RAPAT:

Drop.

Oke, sudah didrop? Ya.

7. Komisi IV DPR RI menyesalkan masih rendahnya serapan pupuk bersubsidi sebesar 42%. Untuk itu Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan langkah strategis dalam meningkatkan serapan pupuk bersubsidi. Selanjutnya Komisi IV DPR RI.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan, mohon maaf.

Itu “menyesalkan”, kayak patah hati saja. Coba buat kata yang tepat sedikit. “Komisi IV DPR RI menilai.

KETUA RAPAT:

Baik ya saya ulangi Bapak/Ibu sekalian,

7. Komisi IV DPR RI menilai masih rendahnya serapan pupuk bersubsidi sebesar 42%. Untuk itu Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan langkah strategis dalam meningkatkan serapan pupuk bersubsidi. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk menyelesaikan kurang bayar pupuk bersubsidi pada PT Pupuk Indonesia *Holding Company* sebesar Rp2.550.292.290.127,00-.
Para Anggota?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan, ini menyelesaikan kurang bayar Pupuk Bersubsidi ini kepada Pupuk Indonesia *Holding Company* sebesar Rp2.550 Triliun dan 200 ini, ini dimana ini pupuk holding dia?

KETUA RAPAT:

Sebentar, Pak Kasdi mau berikan penjelasan mungkin.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Ijin Pak Menteri.

Pak Ketua,

Itu realisasinya 52,9% Bapak per 23 Agustus.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ini kata PSP kan?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Iya.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Coba dijawab yang dari Holding Pupuk, berapa persen?

... :

(suara tidak terekam).

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Bukan, serapan pupuk.

PT PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY:

Ijin Pak Ketua, dan Bapak/Ibu sekalian.

Posisi sampai dengan 20 Agustus kurang lebih sekitar 52% Pak.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Berarti 52,9. Ini waktunya hanya tinggal 4 bulan. Berarti hampir *fifty-fifty*, iya toh? Nah, Jumat kita kan ada kunjungan Panja Pupuk. Saya tanya masalahnya di pabrik dimana, masalahnya dimana, termasuk lain-lain. Nanti kita FGD dengan pertanian, perihal kenapa penyerapan pupuknya rendah? Nah baru kita padukan, kita cari seperti yang awal tadi, bagaimana jalan terbaik. Bukan begitu Mbak Luluk? Jalan terbaik.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Baik.

Masalah untuk kurang bayar ini Pupuk Bersubsidi ini sudah total atau bagaimana? Kalau enggak salah kemarin kita juga ada bawaan dari Tahun 2020.

KETUA RAPAT:

Hasil audit BPK 2020. Angkanya benar begitu Pak?

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

2020 yang sudah diaudit BPK, kurang bayarnya Rp2 Triliun 550 Miliar. Betul?

PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY*:

Betul.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Enggak salah?

PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY*:

Enggak Pak.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kalau salah nombok loh.

PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY*:

Itu untuk Tahun 2020 saja Pak.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

2019?

PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY*:

2019 kemarin sudah dibayar.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Sudah bayar?
Sudah enggak ada utang lagi?

PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY*:

... (01.06.11) 2021 ada tapi masih dalam ... (01.06.14).

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Iya oke setuju.
Jadi Mbak Alien ini berdasarkan audit BPK, ada kekurangan bayar 2 triliun lebih untuk Tahun 2020.

... :

Ijin Pak Ketua.
Ijin Pak Menteri.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Iya.

... :

Yang terkait dengan teman-teman dari PIHC Pak. Ini laporannya BPK Pak. Jadi yang untuk 2020, yang audited itu 2,361. Rp2,361,170,191.191,00 itu terdiri dari kurang bayar 2,5, lebih bayarnya ada 139 sehingga totalnya 2,3 Pak yang kurang bayar itu. Ada ini datanya Pak, itu laporannya BPK. Jadi ada kurang bayar, ada lebih bayar. Sehingga totalnya itu menjadi 2,3. Seperti ini Pak.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Itu tadi yang saya pertanyakan.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Coba dari Holding.
Betul enggak apa yang dinyatakan oleh PSP?

... :

Itu cuplikannya BPK.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Yang mewakili Dirut Holding Pupuk, jawab.

PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY*:

Kami akan verifikasi Pak. Ini kalau kami hanya mencatat yang kurang bayar saja, tadi Pak Dirjen kan ada yang sampai lebih bayar.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Begini Pimpinan, ini bukan pakai catat kembali. Ini dokumentasi negara Pak. Anda datang kesini menyampaikan sesuatu berdasarkan dengan audit BPK dan sesuai yang kejadian. Komisi IV ini punya tanggung jawab apalagi Pimpinan saya. Tolong ya, ini data dan ini angka, dan ini pertanggungjawaban Pak.

Terima kasih.

Saya pikir data yang dipakai sekarang, atau enggak didrop saja dulu ini yang point 7 ini.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Sekarang gini saja, ini kan masih ada selisih antara PSP dan PIHC. Meningkatkan serapan pupuk subsidi, titik. Yang lain hapus. Toh nanti akan

datang kami masih ada Raker kembali, setelah ada perhitungan yang jelas, saya juga akan membuat surat ke BPK mengenai penjelasan ini bahwa nanti kesimpulan kurang bayar dimasukan.

Anggota setuju?

SELURUH ANGGOTA:

Setuju.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pemerintah?
Pak Menteri?

MENTERI PERTANIAN:

Setuju Pak.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT:

Baik.
Terima kasih.

8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melibatkan PT Pertani, PT Berdikari, dan PT Sang Hyang Seri dalam mendukung pengembangan bibit benih dalam negeri.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Coba nih, kamu dengar saya ngomong. "... Sang Hyang Seri dalam mendukung pengembangan bibit, benih, dan peternakan di dalam negeri".

KETUA RAPAT:

Para Anggota point 8?

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Setuju.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri?

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Sudah selesai.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Sebelum kita menutup Rapat Kerja hari ini, kami persilakan Menteri Pertanian untuk menyampaikan kata menutup dalam Rapat Kerja hari ini. Cukup 3 menit.

MENTERI PERTANIAN:

*Bismilahirrahmanirrahim,
Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Pimpinan, dan segenap Anggota Komisi IV DPR,

Ijinkan kami menyampaikan rasa terima kasih, Rapat Kerja ini cukup berlangsung dengan sangat baik, dan ijin kami tentu berharap tidak hanya dalam Rapat formal tapi dalam konsultasi-konsultasi Komisi Eselon I mohon dibukakan pintu untuk mendapatkan petunjuk dari Komisi IV sehingga betul-betul apa yang ada kami berharap bisa melakukannya. Keluh kesah mungkin terhadap implementasi termasuk anggaran yang sangat sedikit tadi mungkin juga ini harus dapat sedikit pencerahan atau minimal bertukar informasi tentang kondisi yang ada. Saya kira itu Pak satu-satunya hal yang kami akan coba sikapi lebih serius adalah penyerapan anggaran seperti arahan dari forum ini.

Sekali lagi terima kasih Pimpinan dan segenap Anggota. Dan Ibu Luluk selamat punya ... (01.12.22). Dan untung kami tidak hadir Pak, kalau kami hadir tentu ketangkap Satpol disana, dan dibubarin acaranya Pak. Ridho Allah bersama Pak Ketua, dan seluruh Pimpinan, mohon kami dijaga Pak. Inshaa Allah akan kerja dengan baik.

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Luar biasa. Yang awalnya mengucapkan tapi belakangnya agak ngeledek-ngeledek sedikit. Jadi sebelum kita menutup rapat hari ini saya ingatkan para Eselon I mengenai perihal kerjasama dengan BPTP. Saya mengecek loh, Anggota saya ini saya tanyakan sudah ada belum kerjasama sama BPTP. Kalau enggak, ya nanti kita lihat saja. Saya enggak mau RDP lagi dengan Eselon I-nya karena Eselon I berarti membohongi seluruh Anggota Komisi IV. Yang kedua, perihal: berikan kesempatan seluas-luasnya kepada BUMN, Berdikari, Sang Hyang Seri, dan PT Pertani.

Terima kasih. Dengan demikian berakhir sudah Rapat Kerja kita pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan, kekhilafan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobil'alamin, Rapat Kerja kami tutup.

Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.13 WIB)

Jakarta, 25 Agustus 2021
a.n. KETUA RAPAT
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Achmad Agus Tommy
NIP. 196508171988031002